



**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RKPD PROVINSI BANTEN**

**TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat karunia serta ridho-Nya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan II Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Laporan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi mengenai pencapaian atas kinerja sasaran, program kegiatan yang telah ada dalam dokumen RKPD Tahun 2025 Provinsi Banten beserta kendala/permasalahan serta rencana tindak lanjut dalam penyelesaiannya.

Dalam rangka penjabaran pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi Pembangunan Tahunan di daerah yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Pasal 245 dimana menjelaskan bahwa Kepala Bappeda Provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi.

Laporan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan II Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat membantu dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan serta bermanfaat bagi pihak terkait dalam melaksanakan pembangunan daerah di Wilayah Provinsi Banten.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, Agustus 2025

KEPALA,

Ttd.

Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM

NIP. 19690219 200112 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Ruang Lingkup	I - 3
1.3. Dasar Hukum.....	I - 4
1.4. Tujuan	I - 6
1.5. Metode Evaluasi RKPD	I - 7
1.6. Sistematika Penulisan	I - 9
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2024	 II - 1
2.1. Keselarasan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2025.....	II - 1
2.2. Keselarasan Rencana Tujuan dan Sasaran Daerah 2025.....	II - 2
2.3. Realisasi APBD TW II 2025.....	II - 8
 BAB III PELAKSANAAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025.....	 III - 1
3.1. Realisasi Kinerja Indikator Makro	III - 1
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Triwulan II Tahun 2025	III - 15
3.3. Rekapitulasi Realisasi Kinerja Urusan Triwulan II Tahun 2025.....	III - 17
3.4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	III - 36
 BAB IV ANALISIS, PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	 IV - 1
4.1. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Triwulan II 2025	IV - 1
4.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah	IV - 2
4.3. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan	IV - 6
 BAB V PENUTUP.....	 V - 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan pengaturan teknis, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi, yang mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD provinsi, dan digunakan untuk mengetahui:

1. Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; dan
2. Realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi RPJMD dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional.

Bappeda melaksanakan evaluasi berupa pemantauan dan supervisi setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah provinsi. Hasil evaluasi dimaksud digunakan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan RKPD provinsi tahun berikutnya. Kemudian Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kebijakan rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan kepada Gubernur, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

1.2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pengendalian dan Evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi:

1. Pengendalian dan evaluasi kebijakan dengan tujuan untuk menjamin bahwa kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang disusun telah melalui tahapan sesuai ketentuan dan mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, sehingga dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan sistem rencana pembangunan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya;
2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dengan tujuan untuk menjamin bahwa perencanaan pembangunan yang disusun telah menindaklanjuti atau merupakan turunan dari perencanaan pembangunan yang mempunyai lingkup lebih luas dan waktu yang lebih lama;
3. Evaluasi hasil untuk memastikan dan mengetahui secara objektif kesesuaian antara hasil capaian rencana pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan rencana pembangunan dimaksud.

1.3. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Penerimaan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2025;
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025;
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025;
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

1.4. TUJUAN

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara RKPD dengan RPJMD/RPD dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta dapat menjamin bahwa:

1. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD Provinsi sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD/RPD Provinsi;
2. Rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD Provinsi, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD/RPD Provinsi;
3. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD Provinsi, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional; dan
4. Sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD Provinsi

1.5. METODE EVALUASI RKPD

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi, dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA provinsi melakukan perbaikan/penyempurnaan, dan Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi kepada Gubernur, kemudian Gubernur menyampaikan laporan ke Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas.

Pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi, meliputi:

1. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
3. Hasil rencana pembangunan daerah.

Pada kegiatan pengendalian evaluasi yang didokumentasikan dalam buku ini adalah evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan II Tahun 2025. Adapun metode evaluasi RKPD Provinsi Banten menggunakan:

- a. Pendekatan *gap analysis* (analisis kesenjangan) yang membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD;

- b. Evaluasi Indikator kinerja kegiatan/program pembangunan daerah dilakukan dengan menghitung persentase antara capaian kinerja per triwulan dengan target kinerja dalam RKPD/Renja SKPD (hingga Triwulan II). Kinerja anggaran diukur dengan menghitung persentase antara target yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan per triwulan.

Tahapan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

Bappeda Provinsi Banten menghimpun dokumen hasil realisasi kinerja seluruh Perangkat Daerah, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Renstra dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
- b. Hasil realisasi kinerja dan anggaran pada Triwulan II Tahun 2025.

2. Pelaksanaan

Bappeda Provinsi Banten melakukan evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2025 melalui input realisasi kinerja dan keuangan dari seluruh Perangkat Daerah, berdasarkan input tersebut seluruh Pendamping Perangkat Daerah melakukan verifikasi, analisis dokumen dan menelaah keterkaitan antar dokumen hasil realisasi kinerja Triwulan, dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian antara hasil dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Renstra dan Renja Perangkat Daerah

kemudian dicatat untuk dilakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

3. Pelaporan

Kepala Bappeda menyampaikan laporan hasil evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2025 berdasarkan hasil akhir verifikasi Pendamping dari seluruh Perangkat Daerah.

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan II tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

BAB III : EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

BAB IV : ANALISIS, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan terhadap Kebijakan umum dan Program pembangunan dan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun 2025. Pada tahun pengendalian 2025 ini dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang merupakan pengganti RPJMD 2017-2022 yang telah berakhir periodesasinya.

2.1. Keselarasan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2025

Hasil dari pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2025 terhadap RPD 2023-2026 seperti pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Keselarasan Pelaksanaan RKPD Tahun 2025

RKPD dan Kumpulan Renja Perangkat Daerah	APBD dan Laporan Triwulan	Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Keselarasan Kebijakan umum dan Program pembangunan tahun 2025						
Prioritas dan Sasaran Pembangunan	KUA	√	-	-	-	-

RKPD dan Kumpulan Renja Perangkat Daerah	APBD dan Laporan Triwulan	Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif	PPAS	√	-	-	-	-
Keselarasan rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun 2025						
Program dan kegiatan seluruh Renja Perangkat Daerah	RKA Perangkat Daerah	√	-	-	-	-
Realisasi Capaian Kinerja						
Realisasi Pencapaian Target	Triwulanan					
Penyerapan Dana	Triwulanan					
Kendala Pelaksanaan	Triwulanan					

2.2. Keselarasan Rencana Tujuan, Sasaran Daerah dan Program Prioritas Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026 yang terdapat dalam dokumen RPD, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 dan program pembangunan tahun 2025 harus berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, visi misi yang digunakan pada RPD mengacu pada dokumen RPJPD 2005-2025 yang diselaraskan dengan mendukung tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Target pembangunan daerah sesuai

dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 seperti pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2.
Sasaran dan Target Pembangunan Daerah Tahun 2025

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	Realisasi 2024	Target RPD 2025	Target RKPD 2025	Tsrgt RKPD-P 2025
Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tingkat Kemiskinan	5,7	5,43	4,5-5,5	5,63
		Tingkat Pengangguran Terbuka	6,68	8,36	6,87-7,24	6,68
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (satuan: nilai)	76,35	73,82	76,00-76,50	76,35
	Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan: nilai)	62,20	66,76	66,76	9,60
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)	0,69	0,685	0,685	66,17
	Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen)	9,6	7,77	7,77	66,20
	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)	66,17	65,89	65,89	0,69

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/Sasaran	Realisasi 2024	Target RPD 2025	Target RKPD 2025	Tsrgt RKPD-P 2025
	Meningkatnya Pemerataan Akses	Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)	9,23	9,3	9,4	13,10
	dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)	13,10	14,12	14,12	9,23
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)	74,97	70,69	70,69	74,97
		Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)	24	22,5	21,3	24,00
	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	93,31	93,63	93,63	93,31
	Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)	52,49	57,43	57,43	52,49
		Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai)	53,86	50,92	50,92	53,62
Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,79	5,20-5,33	5,22-5,33	5,19
		Indeks Williamson	0,77	0,619	0,619	0,77
		Indeks Gini	0,359	0,344	0,344-0,365	0,330

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/Sasaran	Realisasi 2024	Target RPD 2025	Target RKPD 2025	Tsrgt RKPD-P 2025
	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)	2,63	5,87	33,4	2,63
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sektor industri (Satuan: persen)	4,98	5,32	5,32	4,51
		LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)	4,33	3,64	3,64	4,62
	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)	10,22	4,57	4,57	10,22
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	0,64	0,92	0,92	4,20
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	Sangat tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat tinggi
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Pertahun yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah)	13.097	12.438	12.438	13.097
Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	14,82	19,00	43,56	14,82

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	Realisasi 2024	Target RPD 2025	Target RKPD 2025	Tsrgt RKPD-P 2025
Lestari	+D28yang berkelanjutan					
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)	62,54	63,09	63,09	128,64
	Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)	128,64	142,49	142,49	62,54
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	78,17	76	79	87,49
	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)	69,24	76,56	76,56	2,76
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)	77,93	86	86	3,74
		Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai)	2,76	2-3	3-4	69,24
		Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (satuan: nilai)	3,74	3,51	3,76	77,93
	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten	cukup tangguh	Tangguh	Tangguh	tangguh

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/Sasaran	Realisasi 2024	Target RPD 2025	Target RKPD 2025	Tsrgt RKPD-P 2025
	Provinsi Banten	(satuan: level)				

Guna mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan target pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2025, ditetapkan pagu indikatif program sesuai dengan prioritas, seperti pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3 Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	22
2	Dinas Kesehatan	5	16
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	24
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8	19
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3	12
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	12
7	Dinas Sosial	6	18
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	20
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	14	36
10	Dinas Ketahanan Pangan	5	13
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15	29
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	12
13	Dinas Perhubungan	4	16
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5	13
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	14
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	14
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	14
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	14
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	28
20	Dinas Pariwisata	5	17
21	Dinas Pertanian	7	23
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	17

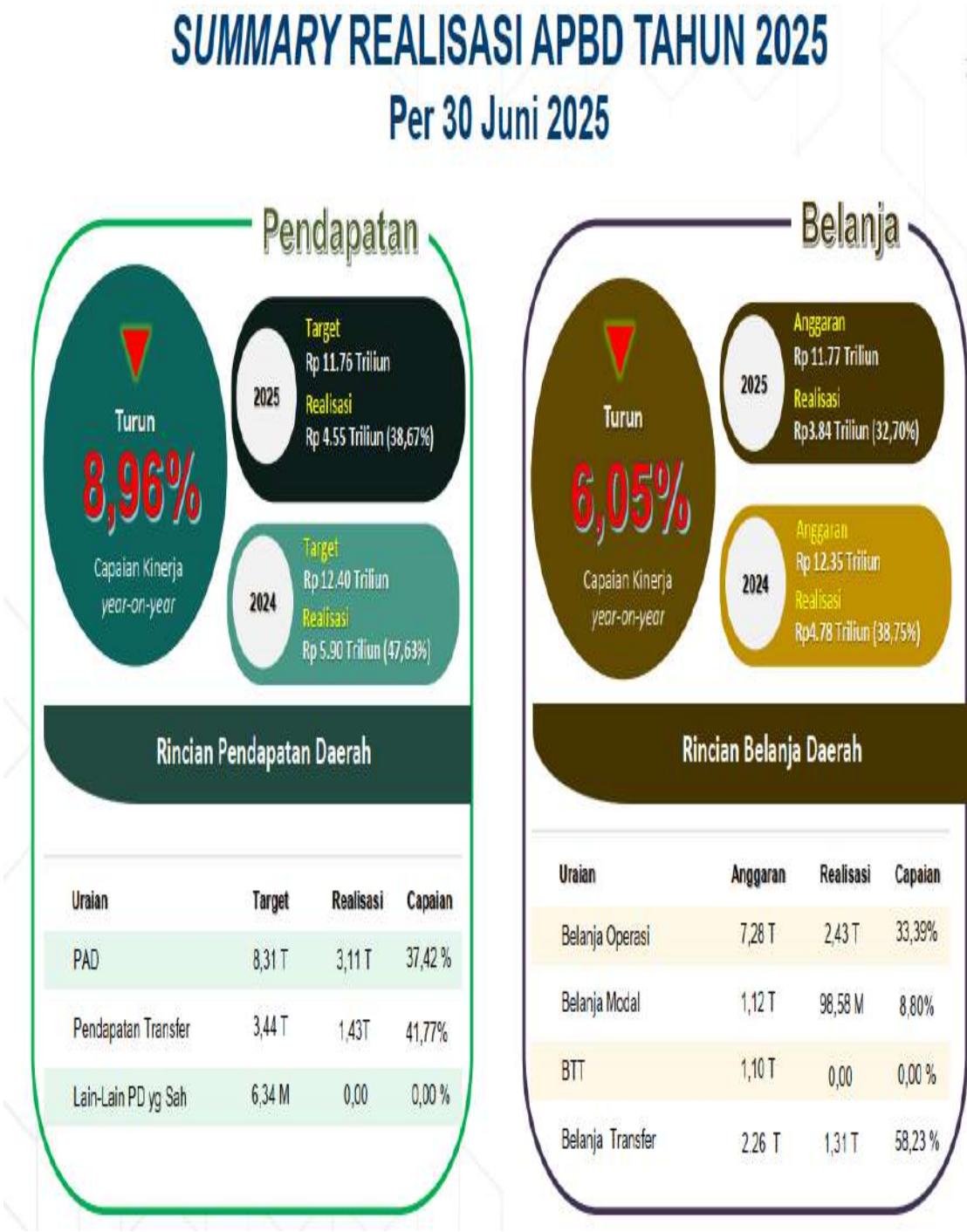
NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10	22
24	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3	11
25	Biro Hukum	2	7
26	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	2	7
27	Biro Umum dan Perlengkapan	1	10
28	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2	8
29	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	3	9
30	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	1	7
31	Sekretariat DPRD	2	17
32	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	4	19
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	15
34	Badan Pendapatan Daerah	2	9
35	Badan Kepegawaian Daerah	2	12
36	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	10
37	Badan Penghubung	2	7
38	Inspektorat	3	12
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12
JUMLAH		309	938

2.3. Realisasi APBD TW II 2025

Dalam RKPD Provinsi Banten tahun 2025 direncanakan sebanyak 309 program yang direncanakan dalam APBD. Berikut hasil realisasi APBD TW II 2025. Pendapatan Asli Daerah terealisasi Rp 4.55 Triliun atau sebesar 38,67 persen sedangkan belanja daerah terealisasi Rp 3.84 Triliun atau 32.70 persen di TW II 2025. Kinerja rata-rata provinsi Banten sebesar 32,70 persen, terdapat belanja dibawah rata-rata sebanyak 12 perangkat daerah yang realisasi belanja masih dibawah rata-rata provinsi, dengan rincian sebagai berikut.

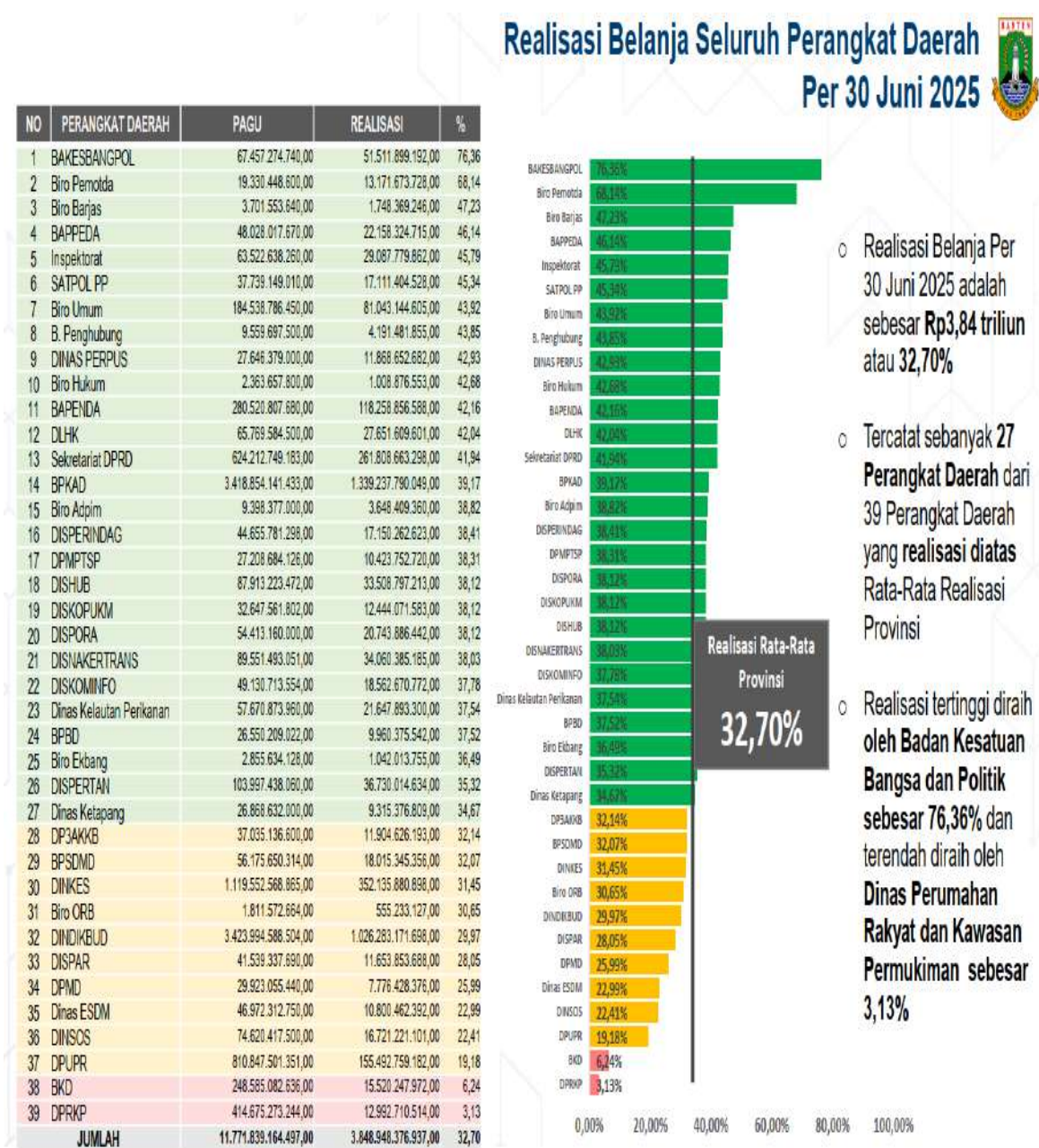
Gambar 2.1

Realisasi Pendapatan dan Belanja TA.2025 Provinsi Banten TW II



Sumber: BPKAD Provinsi Banten

Gambar 2.1
Realisasi Kinerja Keuangan Perangkat Daerah TW II 2025



Sumber: BPKAD Provinsi Banten

BAB III

HASIL PELAKSANAAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

3.1. Capaian Kinerja Indikator Makro

Penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Capaian indikator makro Provinsi Banten pada Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Indikator Makro Provinsi Banten Tahun 2025

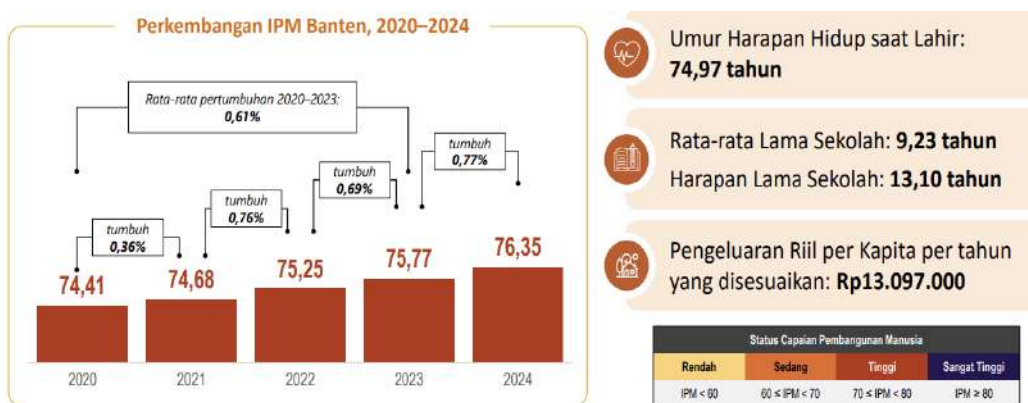
Indikator Makro	Realisasi Nasional		Realisasi Banten		
	2023	2024	2023	2024	2025 s.d Tw II
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,05	5,03	4,81	4,79	5,19
Tingkat Kemiskinan	9,36	9,03	6,17	5,87	5,63
Rasio Gini	0,388	0,379	0,368	0,353	0,330
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,39	75,02	75,77	76,35	76,35
Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	27,02*	n/a	14,82	14,82	14,82

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	-	63,52	62,54	62,54
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,32	4,91	7,52	6,68	6,68

Sumber: RKPD 2025, BPS Provinsi Banten

3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

Gambar 3.1
Perkembangan IPM Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten salah satunya terpresentasikan melalui capaian IPM. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten yang rilis pada No. 60/12/36/Th.XVIII, 2 Desember 2024, capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten Tahun 2024 sangat baik yaitu sebesar 76,35 poin, meningkat sebesar 0,77 poin dari tahun lalu. capaian kinerjanya jika dibandingkan dengan target IPM tahun 2025 yaitu 76,00-76,50, maka kinerja IPM telah tercapai. Jika dibandingkan capaian Nasional IPM Banten berada di atas nasional sebesar 1,33 poin, IPM nasional sendiri berada di angka sebesar 75,02.

Ketercapaian IPM Provinsi Banten di tahun 2024 termasuk pada klasifikasi “tinggi”, secara peringkat Banten menempati peringkat ke-7 dengan status IPM tertinggi dari 38 Provinsi. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa penduduk Banten dapat lebih meningkatkan akses terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Peningkatan IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Umur Harapan Hidup Banten pada tahun 2024 terus meningkat, pada tahun 2024 ditargetkan UHH sebesar 74,82 dan terealisasi 74,97 tahun meningkat 0,2 poin dibanding tahun sebelumnya. Capaian kinerja UHH pada tahun 2024 sudah melebihi target tercapai sebesar 100,20%. Posisi UHH Banten jika dibandingkan nasional sebesar 74,15 lebih baik 0,82 poin. Dengan demikian, setiap penduduk Banten yang lahir pada tahun 2024 mempunyai harapan untuk hidup sampai usia 74 tahun.

Harapan Lama Sekolah pada tahun 2024 telah mencapai 13,10 tahun. Realisasi ini naik sebesar 0,01 poin dibanding tahun sebelumnya. Target HLS pada dokumen perencanaan 2024 sebesar 13,93 dengan capaian kinerja HLS

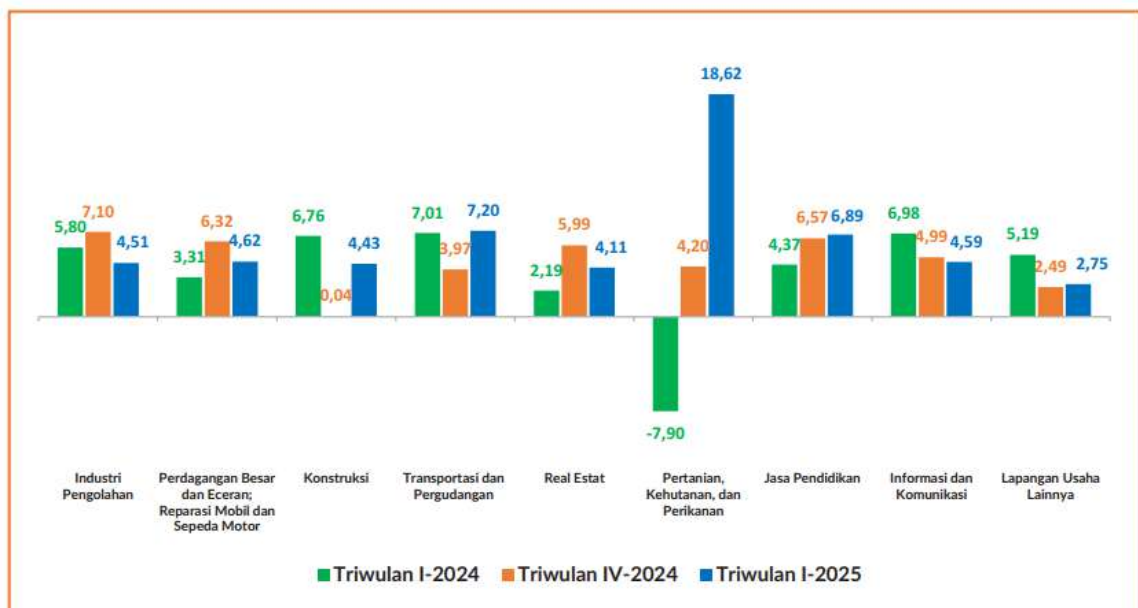
mencapai 94%. Dengan demikian bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2024, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester II diperguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA.

Rata-rata Lama Sekolah di Banten menunjukkan perkembangan positif, RLS Banten pada tahun 2024 telah mencapai 9,23 tahun meningkat 0,8 poin dari tahun sebelumnya. Capaian kinerja RLS pada tahun 2024 telah mencapai target 100 persen atau sesuai target dengan pertumbuhan yang selalu positif. Hal ini artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2024 telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III), Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten terus mengalami peningkatan. Bahkan, dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan kualitas pendidikannya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian IPM dengan kriteria tinggi ini didukung oleh berbagai faktor antara lain; 1) Penyediaan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai Rp. 2,7 triliun atau 23,14 persen dari APBD (ketentuan minimal 20 persen); 2) Penyediaan alokasi belanja kesehatan yang mencapai Rp1,16 triliun atau 12,60% dari APBD (ketentuan minimal 10%); 3) Akses dan mutu pendidikan dan yang semakin merata melalui penyediaan infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan. Pada tahun 2024 telah dijalankan penyelesaian pengembangan dan operasional RSUD Ciligrang, RSUD Labuan, RSUD Malingping, pengembangan RSUD Banten menjadi RS Pendidikan, pemenuhan pembiayaan kesehatan (JKN) dan pemenuhan SPM Kesehatan.

3.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

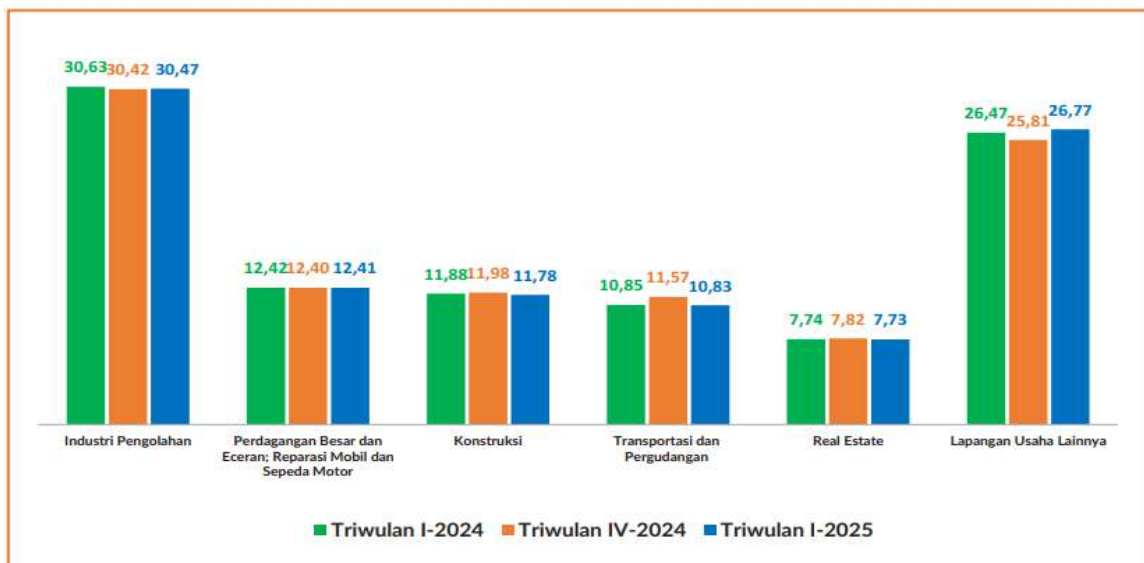
Pada Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Banten menargetkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,22-5,33 persen. Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Nomor No. 24/05/36/Th. XIX, 5 Mei 2025, Ekonomi Provinsi Banten triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 tumbuh sebesar 5,19 persen (y-on-y). LPE dibandingkan secara (q-to-q) tumbuh 1,01 %. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,62 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Komponen Total Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,42 persen. Untuk sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 17,11 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Komponen Total Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 23,99 persen.



Sumber : BPS Provinsi Banten

Gambar 3.2.
Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Lapangan Usaha TW I 2025

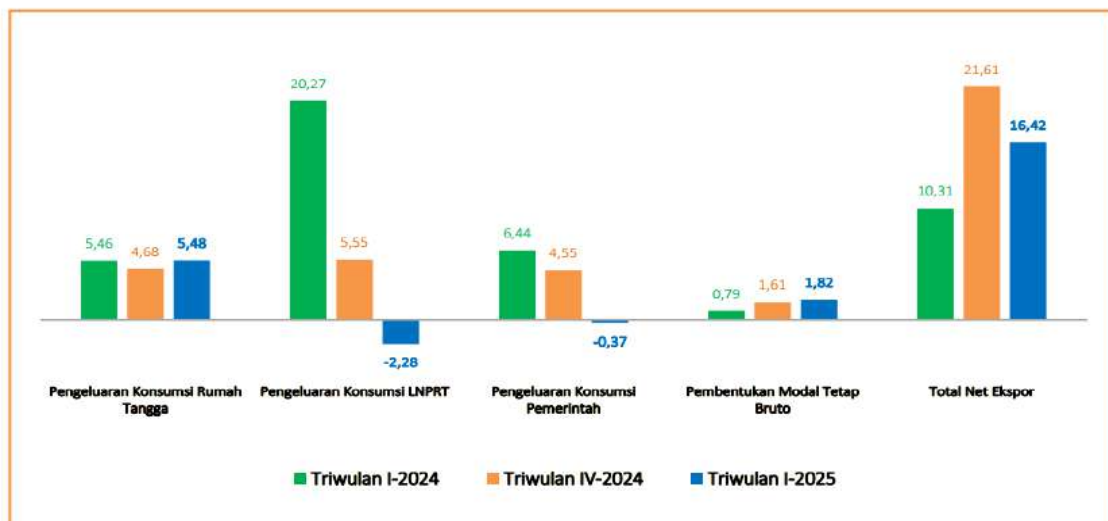
Struktur perekonomian Provinsi Banten menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 tidak mengalami perubahan. Perekonomian Banten didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 30,47 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,41 persen; Konstruksi sebesar 11,69 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,78 persen; serta transportasi sebesar 10,83 persen.



Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Gambar 3.4
Struktur PDRB Lapangan Usaha tahun 2024-2025

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Total Net Ekspor sebesar 16,42 persen. Kemudian diikuti oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,48 persen, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,82 persen. Sedangkan, komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPR) dan komponen Pengeluaran Konsumsi pemerintah mengalami pelambatan atau minus.



Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten

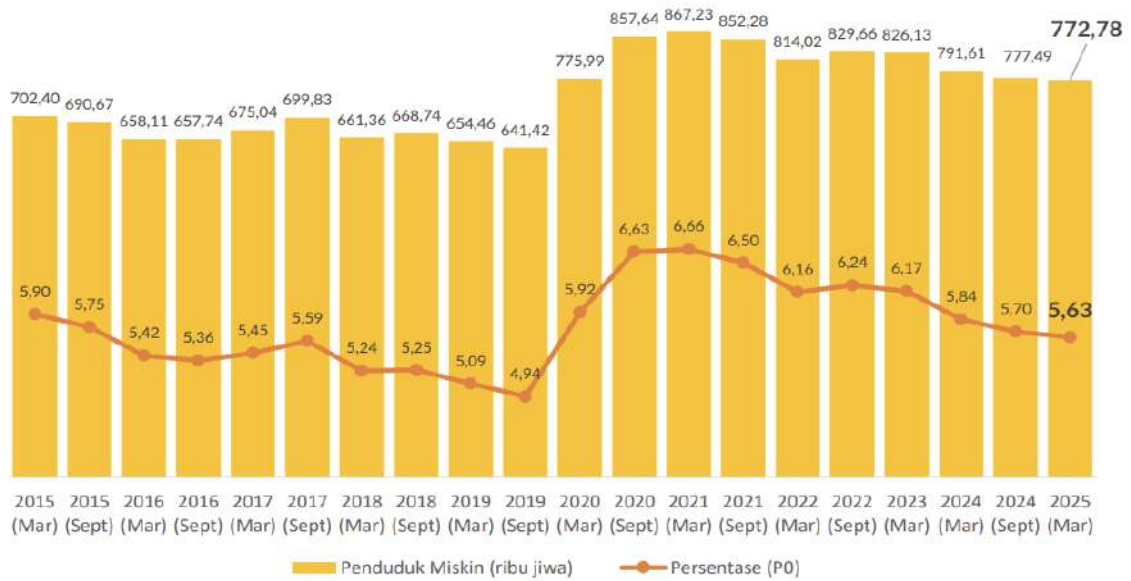
Gambar 3.5

Pertumbuhan Ekonomi Komponen Pengeluaran TW I 2025

Secara umum yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi di Banten adalah pengeluaran konsumsi Rumah Tangga dan Investasi. Di mana, nilai investasi meningkat saat ini didorong oleh investasi bangunan dan non bangunan dan penggerak utama masih tetap industri pengolahan.

3.1.3. Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten No. No. 35/07/36/Th. XIX, 25 Juli 2025 menunjukkan bahwa Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada Maret 2025 turun sebesar 5,63 persen, menurun 0,07 persen terhadap September 2024 dan turun 0,21 persen jika dibandingkan dengan Maret 2024. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 772.780 ribu orang, menurun 4.710 orang terhadap september 2024.



Sumber: BPS Banten 2025

Gambar 3.5
Persentase Penduduk Miskin 2015-2025

Hal lain yang perlu diperhatikan selain dari persentase penduduk miskin adalah Indeks kedalaman kemiskinan dan Indeks keparahan kemiskinan. Pada periode September 2024–Maret 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2025 sebesar 0,847 naik dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,799. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami peningkatan dari 0,154 menjadi 0,210.

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan. Pada Maret 2025, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 0,856, sedangkan di perdesaan lebih rendah, yaitu mencapai 0,806. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan

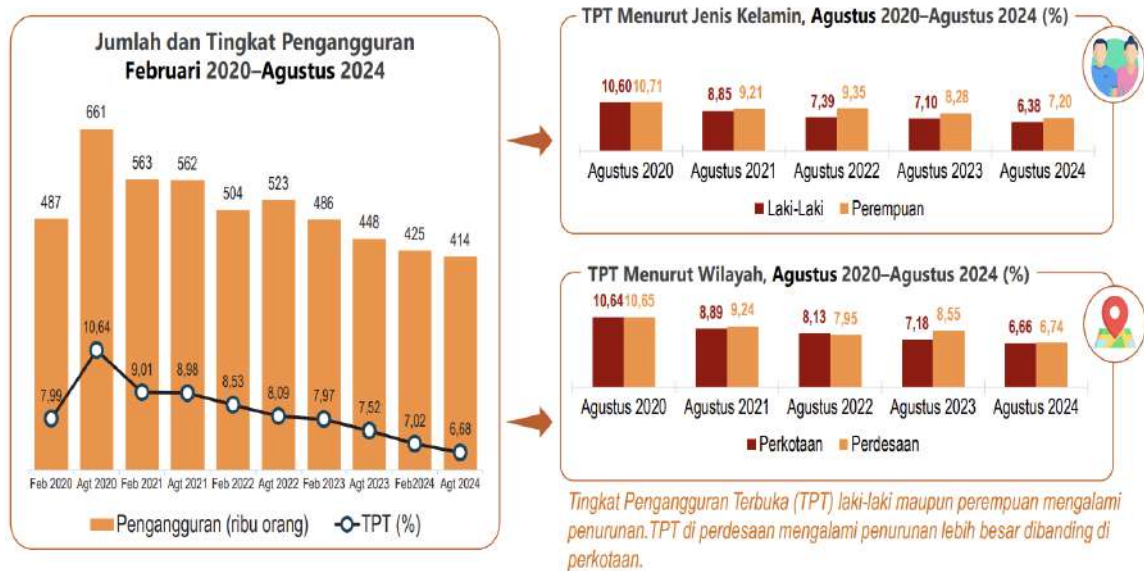
Kemiskinan(P2) di perkotaan adalah sebesar 0,218 sedangkan di perdesaan lebih rendah, yaitu mencapai 0,171.

Selain itu Pemerintah Provinsi Banten telah berupaya menurunkan kemiskinan dengan berbagai intervensi yaitu:

1. Adanya kebijakan berupa KEPMENKO PMK Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, selain itu terdapat Surat Edaran Gubernur Banten Nomor: 050/1609-Bapp/2023, perihal Percepatan Penangan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
2. Penguatan program dan anggaran dalam penanganan kemiskinan
3. Menginstruksikan kepada Kabupaten Kota se-Banten penggunaan data kemiskinan yang sama yaitu P3KE,
4. Tematik Program dan Kegiatan Pada OPD sesuai tagging nomenklatur SIPD. Kepmen nomor 900.1.15.5-1317,
5. Pemberian Akses dan Perlindungan bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan anak terlantar,
6. Pemberian akses dan mutu layanan kesehatan dasar
7. Pemberian bantuan pangan, pemenuhan gizi seimbang dan makanan sehat
8. Menjaga stabilitas harga pangan dan menjaga inflasi daerah

3.1.4. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada Tahun 2024 terjadi penurunan TPT dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Banten No. 55/11/36/Th.XVIII, 5 November 2024. TPT Provinsi Banten pada periode Agustus 2024 sebesar 6,68 persen, menurun 0,84 poin dari tahun sebelumnya yaitu 7,52 persen di Agustus 2023 hal ini menunjukkan kondisi yang baik artinya penangguran semakin menurun. Pada dokumen perencanaan di tahun 2024 TPT ditargetkan sebesar 7,02 persen yang artinya capaian melebihi target yaitu sebesar 104,84%. Namun kondisi TPT Banten tetap perlu diperhatikan karena jika dibandingkan nasional dengan TPT nasional yaitu sebesar 4,91 persen maka TPT kita masih jauh dibawah realisasi nasional.



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

Gambar 3.6
Tingkat pengangguran Terbuka tahun 2017-2024 Provinsi Banten

Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 9,39 juta orang, dengan jumlah Angkatan kerja sebanyak 6,21 juta orang dan bukan Angkatan

kerja sebanyak 3,18 juta orang dan sebanyak 414,75 ribu orang menganggur. Penurunan pengangguran ini dilihat dari proporsi penduduk di tahun 2024 ini meningkat terhadap pekerjaan pada kegiatan formal, utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai. Kecenderungan penduduk Banten dari sektor pekerjaan utama kerja sebanyak 51.60% bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dan sektor kedua adalah berusaha sendiri/wiraswasta sebanyak 22,20%. Perhatian kinerja kedepan masih terus perlu diperhatikan bahwa TPT tertinggi sebesar 11,58% pada jenjang pendidikan SMK, agar terus bersinergi dengan dunia usaha dalam rangka penyiapan skill dan kompetensi sesuai yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

Faktor Pendukung Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah :

1. Melakukan pengurangan pengangguran melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial
2. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan investasi
3. Memaksimalkan peningkatan skill angkatan kerja melalui BLKI
4. Penyaluran tenaga kerja
5. Peningkatan kualitas dan kapasitas BLKI serta peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja

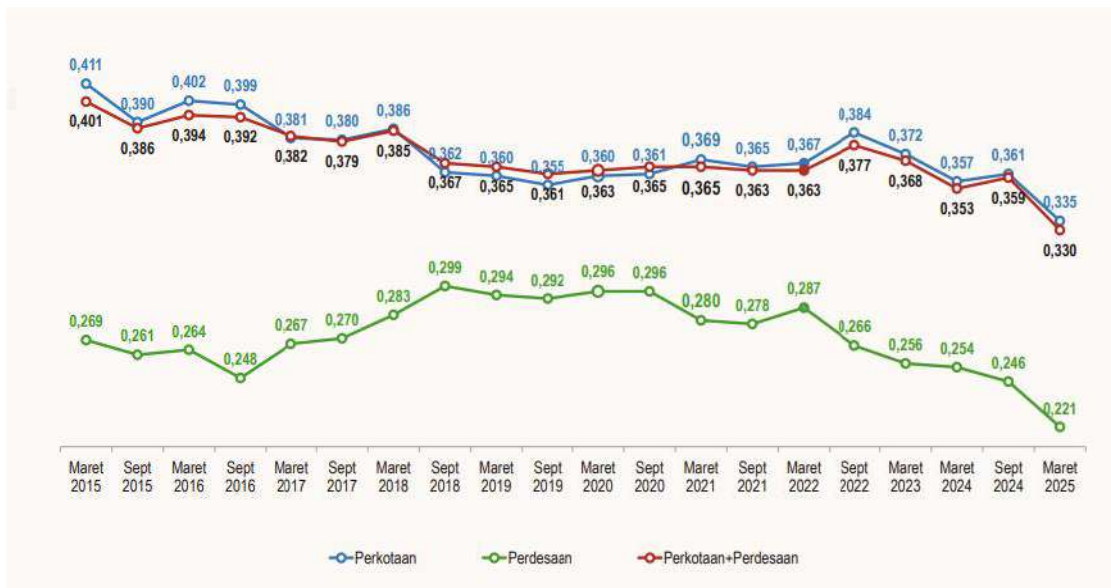
3.1.5. Indeks Gini

Salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (*people prosperity*) digunakan indikator ketimpangan pengeluaran. Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pemerataan

pengeluaran dan kesejahteraan antar individu dalam suatu wilayah tertentu (*income disparity*).

Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Banten No. No. 36/07/36/Th. XIX, 25 Juli 2025, bahwa Indeks Gini Provinsi Banten Periode Maret 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Banten yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,330. Angka ini menurun 0,029 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2024 yang sebesar 0,359 dan menurun 0,023 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,353. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,335; turun dibanding Gini Ratio September 2024 yang sebesar 0,361 dan Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,357. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,221; turun dibanding Gini Ratio September 2024 yang sebesar 0,246 dan Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,254.

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada Maret 2025, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 20,74 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan September 2024 yang sebesar 19,28 persen

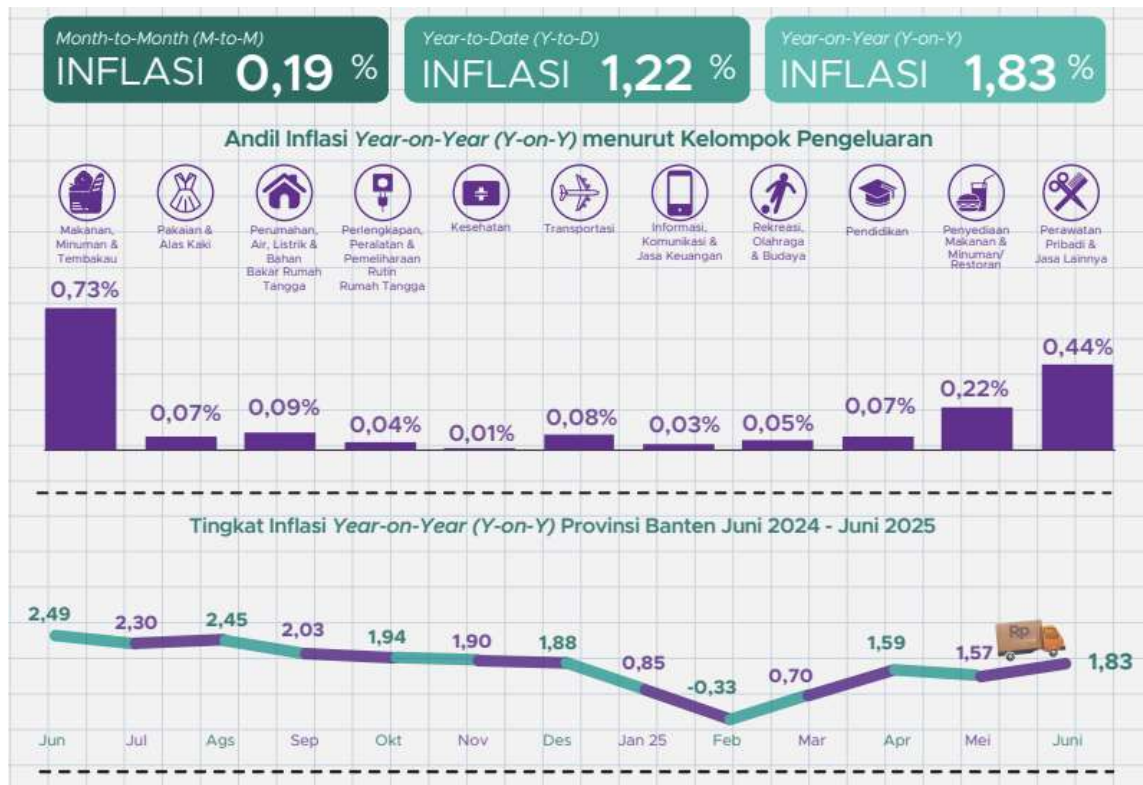


Sumber: BPS Provinsi Banten 2025

Gambar 3.6
Gini Ratio tahun 2015-2025 Provinsi Banten

3.1.6. Inflasi

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi harus terus dijaga agar tetap stabil karena kenaikan harga barang sehingga membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.



Sumber: BPS Provinsi Banten,

Gambar 3.8
Inflasi Provinsi Banten Tahun 2025

Berdasarkan rilis BPS dengan No. 31/07/36/Th. XIX, 1 Juli 2025 Inflasi di Provinsi Banten pada Juni 2025 sebesar 1,83 persen, Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Pandeglang sebesar 2,79 persen.

Inflasi y-on-y terjadi karena naiknya harga pada semua kelompok pengeluaranyaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,30 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,29 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,69 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,60 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,38 persen; kelompok transportasi sebesar 0,72 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,51 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya

sebesar 3,22 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,24persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,06persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,40 persen. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Banten bulan Juni 2025 sebesar 0,19 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,22 persen.

Secara umum inflasi Banten relatif terkendali, kondisi inflasi yang dapat terkendali tak lepas dari sinergisitas segenap *stakeholders* dan fokus kerja pemerintahan Provinsi Banten yang bersandarkan pada reformasi birokrasi berdampak.

3.2. Capaian Kinerja Utama Daerah Sampai Dengan Triwulan II 2025

Capaian Indikator Kinerja Utama daerah tahun 2025 Triwulan II terdiri atas 33 indikator berdasarkan dokumen RPD 2023-2026, adapun realisasi berdasarkan tabel dibawah dari 33 Indikator Pemerintah daerah dirinci dalam tabel dibawah ini;

Tabel.3.2
Realisasi Indikator Kinerja Utama Daerah Sampai Dengan Triwulan II 2025

TUJUAN / SASARAN		Indikator	Satuan	Kinerja 2025		
				Target	Realisasi s.d Tw II	Capaian
1			3	5	6	7
1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tingkat Kemiskinan	%	5,50	5,63	97,69
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,24	6,68	107,73
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	76,50	76,35	99,80
	Meningkatnya pelayanan sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial	%	7,77	9,60	123,55
	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	65,89	66,17	100,42
	Meningkatkan kualitas keluarga sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	66,76	66,20	99,16

TUJUAN / SASARAN		Indikator	Satuan	Kinerja 2025		
				Target	Realisasi s.d Tw II	Capaian
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,69	0,69	100,00
	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,12	13,10	92,78
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,40	9,23	98,19
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,69	74,97	106,05
		Prevalensi Stunting pada Balita	%	21,30	24,00	87,32
	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	93,63	93,31	99,66
	Terbentuknya karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	57,43	52,49	91,40
		Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Nilai	50,92	53,62	105,30
2	Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,22	5,19	99,42
		Indeks Williamson	Nilai	0,62	0,77	75,61
		Indeks Gini	Nilai	0,34	0,330	103
	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB)	%	33,40	2,63	7,87
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sektor industri	%	5,32	4,51	84,77
		LPE Sektor Perdagangan	%	3,64	4,62	126,9
	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	4,57	10,22	223,63
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan	%	0,92	4,20	456
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Nilai	tinggi	Sangat tinggi	100,00
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Pertahun yang Disesuaikan	Rupiah	12.438.000,00	13.097.000,00	105,30
3	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	43,56	14,82	34,02
		Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	142,49	128,64	109,72
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	63,09	62,54	99,13

TUJUAN / SASARAN		Indikator	Satuan	Kinerja 2025		
				Target	Realisasi s.d Tw II	Capaian
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	79,00	87,49	110,74
	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Persepsi Anti-Korupsi (IPAK)	Nilai	3,00	2,76	92,00
		Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	Nilai	3,76	3,74	99,47
		Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi	Nilai	76,56	69,24	90,44
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	86,00	77,93	90,62
	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten	Nilai	tangguh	tangguh	100,00

Sumber: Data BPS dan Olahan Bappeda

3.3. Rekapitulasi Capaian Kinerja Urusan Triwulan II Tahun 2025

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 sebanyak 92 indikator yang menjadi Indikator urusan dan tersebar kinerjanya di berbagai Perangkat daerah, adapun rincian kinerja terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Rekapitulasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET 2025	REALISASI S.D TW 2 2025	CAPAIAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
BIDANG PENDIDIKAN (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)					
Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persen	100	100	100	100,00
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun	Persen	92,5	73,74	92,5	125,44
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas dalam Pendidikan Khusus	Persen	61,32	65	61,32	94,34
Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lulusan SMK	Persen	11,58	11,7	11,58	98,97
BIDANG KESEHATAN (Dinas Kesehatan)					
Cakupan Layanan Intervensi Spesifik Dan Intervensi Sensitif Dalam Penurunan Stunting	Persen	75	67	75	111,94
Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	Persen	92,31	100	100	100
Rasio Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	71,7	79	71,7	90,76
Rasio Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	4,5	4,5	4,5	100
Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	Persen	100	100	100	100
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Dinas Perumahan dan Permukiman)					
Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	99,32	60	99,32	165,53
Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau	Persen	77	84,68	77	90,93
Luas Permukiman Kumuh	Ha	130	89,62	0	0,00
BIDANG SOSIAL (Dinas Sosial)					

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET 2025	REALISASI S.D TW 2 2025	CAPAIAN
Persentase Penanganan Jumlah PMKS	Persen	7,34	5,47	7,34	134,19
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)					
Persentase Cakupan pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi	Persen	68,54	100	68,54	68,54
Persentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL regional dan Pengelolaan Sampah Regional	Persen	3,38	77,49	3,38	4,36
Persentase Kapasitas Tampung Sumber Daya Air	Persen	6,15	8,28	6,15	74,28
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	88,96	100	88,96	88,96
Persentase Luas Layanan Irigasi	Persen	62,76	72,36	62,76	86,73
Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi	Persen	44,87	52,09	44,87	86,14
Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan	Persen	95,18	100	95,18	95,18
BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Satpol PP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah)					
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,61	0,64	0,61	95,31
Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	Persen	100	100	100	100,00
Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	Persen	100	100	100	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)					
a. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	69,84	74,26	69,84	94,05
b. Indeks Kualitas Air (IKA)		54,32	54,48	54,32	99,71
c. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		85,46	82,97	85,46	103,00

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET 2025	REALISASI S.D TW 2 2025	CAPAIAN
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKKB)					
Angka Kelahiran Tota TFR (Total Fertility Rate) WUS usia 15-49 tahun	Nilai	1,98	2,24	1,8	80,36
BIDANG KEBUDAYAAN (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)					
Indeks kepuasan pengunjung museum daerah dan taman budaya dari total keseluruhan pengunjung museum dan taman budaya	Nilai	3,97	3,27	3,97	121,41
Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan	Persen	2,1	8,3	2,1	25,30
BIDANG PENANAMAN MODAL (DPMPTSP)					
Capaian realisasi penanaman modal (PMDN + PMA)	Triliyun Rupiah	105,6	97,790	8,25	8,4
Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan	Nilai	92,31	89,80	92,31	102,80
BIDANG KEARSIPAN (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)					
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	75,91	BB	75,91	94,8875
BIDANG PERSANDIAN (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)					
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	440	456	440	96,49
BIDANG PANGAN (Dinas Ketahanan Pangan)					
Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Nilai	79,25	79	79,25	100,32
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Dinas Komunikasi dan Informatika)					
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	96,87	92,1	96,87	105,18
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,47	3,45	3,47	100,58
BIDANG TENAGA KERJA (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)					
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Nilai	64,76	74,25	64,76	87,22
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (Dinas Pemuda dan Olahraga)					

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET 2025	REALISASI S.D TW 2 2025	CAPAIAN
Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Nilai	0,53	0,55	0,53	96,36
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	53,33	53	53,33	100,62
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3AKKB)					
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	69,87	71,26	69,87	98,05
Indek Perlindungan Anak	Nilai	66,18	78,35	66,18	84,47
BIDANG PERPUSTAKAAN (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)					
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	13,28	15	13,28	88,53
Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	70,66	72,3	70,66	97,73
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DP3AKKB)					
Persentase Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	Persen	100	100	100	100
BIDANG STATISTIK (Dinas Kominfo)					
Persentase Ketersediaan Data Base Statistik Sektoral	Persen	100	100	100	100
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH (Dinas Koperasi dan UKM)					
Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	28	30	28	93,33
Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai klister	Persen	5	5	5	100,00
BIDANG PERHUBUNGAN (Dinas Perhubungan)					
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Persen	24,72	19,30	24,72	128,08
Rasio Konektivitas Provinsi	Persen	0,7	0,74	0,7	94,59
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	86,17	84	86,17	102,58
BIDANG PERTANAHAN (Dinas Perumahan dan Permukiman)					
Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan	Persen	100	100	100	100
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa)					

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET 2025	REALISASI S.D TW 2 2025	CAPAIAN
Persentase Penurunan Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Persen	4,77	4,77	4,77	100,00
Persentas Desa Kategori Maju	Persen	30,53	15,11	30,53	202,05
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Dinas ESDM)					
Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral	Persen	76,2	82,94	76,2	91,87
Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	Persen	10,34	40	10,34	25,85
Rasio Elektrifikasi	Persen	99,99	99,99	99,99	100,00
BIDANG KEHUTANAN (DLHK)					
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	43,03	39,08	43,03	110,11
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN (Dinas Kelautan dan Perikanan)					
Peningkatan Nilai Tukar Nelayan	POIN	98,47	106	98,47	92,90
Peningkatan Produksi Perikanan	Ton	193819,67	246778	16.806	6,8
BIDANG PARIWISATA (Dinas Pariwisata)					
Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	Orang	19.410.605	25.664.013	7.138.861	27,8
BIDANG PERDAGANGAN (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)					
Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	12,38	13,58	12,41	91,38
BIDANG PERINDUSTRIAN					
Persentase Kontribusi PDRB sektor industri terhadap PDB sektor Industri	Persen	30,35	6,45	30,47	472
BIDANG PERTANIAN (Dinas Pertanian)					
Produksi Peternakan	Ton	244.503	256.390		0,00
Produksi Hortikultura	Ton	47.254	31.091		0,00
Produksi Tanaman Pangan	Ton	2.362.738	2.261.901		0,00
Produksi Perkebunan	Ton	57.854	53.472		0,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
SEKRETARIAT DAERAH					

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET 2025	REALISASI S.D TW 2 2025	CAPAIAN
Indeks Kelembagaan	Nilai	84,2	84,4	84,2	99,76
Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	65	76	65	85,53
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	89,23	92,95	89,23	96,00
Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	91,16	91,18	91,16	99,98
Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	10,71	11,6	10,71	92,33
Persentase realisasi rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	Persen	133	100	133	133,00
Persentase realisasi rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di implementasikan	Persen	71,43	100	71,43	71,43
Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Persen	100	100	100	100,00
Persentase realisasi pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	100	100	100	100,00
Persentase realisasi pelayanan SETDA	Persen	100	100	100	100,00
Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor/ Nilai	3,46	4,34	3,46	79,72
SEKRETARIAT DPRD					
Tingkat Dukungan dan Fasilitasi DPRD	Persen	91,96	100	91,96	91,96
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
INSPEKTORAT DAERAH					
Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	1	1	1	100,00
Maturitas SPIP	Nilai	3,4	3,437	3,4	98,91
Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal	Nilai	15,37	15,96	15,37	96,30
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
KEUANGAN					
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100
Kemandirian Keuangan	Persen	72,76	65,14	72,76	111,70
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
Indeks Inovasi Daerah	Level	Inovatif (90)	Sangat Inovatif	Inovatif (90)	90

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET 2025	REALISASI S.D TW 2 2025	CAPAIAN
KEPEGAWAIAN					
Indeks Merit Sistem	Nilai	330,5	343,5	330,5	96,215
Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	52,81	52,07	52,81	101,421
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
Indeks Profesional Aparatur Dimensi Kompetensi ASN	Persen	31,24	12,23	31,24	255,44
PERENCANAAN					
Nilai komponen Perencanaan dan Pengukuran pada Penilaian SAKIP Provinsi	Kategori/ Nilai	43,35	49	43,35	88,47
PENGHUBUNG					
Capaian Pelayanan Penghubung	Indeks	4	3	3	100,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
Indeks Demokrasi Indonesia Banten	Nilai	75,83	79,85	75,83	94,97
Persentase konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang ditangani	Persen	91,67	100	91,67	91,67

Sumber: Data olahan Bappeda 2025

Sebanyak 91 indikator yang tersebar kinerjanya di berbagai Perangkat Daerah, dari 91 indikator Terdapat 37 indikator yang telah melebihi target kinerja 2025 dan sisanya 54 indikator berprogress untuk mencapai target 2025.

Selain melaksanakan evaluasi RPD , kinerja untuk RPJMD 2025-2029 juga dilakukan pengendalian dan evaluasi sampai dengan baseline 2024,berikut indikator IKU 2025-2029:

Tabel 3.4

Capaian kinerja IKU RPJMD 2025-2029

	Indikator Tujuan/sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	87,49	89,5	90,99
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,79	5,2	6,03
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,84	5,20	5,03
4	Rasio Gini	Nilai	0,353	0,344-0,365	0,337-0,365
5	Indeks Modal Manusia	Nilai		0,56	0,570
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,68	6,87-7,24	6,75-6,89
7	Indeks Williamson	Nilai	0,770	0,76	0,747
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	62,54	66,92	67,17
1	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,73	3,84	3,95
2	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	60,00	66,77	66,77
3	Indeks Sistem Merit	Nilai	330,50	331	331
4	Nilai SAKP	Nilai	69,24	70	72
5	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	77,93	78	79
6	Indeks Pemerintah Digital	Nilai	3,47	3,5	3,60
7	Indeks Integritas Nasional	Nilai	71,21	72	74,00
8	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	45,57	47,82	51,00
9	Nilai PDRB ADHK	Milyar Rupiah	531.735.247,97	531.735,25	593.107,17
10	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto	Milyar Rupiah	165.000,00	176.200,01	197.845,73
11	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	Persen	73,22	67,30	67,49
12	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai	75,83	80,68	81,14
13	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Nilai	0,80	0,75	0,70
14	Persentase Kemiskinan Wilayah Perdesaan	Persen	6,20	5,99	5,78

	Indikator Tujuan/sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
15	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian	Unit	2,78	3	5
16	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,23	9,66-9,69	9,79-9,8
17	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,10	13,21-13,24	13,27-13,30
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	53,57	54,75	55,81
19	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	61,88	62,1	72,96
20	Usia Harapan Hidup	Nilai	74,97	75,2	75,47
21	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	24,00	21,3	20,18
22	iBangga	Indeks	62,60	62,6	66
23	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK	Persen	65,82	66,41	66,66
24	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	2,96	3	3,20
25	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	65,25	67,08	68,98
26	Rasio Konektivitas	Nilai	68,30	70	70
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	62,54	66,92	67,17
28	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Nilai	128,64	79	79,75
29	Indeks Risiko Bencana	Indeks	79,25	105,17	105,10-104,89
30	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	n/a	43,56	46,05

Tabel 3.5

Capaian kinerja Perangkat Daerah Pada Indikator RPJMD 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2024
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa		Indeks Desa	0,69
	Meningkatnya Pembangunan Wilayah Perdesaan	Persentase Desa Mandiri	8
Meningkatkan Ketangguhan Daerah Untuk Mewujudkan Resiliensi Berkelanjutan Dalam Rangka Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat		Indeks Risiko Bencana	128,64
	Meningkatnya Resiliensi dan Ketahanan Terhadap Bencana	Peningkatan Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten	-2,58
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	2,96
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Capaian Infrastruktur Keciptakarya	14,66
		Persentase Capaian Infrastruktur Sumber Daya Air	19,7
		Persentase Pembinaan Pelaku Jasa Konstruksi	9,91
		Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Dan Jembatan	95,18
		Persentase Tingkat Konektivitas Infrastruktur Jalan	74,47
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang	24,96
Meningkatnya Intelektual, Karakter Anak Usia Sekolah		Harapan Lama Sekolah	13,1
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	53,57
		Rata-Rata Lama Sekolah	9,23
	Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya	IPK Dimensi Warisan Budaya	50,98

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2024
	Meningkatnya Pelestarian Tradisi Kearifan Daerah	IPK Dimensi ekspresi budaya	27,84
	Terpenuhinya Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Indeks SPM Pendidikan	70,18
Meningkatnya Keberfungsian Sosial, Individu, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat		Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,8
	Meningkatnya Kemandirian Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	7,34
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah		Rasio PAD Terhadap PDRB	1,03
	Meningkatnya Pendapatan Daerah Bersumber dari Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	8,41701E+12
		Realisasi Retribusi Daerah	2,3063E+11
Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan		Nilai PDRB ADHK	5,31735E+14
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	96,51
		Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	97,1
	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan	Nilai PDRB ADHK	2372,88
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	96,8
		NILAI TUKAR PEMBUDIDAYA IKAN/NTPi	96,8
Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	91,98
	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Sesuai Norma dan Hukum Ketenagakerjaan yang Berlaku	Tingkat Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	53,93
	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Terlatih di Pasar Kerja dalam Negeri dan Luar Negeri	Persentase Pencari Kerja yang Diberdayakan dan Ditempatkan	76,22
Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas serta		Indeks Pelayanan Publik	3,73

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2024
Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien			
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	62,57
	Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota	Persentase Kinerja Administrasi Kependudukan	0
	Meningkatnya pembangunan berbasis gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,453
	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total TFR (Total Fertility Rate) WUS usia 15-49 tahun	1,98
	Meningkatnya Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak/IPA	71,77
Meningkatnya Ketahanan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	79
	Meningkatnya Ketersediaan Dan Cadangan Pangan Yang Berkualitas Dan Terjangkau	Indeks Ketahanan Daerah	79,25
Meningkatnya Konektivitas Transportasi		Rasio konektivitas	68,3
	Persentase Layanan Transportasi (Persen)	Persentase Layanan Transportasi	45
	Rasio Konektivitas	Rasio konektivitas	68,3
Meningkatnya Kontribusi UMKM dalam Perekonomian		Proporsi Jumlah Usaha Kecil yang naik skala	0
	Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB ADBH	0
	Meningkatnya Pemberdayaan UMKM	Rasio Kewirausahaan	0
Meningkatnya Kualitas Taraf Kesehatan Masyarakat		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	24
		Usia Harapan Hidup (UHH)	74,97
	Meningkatnya 4 layanan unggulan kesehatan dengan sistem rujukan berbasis kompetensi	Persentase Layanan Unggulan Kesehatan dan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi yang Tercapai	0
	Meningkatnya Cakupan 9 Layanan Intervensi Stunting	Persentase Cakupan Intervensi Stunting	0
	Meningkatnya Penemuan Kasus Tuberkulosis	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2024
	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI)	0
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Industri dan Perdagangan		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	4,98
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	4,33
	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	30,35
	Meningkatnya daya saing Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	13,06
Meningkatnya Lingkungan Kondusif dan Demokratis		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	55,29
	Meningkatnya Lingkungan Kondusif dan Demokratis	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	55,29
Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Tata Kelola Arsip		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	75,91
		Indeks pembangunan literasi masyarakat	61,9
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Yang Berdampak pada Capaian Pembangunan		
	Meningkatnya pengelolaan Perpustakaan untuk Mewujudkan Kegemaran Membaca Masyarakat yang Kuat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	70,66
	Meningkatnya Penggunaan Arsip Berbasis Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	93,46
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0,3
		Indeks Pembangunan Pemuda	61,9
	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Ketenagakerjaan Layak	62,61
		Persentase Partisipasi dan Kepemimpinan	37,09
	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	Persentase atlet yang memperoleh medali tingkat regional dan nasional	48,24

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2024
		Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	0,19
Meningkatnya Pertumbuhan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	0
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif	0
	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai PDRB Ekonomi Kreatif	66920
		Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	14221
Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring dan lincah organisasi serta perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif		Indeks Inovasi Daerah	45,57
		Nilai SAKP	42,15
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Daerah	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	19,44
		Nilai Komponen Perencanaan Kinerja	23,71
	Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Riset dan Inovasi yang termanfaatkan	100
Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring dan lincah organisasi, serta perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif		Indeks Integritas Nasional	71,21
		Nilai SAKIP	70
	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja	Nilai Komponen Evaluasi Kinerja	15,37
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas SPIP	3,403

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2024
	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas	Jumlah Unit Kerja Lolos WBK/WBBM (Jumlah)	1
Terciptanya Aparatur Negara yang Kompeten dan Berkinerja Tinggi berdasarkan Sistem Merit		Indeks Merit Sistem	330,5
	Meningkatnya Kompetensi Aparatur	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	0
Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan serta Terciptanya Keadilan dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	100
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	64,94
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	55,55
	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana	100
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan	100
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan/atau Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100
Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif		Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto	165
	Meningkatnya Iklim Investasi	Nilai Realisasi Penanaman Modal	105,6
	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,4

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2024
Terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif		Indeks Pelayanan Publik	3,73
Terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	3,5
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	3,2
Terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	Meningkatnya Layanan Penghubung	Persentase Lembaga yang Dihubungkan Dengan Pemerintah Daerah	0
Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif Serta Terbangunnya Kapabilitas Kelembagaan Berkinerja Tinggi yang Berbasis Jejaring dan Lincuh Organisasi Melalui Perilaku Birokrasi yang Beretika dan Inovatif		Indeks Integritas Nasional	71,21
		Indeks Kualitas Kebijakan	60
		Indeks Pelayanan Publik.	3,73
		Nilai SAKIP	69,24
	Meningkatnya Budaya Kerja ASN	Indeks ASN Berakhlak	75,8
	Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi	Indeks Reformasi Hukum	99,4
	Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Diimplementasikan	Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province	6
	Meningkatnya Kepatuhan Implementasi Standar Pelayanan Publik yang berkelanjutan	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	91,16
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan	100
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan	100
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,45

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2024
	Meningkatnya Pelaporan Kinerja yang Informatif	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	10,72
	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Umum dan Pimpinan	Indeks Kepuasan Stakeholder Pelayanan Umum dan Pimpinan	0
	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah yang Prima	Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah (SKM Biro Umum dan Perlengkapan)	3,2
	Meningkatnya Pemanfaatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan	100
	Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	89,23
Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat Yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, Dan HAM		Indeks Demokrasi Indonesia	75,83
	Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Bermasyarakat Berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI	Indeks Harmoni Indonesia	0
Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat		Nilai PDRB Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2,67034
		Nilai Tukar Petani (NTP)	109,14
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	109,14
	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, kelautan dan perikanan	Nilai PDRB Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2,67034
Terwujudnya ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan		Konsumsi Listrik per Kapita	2204,46
		Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	0
	Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi	0
	Meningkatnya Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan	Persentase Pelayanan Kegeologian	29,96
	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah	Rasio Elektrifikasi	99,99
	Meningkatnya Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	8,36

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2024
	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	0
Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup, kelestarian hutan dan pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	62,54
		Persentase Penurunan Emisi GRK	8,93
	Meningkatnya kepatuhan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	87,49
	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	54,32
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	84,46
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	43,03
		Indeks Kualitas Udara	69,84
	Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Forestry And Other Land Uses (Folu)	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	33,33
	Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	9,3
Terwujudnya Manajemen Kepegawaian Berdasarkan Meritokrasi		Indeks Merit Sistem	330,5
	Mewujudkan ASN yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Indeks Profesionalitas ASN	42,5
Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang Tertib, Taat Peraturan Perundang-Undangan, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	77,93
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
Terwujudnya Transformasi Digital		Indeks Pemerintahan Digital	3,47
	Meningkatnya akselerasi transformasi pemerintah berbasis digital di Provinsi Banten	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	64,72
	Meningkatnya Keamanan Informasi Daerah	Indeks Pemerintahan Digital (Aspek Keamanan Siber)	-2

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2024
	Meningkatnya pengelolaan serta pemanfaatan data dan informasi	Indeks Satu Data Indonesia	64,95

3.4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Adapun capaian pelaksanaan kinerja berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Triwulan I Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 3.6

Realisasi Capaian Kinerja Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan II TA. 2025

Berdasarkan Perangkat Daerah

SKPD/Sub Unit	Target Tahunan			Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Predikat Kinerja Organisasi
	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
3	4	5	6	15	16	17	18	19	20
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100,00	9.073,85	3.722.682.210.310,00	47,54	8.335,70	1.836.237.590.797,2	47,54	49,33	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS KESEHATAN	100,00	1.576,60	1.146.543.434.865,00	43,04	619,20	375.672.992.127,51	43,04	32,77	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS KESEHATAN (UNIT INDUK)	100,00	340,00	563.866.749.634,00	49,68	374,00	209.180.962.593,06	49,68	37,10	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD RSUD BANTEN	100,00	3,25	304.978.225.888,00	34,98	6,50	114.192.442.517,00	34,98	37,44	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD RSUD MALINGPING	100,00	9,25	101.878.491.911,00	52,58	18,50	41.816.314.779,00	52,58	41,05	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PELATIHAN KESEHATAN	100,00	924,00	6.928.988.384,00	13,39	36,00	363.018.328,00	13,39	5,24	KURANG
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	100,00	119,00	18.000.000.000,00	60,44	131,00	3.653.711.267,00	60,44	20,30	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD RSUD LABUAN	100,00	77,10	74.530.790.970,00	28,28	14,95	1.997.717.700,45	28,28	2,68	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD RSUD CILOGRANG	100,00	104,00	76.360.188.078,00	26,48	38,25	4.468.824.943,00	26,48	5,85	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100,00	1.322,76	1.112.162.998.000,00	31,35	15.502.001,71	164.995.329.205,00	31,35	14,84	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100,00	449,00	521.484.773.709,00	6,27	356,00	12.846.796.892,00	6,27	2,46	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	416,00	41.405.345.380,00	50,46	211,00	32.229.189.012,00	50,46	77,84	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100,00	17.185,00	33.829.299.000,00	47,67	1.898,00	7.363.051.474,00	47,67	21,77	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS SOSIAL	100,00	23.398,25	80.372.569.000,00	34,19	4.292,25	16.682.722.526,00	34,19	20,76	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	100,00	2.840,25	104.986.367.000,00	61,31	3.608,78	34.021.268.079,31	61,31	32,41	ISTIMEWA / SANGAT BAIK

SKPD/Sub Unit	Target Tahunan			Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Predikat Kinerja Organisasi
	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
3	4	5	6	15	16	17	18	19	20
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	100,00	7.064,00	48.184.372.000,00	56,11	7.658,00	12.059.329.020,00	56,11	25,03	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS KETAHANAN PANGAN	100,00	156,00	29.880.640.000,00	50,67	178,00	9.093.862.556,00	50,67	30,43	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	100,00	35.748,19	77.234.605.000,00	42,90	652,69	26.155.217.248,40	42,90	33,86	BAIK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	100,00	1.036,00	39.036.803.200,00	41,17	1.182,00	7.724.310.376,00	41,17	19,79	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS PERHUBUNGAN	100,00	474,00	93.043.250.000,00	58,41	532,00	18.270.137.535,00	58,41	19,64	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	100,00	483,09	55.865.834.000,00	52,76	1.819,29	18.422.670.775,00	52,76	32,98	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	100,00	6.035,00	40.778.140.560,00	39,45	3.595,00	10.086.835.749,00	39,45	24,74	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	100,00	513,00	35.704.200.000,00	49,63	851,00	9.346.207.684,35	49,63	26,18	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	100,00	943,50	78.900.374.000,00	56,05	1.105,00	19.965.154.135,00	56,05	25,30	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	100,00	42.468,31	34.165.733.000,00	47,25	56.117,62	10.526.470.853,00	47,25	30,81	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	680,19	65.936.300.000,00	39,20	569,47	21.326.668.428,94	39,20	32,34	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS PARIWISATA	100,00	352,00	48.085.573.000,00	36,04	452,00	10.789.896.508,00	36,04	22,44	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS PERTANIAN	100,00	583,16	118.154.560.000,00	35,19	648,59	36.475.338.905,00	35,19	30,87	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	100,00	88,00	54.076.195.000,00	19,58	126,00	10.801.826.090,00	19,58	19,98	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	100,00	577,51	53.007.860.000,00	45,96	609,50	17.165.617.823,00	45,96	32,38	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
SEKRETARIAT DAERAH	100,00	748,75	253.786.078.000,00	60,03	799,27	98.081.787.478,56	60,03	38,65	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
SEKRETARIAT DPRD	100,00	16.434,00	767.504.843.793,00	52,39	32.541,00	256.527.615.898,00	52,39	33,42	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100,00	163,00	55.727.070.000,00	57,61	317,97	22.346.618.731,00	57,61	40,10	ISTIMEWA / SANGAT BAIK

SKPD/Sub Unit	Target Tahunan			Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Predikat Kinerja Organisasi
	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
3	4	5	6	15	16	17	18	19	20
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	100,00	60,00	2.355.176.326.480,00	60,25	103,00	1.339.237.790.049,0	60,25	56,86	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
BADAN PENDAPATAN DAERAH	99,96	4.093,00	305.603.352.600,00	53,06	7.229,00	214.936.488.040,00	53,08	70,33	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	100,00	740,29	252.774.875.000,00	8,44	739,75	14.588.426.779,00	8,44	5,77	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	100,00	1.273,00	62.878.054.000,00	38,19	92.322.125,00	14.094.297.533,00	38,19	22,42	BAIK
BADAN PENGHUBUNG	100,00	42,00	10.273.870.000,00	50,24	81,00	4.168.079.716,00	50,24	40,57	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
INSPEKTORAT	100,00	226,00	67.915.635.000,00	44,39	409,00	29.058.148.829,00	44,39	42,79	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100,00	1.470,50	74.575.449.600,00	78,30	1.581,20	51.540.272.090,00	78,30	69,11	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
	100,00	1.019.538,64	11.841.736.991.497,00	46,18	107.963.344,99	4.762.838.008.943,32	46,19	40,22	

BAB IV

ANALISIS, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

4.1. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah TW II 2025

Berdasarkan pada bab III indikator kinerja daerah menunjukkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama daerah tahun 2025 terdiri atas 33 indikator berdasarkan dokumen RPD 2023-2026 dan jika berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 ada 30 indikator.

adapun capaian Indikator Makro yang berprogress adalah LPE, Tingkat Kemiskinan dan LPE, dan 2 indikator telah tercapai yaitu Gini Ratio dan TPT. Dari 33 indikator Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang pencapaian indikator kinerja utama terdapat 14 indikator yang capaian kinerjanya telah melebihi dari target kerja 2025, dan sisanya 19 indikator masih belum tercapai atau berprogress mencapai target tahun 2025.

Beberapa hal yang bisa di analisis dari proses pencapaian target di tahun 2025 ini, tujuan/sasaran daerah perlu penguatan adalah capaian makro daerah terutama kinerja perekonomian dan kemiskinan yang merupakan prioritas nasional dan capaian yang berhubungan dengan pencapaian misi tata Kelola pemerintahan terutama nilai SAKIP. Hal ini perlu dikuatkan dengan komitmen pimpinan dan fokus pada indikator yang progress pencapaiannya masih belum mendekati target 2025.

4.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah

A. Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi kinerja yang tersedia di Bab III, menunjukkan bahwa dari total Kinerja Urusan Tahun 2025 sebanyak 91 indikator yang tersebar kinerjanya di berbagai Perangkat Daerah, dari 91 indikator Terdapat 37 indikator yang telah melebihi target kinerja 2025 dan sisanya 54 indikator berprogress untuk mencapai target 2025. Adapun hal-hal yang perlu di perkuat dalam rangka mencapai target kinerja 2025 adalah belanja yang mendukung prioritas dan target PD perlu dikuatkan dan di lakukan inovasi sehingga capaian kinerjanya bisa mencapai target. PD berfokus pada kinerja yang mendukung capaian kinerja utama dengan memperhatikan penghitungan kinerja sesuai dengan penghitungan DO (Definisi Operasional). Komitmen pimpinan juga perlu diperkuat dalam rangka pengendalian kinerja PD dan memperkuat strategi serta rencana aksi kinerja untuk mencapai target kinerja pada 2025, dari hasil rangkuman kinerja selama Triwulan II, terdapat perangkat daerah yang perlu percepatan kinerja yaitu Dinas Perumahan rakyat dan permukiman, Dinas Energi Sumber daya mineral dan Badan Kepegawaian Daerah, secara rinci terlampir:

Tabel 4.1

Rangkuman Kinerja Perangkat Daerah s.d Tw II

Urusan Perangkat Daerah	Target Tahunan	Realisasi s.d TW II	Keterangan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100,00	47,54	
DINAS KESEHATAN	100,00	43,04	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100,00	31,35	
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100,00	6,27	Perlu Percepatan Kinerja
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	50,46	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100,00	47,67	
DINAS SOSIAL	100,00	34,19	
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	100,00	61,31	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	100,00	56,11	
DINAS KETAHANAN PANGAN	100,00	50,67	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	100,00	42,90	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	100,00	41,17	
DINAS PERHUBUNGAN	100,00	58,41	
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	100,00	52,76	
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	100,00	39,45	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	100,00	49,63	
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	100,00	56,05	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	100,00	47,25	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	39,20	
DINAS PARIWISATA	100,00	36,04	
DINAS PERTANIAN	100,00	35,19	
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	100,00	19,58	Perlu Percepatan Kinerja
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	100,00	45,96	
SEKRETARIAT DAERAH	100,00	60,03	
SEKRETARIAT DPRD	100,00	52,39	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100,00	57,61	
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	100,00	60,25	
BADAN PENDAPATAN DAERAH	99,96	53,06	
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	100,00	8,44	Perlu Percepatan Kinerja
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	100,00	38,19	
BADAN PENGHUBUNG	100,00	50,24	

Urusan Perangkat Daerah	Target Tahunan	Realisasi s.d TW II	Keterangan
INSPEKTORAT	100,00	44,39	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100,00	78,30	

Sumber data: Bappeda diolah 2025

B. Berdasarkan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Realisasi kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan II tahun 2025 Pendapatan Asli Daerah terealisasi Rp 4.55 Triliun atau sebesar 38,67 persen sedangkan belanja daerah terealisasi Rp 3.84 Triliun atau 32.70 persen di TW II 2025. Kinerja rata-rata Provinsi Banten sebesar 32,70 persen, dapat disimpulkan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Rekapitulasi Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Sampai TW II 2025

Realisasi Keuangan	Perangkat Daerah
50-70 (%)	BIRO PEMOTDAN, BAKESBANGPOL
30-50 (%)	BIRO ORB, DINKES, BPSDM, DP3AKKB, DKETAPANG, DISPERTAN, BIRO EKBANG, BPBD, DKP, DISKOMINFO, DISNAKERTRANS, DISPORA, DINKOPUKM, DISHUB, DPMPTSP, DISPERINDAG, BIRO ADPIM, BPKAD, SETWAN, DLHK, BAPENDA, BIRO HUKUM, DINAS PERPUS, BADAN PENGHUBUNG, BIRO UUM, SATPOL PP,

Realisasi Keuangan	Perangkat Daerah
	INSPEKTORAT, BAPPEDA, BIRO BARJAS,
10-30 (%)	DINDIKBUD, DISPAR, DPMD, DESDM, DINSOS, PUPR
0%-10 (%)	BKD, DPRKP

Sumber: BPKAD dan Olahan Bappeda

Tabel 4.3

Pelaksanaan Prioritas Gubernur Kinerja Semester I

Program Unggulan	Program Turunan	Kegiatan Prioritas	Aksi Yang Dilakukan S.D Semester 1
Banten Bagus	Bang Andra	Jalan Desa	Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa: 1. Jalan Desa Cikarang Kec.Muncang 2. Desa banjar irigasi Kec. Lebak gedong 3. Desa Cidadap Kec. Curug bitung 4. Desa Sindang Mulya Kec.Maja 5. Desa Cimarga Kec.Clmarga
Banten Kuat	Eko Era	Penanganan Banjir	1. Pembangunan pengendali banjir kali angke
	Masa Banten	Sekolah Rakyat	Telah Keluar Penetapan dari Kementerian Sosial tentang Penetapan Lokasi Sekolah Rakyat Lokasi : Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Lebak
	Gen Alpha	Sekolah Gratis	Penyaluran Sekolah Baik Swasta Maupun Negeri Dengan Penggratisan SPP Juli Agustus Sejumlah Sekolah SMA,SMK, dan SKH (negeri dan swasta)
Banten Sehat	Faskin Kita	Pelayanan Kesehatan	Pemanfaatan Mobil Klinik Keliling untuk Kesehatan Masyarakat di daerah sulit dijangkau
			Cek Kesehatan Gratis bagi Masyarakat

			Penyediaan Anggaran Jaminan Kesehatan Untuk Masyarakat (Pbi, Pbpu Dan Bp)
			Operasionalisasi Rumah Sakit Baru (RSUD Labuan dan RSUD Cilograng)

4.3. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Dalam Pelaksanaan RKPD tahun 2025 pada triwulan II secara umum belum dijumpai adanya kendala yang berarti. Sebagian besar anggaran Program Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena ada pergeseran anggaran dan menunggu APBD Perubahan.

Dukungan dan kerjasama stake holder menjadi kunci keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan. Sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Program Pembangunan di Provinsi Banten, diharapkan perlu adanya peningkatan penyelarasan dan antisipasi kebijakan pada tahap perencanaan dan pengendalian antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dapat meminimalisir permasalahan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

BAB V

PENUTUP

Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2025 yang merupakan komitmen dalam mengawal pencapaian Target Tujuan dan Sasaran Tahun 2023-2026 guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengukuran capaian indikator kinerja Tujuan, Sasaran Daerah, Sasaran PD, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Perangkat Daerah berdasarkan Urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten, diharapkan menjadi input dalam pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi atas kinerja yang hasilnya untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan periode selanjutnya.

Dalam Pelaksanaan RKPD tahun 2025 pada triwulan II secara umum belum dijumpai adanya kendala yang berarti. Sebagian besar anggaran Program Kegiatan belum dapat direalisasikan karena menunggu Perubahan APBD, dimana ada juga pelaksanaan janji-janji kampanye yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Urgensi pengendalian kinerja adalah bagaimana Perangkat daerah dari kinerja yang dilakukan di kegiatan dan sub kegiatan dapat mendukung penuh pencapaian kinerja utama Perangkat Daerah dan tercapainya Tujuan Daerah. Pada TW II ini yang perlu di fokuskan adalah pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat kemiskinan.

Dukungan dan kerjasama stake holder menjadi kunci keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan. Sebagai upaya

peningkatan kinerja penyelenggaraan Program Pembangunan di Provinsi Banten, diharapkan perlu adanya peningkatan penyelarasan dan antisipasi kebijakan pada tahap perencanaan dan pengendalian antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dapat meminimalisir permasalahan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2025 disusun, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan program pembangunan triwulan selanjutnya.

LAMPIRAN

REKAPITULASI REALISASI KINERJA PROGRAM

DAN KEGIATAN RKPD TRIWULAN II

TAHUN ANGGARAN 2025

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.1	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN								
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (UNIT INDUK)								
	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	67,72	67,72	SEDANG	target satuan diukur tahunan	mencoba mengantisipasi capaian dengan evaluasi triwulan
	1.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)	100,00	19,84	19,84			
	1.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100,00	59,55	59,55			
	1.01.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	1.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	0,00	0,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	7,08	7,08			
	1.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	1.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	53,91	53,91			
	1.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	42,17	42,17			
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
				Kualitas Pengelolaan Pendidikan Khusus (Kinerja)	91,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	belum dapat diukur	melakukan evaluasi dan pengendalian pada seluruh kegiatan pendukung capaian program
	1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus Pada Indikator Pengelolaan Pendidikan Khusus (Persen)	100,00	42,53	42,53			
				Persentasi SMA di Provinsi Banten terakreditasi minimal B (Persen)	83,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	belum dapat diukur	melakukan evaluasi dan pengendalian pada seluruh kegiatan pendukung capaian program
	1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pada Indikator Angka Partisipasi	100,00	0,06	0,06			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Kasar Menengah / Sederajat (Persen)						
	1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pada Indikator Angka Partisipasi Kasar Menengah / Sederajat (Persen)	100,00	3,90	3,90			
				Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah / Sederajat (Persen)	82,78	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	belum dapat diukur capaian indikator program	melakukan evaluasi dan pengendalian pada seluruh kegiatan pendukung capaian program
	1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pada Indikator Angka Partisipasi Kasar Menengah / Sederajat (Persen)	100,00	42,30	42,30			
	1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pada Indikator Angka Partisipasi Kasar Menengah / Sederajat (Persen)	100,00	52,99	52,99			
				Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah / Sederajat (Persen)	61,67	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	belum dapat diukur	melakukan evaluasi dan pengendalian pada seluruh kegiatan pendukung capaian program
	1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pada Indikator Angka Partisipasi Kasar Menengah / Sederajat (Persen)	100,00	14,54	14,54			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pada Indikator Angka Partisipasi Kasar Menengah / Sederajat (Persen)	100,00	0,00	0,00			
				Persentase lulusan SMK yang mendapatkan pekerjaan selama 1 tahun setelah kelulusan (Persen)	34,78	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	belum dapat diukur	melakukan evaluasi dan pengendalian pada seluruh kegiatan pendukung capaian program
	1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pada Indikator Angka Partisipasi Kasar Menengah / Sederajat (Persen)	100,00	24,63	24,63			
	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							
				Tingkat Pelaksanaan Pengembangan kurikulum Muatan lokal pada Pendidikan Khusus (Persen)	83,96	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	belum dapat diukur	melakukan evaluasi dan pengendalian pada seluruh kegiatan pendukung capaian program
	1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus (Persen)	100,00	0,00	0,00			
				Tingkat Pelaksanaan Pengembangan kurikulum Muatan lokal pada Pendidikan Menengah (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	belum dapat diukur	melakukan evaluasi dan pengendalian pada seluruh kegiatan pendukung capaian program
	1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah (Persen)	100,00	0,00	0,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pendidik per mata pelajaran (Persen)	78,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	belum siap diukur	melakukan evaluasi dan pengendalian pada seluruh kegiatan pendukung capaian program
	1.01.04.1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	1.01.05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN							
				Persentase sekolah yang mendapatkan izin (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	belum dapat diukur	melakukan evaluasi dan pengendalian pada seluruh kegiatan pendukung capaian program
	1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Persen)	100,00	12,50	12,50			
	1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Persen)	100,00	6,67	6,67			
2	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.1	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN								
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (UNIT INDUK)								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							
				Kualitas pengembangan kebudayaan (Kinerja)	91,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	belum dapat diukur	melakukan evaluasi dan kordinasi pelaksanaan kegiatan program pendukung terkait
	2.22.02.1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (persen)	100,00	0,00	0,00			
	2.22.02.1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (Persen)	100,00	0,46	0,46			
	2.22.02.1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Persen)	100,00	5,44	5,44			
	2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							
				Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola (Persen)	95,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	belum dapat diukur	Melakukan evaluasi dan kordinasi pelaksanaan kegiatan program pendukung terkait
	2.22.05.1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Cagar budaya Peringkat Provinsi (Persen)	100,00	0,00	0,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.22.05.1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi (Persen)	100,00	2,35	2,35			
	2.22.05.1.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi (Persen)	100,00	0,00	0,00			
2	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.1	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN								
		Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Lebak								
	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00					
	1.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Lebak (Persen)	100,00	50,00	50,00			
	1.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Lebak (Persen)	100,00	0,00	0,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Lebak (Persen)	100,00	43,26	43,26			
	1.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Lebak (persen)	100,00	0,00	0,00			
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
				Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Lebak (Persen)	54,66					
	1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Presentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Cabang Dinas Wilayah Kab. Lebak (Persen)	100,00	1,34	1,34			
	1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Wilayah Kab. Lebak (Persen)	100,00	1,28	1,28			
	1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus Cabang Dinas Wilayah Kab. Lebak (Persen)	100,00	0,00	0,00			
		Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pandeglang								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00					
	1.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Pandeglang (Persen)	100,00	51,10	51,10			
	1.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Pandeglang (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	1.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Pandeglang (Persen)	100,00	65,70	65,70			
	1.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Pandeglang (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
				Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Pandeglang (Persen)	59,30					

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Cabang Dinas Wilayah Kab. Pandeglang (persen)	100,00	15,40	15,40			
	1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Wilayah Kab. Pandeglang (Persen)	100,00	15,79	15,79			
	1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus Cabang Dinas Wilayah Kab. Pandeglang (Persen)	100,00	13,58	13,58			
		Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang								
	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00					
	1.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon (Persen)	100,00	12,50	12,50			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	1.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon (Persen)	100,00	53,41	53,41			
	1.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon (Persen)	100,00	100,00	100,00			
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
				Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon (Persen)	72,64					
	1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Cabang Dinas Wilayah Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon (Persen)	100,00	36,65	36,65			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Wilayah Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus Cabang Dinas Wilayah Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon (Persen)	100,00	0,00	0,00			
		Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Tangerang								
	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00					
	1.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Tangerang (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	1.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Tangerang (Persen)	100,00	0,00	0,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Tangerang (Persen)	100,00	57,27	57,27			
	1.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Cabang Dinas Kab. Tangerang (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
				Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Tangerang (Persen)	70,89					
	1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Cabang Dinas Wilayah Kab. Tangerang (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Wilayah Kab. Tangerang (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus Cabang Dinas Wilayah Kab. Tangerang (Persen)	100,00	0,00	0,00			
		Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Tangerang dan								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Kota Tangerang Selatan								
	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00					
	1.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Cabang Dinas Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan (Persen)	100,00	18,73	18,73			
	1.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Cabang Dinas Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	1.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Cabang Dinas Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan (Persen)	100,00	12,29	12,29			
	1.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Cabang Dinas Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan (Persen)	100,00	0,00	0,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
				Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kota Tangsel, Kota Tangerang (Persen)	78,05					
	1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Cabang Dinas Wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan (Persen)	100,00	7,37	7,37			
	1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pada Cabang Dinas Wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan (Persen)	100,00	31,44	31,44			
	1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus Cabang Dinas Wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan (Persen)	100,00	22,57	22,57			
2	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.1	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN								
		UPTD Taman Budaya dan Museum								
	2.22.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00					
	2.22.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD Taman Budaya dan Museum (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	2.22.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada UPTD Taman Budaya dan Museum (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	2.22.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD Taman Budaya dan Museum (Persen)	100,00	33,80	33,80			
	2.22.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD Taman Budaya dan Museum (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN							
				Pertumbuhan Jumlah Pengunjung museum dan Taman Budaya provinsi (Persen)	20,00					
	2.22.06.1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi (Persen)	100,00	3,27	3,27			
2	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.1	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN								
		UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan								
	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00					
	1.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD TIKP-K (Persen)	100,00	0,75	0,75			
	1.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada UPTD TIKP-K (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	1.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD TIKP-K (Persen)	100,00	1,35	1,35			
	1.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD TIKPK (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Cakupan Ketersediaan dan Penggunaan TIK Pendidikan (Persen)	25,00					
	1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas UPTD TIKP-K (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan UPTD TIKP-K (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus UPTD TIKP-K (Persen)	100,00	0,00	0,00			
2.2	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
		DINAS KESEHATAN								
		DINAS KESEHATAN (UNIT INDUK)								
	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Belum ada target kinerja program penunjang pada triwulan II, capaian kinerja akan dilaporkan pada triwulan IV tahun 2025. Pada kegiatan-kegiatan terkait PEP, terdapat kinerja yang tidak tercapai dikarenakan adanya Efisiensi (mengurangi jumlah peserta Kab/Kota, mengurangi perjalanan dinas dalam dan luar daerah), untuk kegiatan Adm Keuangan telah tercapai sesuai target, sedangkan pada Umum Kepgw terdapat kegiatan pengadaan BMD yang tidak tercapai sesuai target	Kami telah melaksanakan pengawasan sudah sejauh mana realisasi program dan kegiatan penunjang Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2025 hingga triwulan II mencapai 49,5 % (kumulatif tw 1 dan 2)

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
									(terkendala pemelihan penyedia)	
	1.02.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	54,86	54,86			
	1.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100,00	59,94	59,94			
	1.02.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Persen)	100,00	38,74	38,74			
	1.02.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (Persen)	100,00	80,08	80,08			
	1.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah (Persen)	100,00	25,05	25,05			
	1.02.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	5,76	5,76			
	1.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	42,74	42,74			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	30,47	30,47			
	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
				Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu (Unit)	242,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Capaian target akan dilaporkan di akhir periode tahun 2025 / triwulan IV	Memonitoring / mengkoordinasikan dengan Dinkes Kab/Kota dan Fasyankes yang telah terakreditasi dan yang belum terakreditasi untuk memperoleh proyeksi capaian kinerja di akhir tahun 2025
	1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Persen)	100,00	58,78	58,78			
				Persentase Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Miskin (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Realisasi keuangan kurang dari target karena : - adanya efesiensi anggaran SKTM RSUD Cilograng dan labuan dikarenakan RSUD labuan dan cilograng sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan - adanya efesiensi anggaran dan honor tim fraud dan pertimbangan klinis dikarenakan SK Tim belum disahkan oleh gubernur - SP2D Pembayaran BPJS bulan Juni yang seharusnya terbit dibulan juni, di terbitkan di bulan Juli karena maintenance SIPD	- SP2D Pembayaran BPJS diterbitkan pada awal bulan Juli sehingga akan di masukan kedalam realisasi bulan juli 2025 - menunggu di sahkan nya SK tim oleh gubernur, ketika sudah di sahkan, pada tahun 2026 pembayaran honor tim fraud dan tim pertimbangan klinis akan dianggarkan kembali

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Persen)	100,00	48,66	48,66			
				Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Capaian target ditetapkan pada triwulan IV, tetapi hingga Triwulan II, sesuai perhitungan Seksi Farmasi diperoleh capaian sebesar 62,66 %	Meningkatkan realisasi capaian pada triwulan III dan IV agar sesuai target tahun 2025 yaitu 100%
	1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Pro (Persen)	100,00	53,46	53,46			
				Persentase Pelayanan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Capaian kinerja krisis ditargetkan pada triwulan IV, tetapi hingga triwulan II tidak ada kejadian krisis / bencana sehingga Dinkes Provinsi Banten melaksanakan kegiatan pra krisis berupa edukasi dengan capaian jumlah orang yang diedukasi sebanyak 227 orang	Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/kota di Provinsi Banten dan BPBD terkait kejadian Bencana/Krisis Kesehatan di Provinsi Banten
	1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Persen)	100,00	57,40	57,40			
				Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Bersiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	capaian kinerja KLB ditargetkan pada triwulan IV, tetapi hingga triwulan II tidak ada kejadian KLB sehingga dinkes provinsi banten melaksanakan kegiatan berupa edukasi ke masyarakat terkait Deteksi dini Penyakit yang berpotensi KLB.	berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota dan Puskesmas apabila terjadi KLB

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Persen)	100,00	93,14	93,14			
				Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular. Penyakit Tidak Menular. dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Capaian kinerja belum dapat diukur di Triwulan II karena target kinerja ada pada triwulan IV	Kami telah melaksanakan pemantauan capaian hingga triwulan II telah tercapai hingga 100 persen, untuk mendukung capaian target kami juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung Pelayanan Kasus Penyakit Menular. Penyakit Tidak Menular. dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
	1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Persen)	100,00	38,72	38,72			
				Rasio Daya Tampung RS Rujukan (Rasio)	0,14	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Pengukuran capaian rasio daya tampung dapat diukur pada triwulan IV	Mengawasi ketersediaan jumlah tempat tidur RS setiap bulan melalui aplikasi RS Online
	1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (Persen)	100,00	98,51	98,51			
				Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi (Persen)	80,16	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan pada triwulan IV	Memonitoring jumlah RS yang terakreditasi, yang belum terakreditasi dan yang re-akreditasi dengan berkoordinasi dengan Dinkes Kabupaten / Kota dan grup RS se Provinsi Banten

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (Persen)	100,00	56,06	56,06			
				Cakupan Kualitas Keluarga Sehat (Persen)	64,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Capaian target akan dilaporkan diakhir priode tahun 2025/ Triwulan IV	Memonitoring / mengkoordinasikan dengan Dinkes Kab/Kota untuk memperoleh capaian kinerja diakhir tahun 2025, Seksi Gizi KIA telah memantau capaian target hingga triwulan II telah mencapai 75%
	1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Persen)	100,00	58,64	58,64			
				Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban) (Persen)	90,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Capaian target Program akan dilaksanakan di ahir tahun 2025 / Triwulan IV	Monitoring atau mengkoordinasikan dengan Dinkes Kab/Kota dan puskesmas yang akan melaksanakan deklarasi desa ODF (Open Defecetion Free) untuk capaian di tahun 2025.Hingga triwulan II, Seksi ISKKL telah melakukan pemantauan capaian target "Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban)" hingga triwulan II mencapai 90%
	1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Persen)	100,00	84,64	84,64			
	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			DAYA MANUSIA KESEHATAN							
				Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan (Orang)	470,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Capaian kinerja akan disampaikan pada triwulan IV, saat ini seksi SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait tenaga kesehatan yang direkrut dan didistribusikan sebagaimana terlampir (Data dukung)	-
	1.02.03.1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi (Persen)	100,00	41,48	41,48			
	1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tidak ada target kinerja pada triwulan II, target kinerja ada pada triwulan IV tahun 2025	Seksi Farmasi secara berkala memantau sarana kefarmasian (PBF dan PAK) yang dibina dan diawasi kualitas mutunya melalui kegiatan-kegiatan yang baik mengundang ke Dinas Kesehatan maupun Monev ke sarana kefarmasian tersebut
	1.02.04.1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) (Persen)	100,00	63,17	63,17			
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tidak ada target kinerja pada triwulan II tahun 2025, target kinerja di triwulan IV tahun 2025.	Seksi Farmasi secara berkala telah memantau capaian persentase pembinaan dan pengawasan sarana perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan PKRT

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.02.04.1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) (Persen)	100,00	67,48	67,48			
	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							
				Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (Kelompok)	15,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Capaian target akan dilaporkan diakhir priode tahun 2025/ Triwulan IV	Memonitoring / mengkoordinasikan dengan Dinkes Kab/Kota , Organisasi Masyarakat untuk memperoleh capaian kinerja diakhir tahun 2025
	1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Persen)	100,00	62,67	62,67			
	1.02.05.1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daer (Persen)	100,00	41,24	41,24			
		UPTD RSUD Banten								
	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	50,00	50,00	SANGAT RENDAH	Tidak Ada Masalah	Dilanjutkan Sesuai Perencanaan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPT RSUD Banten) (Persen)	100,00	60,12	60,12			
	1.02.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD pada UPT RSUD Banten (Unit)	1,00	28,76	2.876,05			
	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
				Persentase standar bagian penunjang sebagai RS pendidikan pada UPT RSUD Banten (%)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tidak Ada Masalah	Dilanjutkan Sesuai Perencanaan
	1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	()	0,00	0,00	NaN			
		UPTD RSUD Malingping								
	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	50,00	50,00	SANGAT RENDAH	sebagian besar aktifitas pada sub kegiatan sudah dilakukan untuk meningkatkan capaian untuk indikator ini, namun terdapat kendala di akibatkan karena SK Terbaru terkait Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP) dari BPKAD ada Pembayaran yang belum dilakukan di bulan JUNI	Akan dibayarkan di bulan JULI dengan menyiapkan uang TUP untuk pembayaran yang bulan ini.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
									kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	
	1.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada UPTD RSUD Malingping (Persen)	100,00	57,38	57,38			
	1.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD RSUD Malingping (Persen)	100,00	53,42	53,42			
	1.02.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketercapaian Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD pada UPTD RSUD Malingping (Persen)	100,00	51,54	51,54			
	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
				Capaian variabel indikator Penunjang, Keperawatan dan Pelayanan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal pada UPT RSUD Malingping (%)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	-	untuk indikator ini terdapat 3 komponen indikator SPM Yaitu SPM Penunjang, SPM Pelayanan Medis, SPM Keperawatan, yang kesemua indikator itu sudah dilaksanakan pada TW 1 dengan capaian 100%
	1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM	100,00	0,00	0,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rujukan Tingkat Daerah Provinsi pada (%)						
		UPTD Pelatihan Kesehatan								
	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persesn)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tidak ada target kinerja pada triwulan II tahun 2025, target kinerja ditetapkan pada triwulan IV, terdapat beberapa kegiatan yang tidak tercapai (pengadaan barang milik daerah) sehingga membuat capaian kinerja program s/d trw II masih rendah	Hingga triwulan II, UPELKE telah melakukan pemantauan secara berkala capaian kinerja program penunjang, yaitu telah mencapai 27%
	1.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	38,75	38,75			
	1.02.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pelatihan Kesehatan (Persen)	100,00	50,00	50,00			
	1.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pelatihan Kesehatan (Persen)	100,00	44,21	44,21			
	1.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT	100,00	34,64	34,64			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Pelatihan Kesehatan) (Persen)						
	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							
				Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat (Orang)	480,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tidak ada target kinerja pada triwulan II, target kinerja ditetapkan pada triwulan IV tahun 2025	UPTD Pelatihan Kesehatan pada tahun 2025 mendapatkan efisiensi anggaran sehingga membuat jumlah orang yang dilatih dan diberikan sertifikat kompetensi berkurang dari target semula, sampai triwulan II telah tercapai 30 orang (dari target tahun 2025 semula 480 orang menjadi 150 orang)
	1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi pada UPTD Pelatihan K (Persen)	100,00	7,28	7,28			
		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah								
	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persesn)	100,00	57,65	57,65	RENDAH	Permasalahan yang terdapat pada sub-sub kegiatan di TW-II dapat disimpulkan sebagai berikut ; 1. Masalah terkait realisasi keuangan dan fisik yang tidak selaras dikarenakan adanya ketidaktepatan pengajuan SP2D / proses pelaksanaan yang mendekati akhir bulan 2. Pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terdapat masalah mengenai penyesuaian satuan harga yang tidak mencukupi kebutuhan pemeliharaan tersebut, oleh sebab itu pelaksanaan kegiatan terhambat	Tindak lanjut dari masalah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ; 1. Mengevaluasi terkait rancangan target pelaksanaan sub-sub kegiatan dan juga menekan-kan kepada Pemegang Kegiatan dan Bendahara pengeluaran terkait target pelaksanaan kegiatan maupun realisasi keuangan agar bisa selaras dengan target Anggaran KAS. 2. Pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sudah dilakukan penyesuaian harga satuan pada APBD-P dan akan dilakukan setelah DPA APBDP disahk
	1.02.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada UPTD Labkesda (Persen)	100,00	100,00	100,00			
	1.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Labkesda (Persen)	100,00	58,69	58,69			
	1.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Labkesda (Persen)	100,00	51,86	51,86			
	1.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT Laboratorium Kesehatan Daerah) (Persen)	100,00	71,66	71,66			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
				Peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi (Parameeter)	128,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Capaian target akan dilaporkan di akhir periode tahun 2025 / triwulan IV	Memastikan kompetensi semua personil pemegang parameter pengujian lab yang akan diikutsertakan kedalam penambahan ruang lingkup parameter akreditasi masih tetap terjaga dan terpelihara sampai dengan jadwal akreditasi dilaksanakan. dan melakukan koordinasi dengan pihak lembaga KAN selaku Komite Akreditasi Nasional, untuk memastikan jika jadwal yang diterbitkan oleh KAN tidak mengalami perubahan jadwal
	1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Pro (Persen)	100,00	61,98	61,98			
		UPTD RSUD Labuan								
	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	45,00	45,00	SANGAT RENDAH	Kegiatan pada Program ini sudah dilakukan untuk meningkatkan capaian untuk indikator ini, namun terdapat kendala di akibatkan karena SK Terbaru terkait Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP)	Koordinasi dengan BPKAD terkait pengajuan TUP

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.02.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	26,78	26,78			
	1.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100,00	47,23	47,23			
	1.02.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	90,77	90,77			
	1.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	5,59	5,59			
	1.02.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	1.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	33,84	33,84			
	1.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	37,70	37,70			
	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Capaian variabel indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (Persen)	100,00	40,00	40,00	SANGAT RENDAH	Pelayanan Operasional Rumah Sakit dibuka pada Bulan Juni 2025	untuk indikator SPM Keperawatan telah dilaksanakan pada Triwulan 2
	1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Persen)	100,00	1,45	1,45			
		UPTD RSUD Ciligrang								
	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	50,00	50,00	SANGAT RENDAH	Kegiatan pada Program ini sudah dilakukan untuk meningkatkan capaian untuk indikator ini, namun terdapat kendala di akibatkan karena SK Terbaru terkait Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP)	Koordinasi dengan BPKAD terkait pengajuan TUP
	1.02.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	35,33	35,33			
	1.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100,00	32,59	32,59			
	1.02.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	90,77	90,77			
	1.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	4,14	4,14			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.02.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	1.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	29,09	29,09			
	1.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	41,19	41,19			
	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
				Capaian variabel indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (Persen)	100,00	50,00	50,00	SANGAT RENDAH	Pelayanan Operasional Rumah Sakit dibuka pada Bulan Juni 2025.	untuk indikator SPM Penunjang telah dilaksanakan pada Triwulan 2
	1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Pro (Persen)	100,00	9,31	9,31			
2.3	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		PENATAAN RUANG (UNIT INDUK)								
	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	54,35	54,35	RENDAH	Beberapa sub kegiatan yang tidak terlaksana pada TW II, tertunda karena adanya pergeseran anggaran dan akan dilaksanakan pada TW berikutnya.	Akan ditindaklanjuti pada TW berikutnya.
	1.03.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100,00	44,65	44,65			
	1.03.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah (%)	100,00	60,75	60,75			
	1.03.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100,00	31,30	31,30			
	1.03.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100,00	73,69	73,69			
	1.03.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100,00	69,69	69,69			
	1.03.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100,00	60,96	60,96			
	1.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,00	39,06	39,06			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.03.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,00	49,92	49,92			
	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							
				Persentase penanganan banjir (%)	52,30	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tidak terdapat target pada TW II	Akan dilaksanakan pada TW selanjutnya
	1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	100,00	22,04	22,04			
				Persentase penanganan situ/embung (%)	8,03	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tidak terdapat target pad TW II	Target terdapat pada TW IV
	1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	100,00	13,52	13,52			
				Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik (%)	73,51	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tidak terdapat target pada TW II	Target terdapat pada TW IV
	1.03.02.1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Iri (%)	100,00	21,88	21,88			
	1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota (%)	18,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	tidak ada target pada triwulan II	-
	1.03.03.1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota (%)	100,00	28,54	28,54			
	1.03.04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL							
				Cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional (%)	2,09	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	tidak ada target pada triwulan II	
	1.03.04.1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketercapaian kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (%)	100,00	16,96	16,96			
	1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							
				Persentase penyediaan IPAL D yang tersambung (%)	58,93	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	tidak ada target pada triwulan II	
	1.03.05.1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase Ketercapaian kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional (%)	100,00	28,17	28,17			
	1.03.07		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN							
				Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan	66,67	1,00	1,50	SANGAT RENDAH	tidak ada target di triwulan II	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Strategis Daerah Provinsi (%)						
	1.03.07.1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provins (%)	100,00	26,93	26,93			
	1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							
				Persentase Pengelolaan Gedung strategis Provinsi (%)	95,24	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	tidak ada target di triwulan II	
	1.03.08.1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	100,00	27,66	27,66			
	1.03.09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA							
				Persentase penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (%)	90,91	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	tidak ada target pada triwulan II	
	1.03.09.1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	100,00	22,02	22,02			
	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							
				Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	98,00	95,24	97,18	SANGAT TINGGI	Tidak terdapat target pada TW II	Target terdapat pada TW IV

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi (%)	100,00	16,97	16,97			
				Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	98,00	88,05	89,85	TINGGI	Tidak terdapat target pada TW II	Target terdapat pada TW IV
	1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi (%)	100,00	28,70	28,70			
				Persentase Jalan Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	85,10	84,58	99,39	SANGAT TINGGI	Tidak terdapat target pada TW II	Target terdapat pada TW IV
	1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi (%)	100,00	24,30	24,30			
				Persentase Penyelesaian Jalan Baru (%)	70,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tidak terdapat target pada TW II	Target terdapat pada TW IV
	1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi (%)	100,00	44,88	44,88			
	1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							
				Persentase pembinaan tenaga ahli konstruksi (%)	33,37	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tidak terdapat target pada TW 2.	Target Program Terdapat di TW 4.
	1.03.11.1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi (%)	100,00	11,77	11,77			
	1.03.11.1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi (%)	100,00	22,49	22,49			
	1.03.11.1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (%)	100,00	55,54	55,54			
	1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	57,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tidak terdapat permasalahan	
	1.03.12.1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (%)	100,00	34,71	34,71			
	1.03.12.1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (%)	100,00	33,35	33,35			
				Persentase Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	100,00	50,00	50,00	SANGAT RENDAH	Pada Triwulan II, sudah dilakukan 2 (dua) kali rapat koordinasi yaitu: - Rapat Pembahasan Paduserasi Raperda RTRW Kota Tangerang Selatan dengan Perda RTRW Provinsi Banten - Rapat Pembahasan Rekomendasi Teknis Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang, Lintas KabupatenKota PT. Bukit Batuan Ekapasi	
	1.03.12.1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang (%)	100,00	6,95	6,95			
	1.03.12.1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (%)	100,00	59,04	59,04			
				Persentase Penyusunan Kajian Teknis Tata Ruang (%)	20,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tidak terdapat permasalahan. Pada TA 2025 sedang disusun Ranpergub KSP Kawasan Perbatasan WKP I, WKP II dan WKP III. Pekerjaan yang telah dilakukan pada triwulan II berupa pengadaan Tenaga Ahli dan pembahasan paparan pendahuluan.	Pada Triwulan III target mengumpulkan data/ survey dan analisis

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.03.12.1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi (persen)	100,00	22,80	22,80			
		UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau								
	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100,00	44,89	44,89	SANGAT RENDAH	Tidak Ada	Koordinasi
	1.03.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPTD PDAS Ciujung-Cidanau (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	1.03.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada pada UPTD Pengelolaan DAS Ciujung-Cidanau (%)	100,00	46,55	46,55			
	1.03.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100,00	0,00	0,00			
	1.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengelolaan DAS Ciujung-Cidanau (%)	100,00	50,47	50,47			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.03.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengelolaan DAS Ciujung-Cidanau (persen)	100,00	13,10	13,10			
	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							
				Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan DAS Ciujung-Cidanau (%)	100,00	47,79	47,79	SANGAT RENDAH	Tidak Ada	Koordinasi
	1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada UPTD Pengelolaan DAS Ciujung (%)	100,00	47,78	47,78			
				Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada UPTD Pengelolaan DAS Ciujung-Cidanau (%)	100,00	55,17	55,17	RENDAH	Tidak Ada	Koordinasi
	1.03.02.1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Iri (%)	100,00	47,48	47,48			
		UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100,00	70,41	70,41	SEDANG	Tidak ada kendala	-
	1.03.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengelolaan DAS Cidurian-Cisadane (%)	100,00	52,95	52,95			
	1.03.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengelolaan DAS Cidurian-Cisadane (%)	100,00	96,33	96,33			
	1.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengelolaan DAS Cidurian-Cisadane (%)	100,00	53,12	53,12			
	1.03.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengelolaan DAS Cidurian-Cisadane (%)	100,00	72,62	72,62			
	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							
				Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air pada	100,00	50,00	50,00	SANGAT RENDAH	Tidak ada kendala	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				UPTD Pengelolaan DAS Cidurian-Cisadane (%)						
	1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada UPTD Pengelolaan DAS Ciduria (%)	100,00	51,95	51,95			
		UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna								
	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100,00	55,44	55,44	RENDAH	Tidak terdapat permasalahan	-
	1.03.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna (%)	100,00	100,00	100,00			
	1.03.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengelolaan DAS Ciliman-Cisawarna (%)	100,00	27,07	27,07			
	1.03.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengelolaan DAS Ciliman-Cisawarna (%)	100,00	16,11	16,11			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengelolaan DAS Ciliman-Cisawarna (%)	100,00	51,06	51,06			
	1.03.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengelolaan DAS Ciliman-Cisawarna (%)	100,00	30,26	30,26			
	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							
				Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan DAS Ciliman-Cisawarna (%)	100,00	40,00	40,00	SANGAT RENDAH	Tidak terdapat permasalahan	-
	1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada UPTD Pengelolaan DAS Ciliman (Persen)	100,00	59,72	59,72			
				Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada UPTD Pengelolaan DAS Ciliman-Cisawarna (%)	100,00	40,00	40,00	SANGAT RENDAH	Tidak terdapat permasalahan	-
	1.03.02.1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000	100,00	35,92	35,92			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Ha-3000 Ha dan Daerah Iri (%)						
		UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang								
	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	50,02	50,02	RENDAH	Tidak terdapat permasalahan	-
	1.03.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah UPTD PJJ TANGERANG (%)	100,00	40,78	40,78			
	1.03.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD PJJ TANGERANG (%)	100,00	50,54	50,54			
	1.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD PJJ TANGERANG (%)	100,00	53,16	53,16			
	1.03.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTJJ TANGERANG) (%)	100,00	46,30	46,30			
	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Tangerang (%)	100,00	30,00	30,00	SANGAT RENDAH	Tidak terdapat permasalahan	-
	1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi pada UPTD PJJ Tangerang (%)	100,00	27,34	27,34			
		UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon								
	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100,00	26,56	26,56	SANGAT RENDAH	Tidak terdapat permasalahan	-
	1.03.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD PJJ Serang-Cilegon (%)	100,00	37,23	37,23			
	1.03.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTDPJJ Serang - Cilegon (%)	100,00	0,00	0,00			
	1.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD PJJ Serang-Cilegon (%)	100,00	53,74	53,74			
	1.03.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada	100,00	57,10	57,10			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				UPTD PJJ Serang-Cilegon (%)						
	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							
				Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Serang Cilegon (%)	100,00	40,00	40,00	SANGAT RENDAH	Tidak terdapat permasalahan	-
	1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi pada UPTD PJJ Serang-Cilegon (%)	100,00	30,05	30,05			
		UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang								
	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100,00	22,51	22,51	SANGAT RENDAH	Tidak terdapat permasalahan	-
	1.03.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD PJJ Pandeglang (persen)	100,00	67,22	67,22			
	1.03.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD PJJ Pandeglang (%)	100,00	96,49	96,49			
	1.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100,00	52,84	52,84			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Pemerintahan Daerah pada UPTDPJJ Pandeglang (%)						
	1.03.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD PJJ Pandeglang (%)	100,00	40,70	40,70			
	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							
				Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Pandeglang (%)	100,00	30,00	30,00	SANGAT RENDAH	Tidak terdapat permasalahan	-
	1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi pada UPTD PJJ Pandeglang (%)	100,00	41,15	41,15			
		UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Lebak								
	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100,00	23,66	23,66	SANGAT RENDAH	Tidak terdapat permasalahan	-
	1.03.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah UPTD PJJ LEBAK (%)	100,00	63,58	63,58			
	1.03.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD PJJ LEBAK (%)	100,00	99,31	99,31			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD PJJ LEBAK (Persen)	100,00	52,84	52,84			
	1.03.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD PJJ LEBAK (%)	100,00	60,48	60,48			
	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							
				Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Lebak (%)	100,00	30,00	30,00	SANGAT RENDAH	Tidak terdapat permasalahan	-
	1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi pada UPTD PJJ Lebak (%)	100,00	51,50	51,50			
		UPTD Pengujian Bahan, Konstruksi Bangunan dan Informasi Konstruksi								
	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100,00	36,13	36,13	SANGAT RENDAH	Tidak terdapat permasalahan	-
	1.03.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada UPTD Pengujian Bahan Konstruksi dan Informasi Konstruksi (%)	100,00	0,00	0,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.03.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah UPTD PENGUJIAN BAHAN, KONSTRUKSI BANGUNAN DAN INFORMASI KONSTRUKSI (%)	100,00	80,54	80,54			
	1.03.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PENGUJIAN BAHAN KONSTRUKSI BANGUNAN DAN INFORMASI KONSTRUKSI (%))	100,00	98,53	98,53			
	1.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD PENGUJIAN BAHAN, KONSTRUKSI BANGUNAN DAN INFORMASI KONSTRUKSI (%)	100,00	53,47	53,47			
	1.03.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD pengujian bahan konstruksi bangunan dan informasi ko (%)	100,00	41,03	41,03			
	1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							
				Persentase layanan pengujian bahan dan konstruksi bangunan (%)	100,00	60,00	60,00	RENDAH	Tidak terdapat permasalahan	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.03.11.1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi pada UPTD Pengujian Bahan Konstruksi dan Inf (%)	100,00	70,60	70,60			
2.4	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	1.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah (Persen)	100,00	49,67	49,67	SANGAT RENDAH		
	1.04.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	33,28	33,28			
	1.04.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah (persen)	100,00	59,78	59,78			
	1.04.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (Persen)	100,00	34,95	34,95			
	1.04.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (Persen)	100,00	51,98	51,98			
	1.04.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah (Persen)	100,00	37,69	37,69			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.04.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	34,94	34,94			
	1.04.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Persen)	100,00	49,99	49,99			
	1.04.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	39,38	39,38			
	1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							
				Persentase Penyediaan Rumah korban bencana skala provinsi (Persen)	81,17	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tidak ada permasalahan, namun sudah dilakukan pembangunan rumah layak huni sebanyak 3 Unit	Pada triwulanan selanjutnya dibangun rumah layak huni sebanyak..... unit
	1.04.02.1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (Persen)	100,00	31,79	31,79			
	1.04.02.1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (Persen)	100,00	60,03	60,03			
	1.04.02.1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (Persen)	100,00	17,73	17,73			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.04.02.1.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (Persen)	100,00	29,87	29,87			
				Presentase relokasi rumah terdampak program Provinsi (%)	75,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	1.04.02.1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (Persen)	100,00	28,02	28,02			
	1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							
				Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani (Ha)	89,62	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Masih dalam progres pengadaan	Akan segera diselesaikan pada triwulan IV
	1.04.03.1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Ketercapaian kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Persen)	100,00	45,08	45,08			
	1.04.03.1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani (Persen)	100,00	10,68	10,68			
	1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							
				Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman (Persen)	97,24	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Maish dalam progres pengadaan	Akan dilaksanakan pada triwulan II dan IV

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.04.05.1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase Ketercapaian kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman (Persen)	100,00	0,39	0,39			
	1.04.06		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
				Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Ut (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tidak bisa dilaksanakan karena terdampak efesiensi anggaran	Perubahan rincian belanja dan target kinerja
	1.04.06.1.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Persentase Ketercapaian kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Pr (Persen)	100,00	53,97	53,97			
2	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.1	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.10.03		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM							
				Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (Persen)	100,00	100,00	100,00	SANGAT TINGGI		
	2.10.03.1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase Ketercapaian penetapan lokasi pengadaan tanah (Persen)	100,00	57,59	57,59			
	2.10.06		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE							
				Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee (Persen)	100,00	100,00	100,00	SANGAT TINGGI		
	2.10.06.1.01		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Persen)	100,00	56,29	56,29			
	2.10.10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH							
				Persentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota (Persen)	100,00	100,00	100,00	SANGAT TINGGI		
	2.10.10.1.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah	Persentase Ketercapaian perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah	100,00	80,70	80,70			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi (Persen)						
2	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.1	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								
	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	22,98	22,98	SANGAT RENDAH		
	1.05.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	54,60	54,60			
	1.05.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100,00	52,03	52,03			
	1.05.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	1.05.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	53,63	53,63			
	1.05.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	99,00	99,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.05.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	49,00	49,00			
	1.05.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	57,06	57,06			
	1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
				Cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi (persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	1.05.02.1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rasio Ketercapaian Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Persen)	100,00	48,18	48,18			
	1.05.02.1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi (Persen)	100,00	31,62	31,62			
				Persentase Penegakan Perda dan Perkada (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	1.05.02.1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Rasio Ketercapaian Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur (Persen)	100,00	33,04	33,04			
	1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							
				Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	1.05.04.1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran (Persen)	100,00	41,13	41,13			
	1.05.04.1.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Persen)	100,00	48,60	48,60			
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	58,73	58,73	RENDAH	1. Adanya Efisiensi pada beberapa sub kegiatan di program penunjang urusan pemerintahan daerah 2. di Penyediaan Jasa Penunjang pada sub kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Sewa Pos ABK di Karangantu) yg menjadi target di triwulan I tdk dapat dilaksanakan pd triwulan ke 2 karena blm ada tempat sewa pos di karangantu 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah sub kegiatan pemeliharaan dan mesin lainnya (Pemeliharaan	1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sewa Pos ABK di Karangantu), akan dilaksanakan pada TW. III untuk lokasi sewa pos tetap di Karangantu 2. Pemeliharaan BMD sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (Pemeliharaan Repeter) akan berkoordinasi dengan pejabat pengadaan barang dan jasa dan kegiatan dilaksanakan pada TW. III

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
									Repetir)belum diproses di epurchasing	
	1.05.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	55,00	55,00			
	1.05.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100,00	65,00	65,00			
	1.05.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Persen)	100,00	100,00	100,00			
	1.05.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	99,01	99,01			
	1.05.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	62,32	62,32			
	1.05.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	100,00	100,00			
	1.05.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	47,92	47,92			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.05.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	40,31	40,31			
	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							
				Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	1. Penyusunan dokumen renkon kekeringan tidak ada target kinerja pada TW ke II dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya 2. Penyusunan Pergub tentang penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana akan dilaksanakan pada tw ke III dan ke IV	Penyusunan dokumen renkon kekeringan dan Pergub tentang penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana akan dilaksanakan pada tw ke III dan ke IV
	1.05.03.1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Persen)	100,00	3,00	3,00			
	1.05.03.1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (Persen)	100,00	15,47	15,47			
				Persentase Penanganan Pra Bencana (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Fasilitasi penanganan prabencana masih dilaksanakan sehingga pengukuran dilakukan pada akhir triwulan ke IV	akan dilakukan pengukuran pada triwulan ke IV
	1.05.03.1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi (Persen)	100,00	21,17	21,17			
	1.05.03.1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Persen)	100,00	12,12	12,12			
				Persentase Pendampingan Penanganan Tanggap Darurat Bencana (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	1. adanya efisiensi masing masing sub kegiatan pada kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	akan dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan ke IV

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
									2. Fasilitasi pendampingan penanganan tanggap darurat bencana baru bisa dilakukan pengukuran pada triwulan ke IV	
	1.05.03.1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Persen)	100,00	59,38	59,38			
				Persentase Pendampingan Penanganan Pasca Bencana (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Fasilitasi pendampingan penanganan Pasca Bencana akan dilakukan pengukuran pada triwulan ke IV	akan dilakukan pengukuran pada triwulan ke IV
	1.05.03.1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (Persen)	100,00	37,96	37,96			
2.2	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
		DINAS SOSIAL								
		DINAS SOSIAL (UNIT INDUK)								
	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	24,11	24,11	SANGAT RENDAH		
	1.06.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	47,44	47,44			
	1.06.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100,00	49,41	49,41			
	1.06.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi	100,00	69,31	69,31			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Persen)						
	1.06.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	68,16	68,16			
	1.06.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	45,21	45,21			
	1.06.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	100,00	100,00			
	1.06.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	53,03	53,03			
	1.06.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	62,21	62,21			
	1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							
				Persentase PSKS yang Mengalami Peningkatan dalam Berpartisipasi Sosial (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	1.06.02.1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Persen)	100,00	40,61	40,61			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.06.02.1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi (Persen)	100,00	70,27	70,27			
	1.06.03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN							
				Persentase Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Kabupaten/Kota (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	1.06.03.1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabu (Persen)	100,00	21,67	21,67			
	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							
				Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial (Persen)	100,00	19,23	19,23	SANGAT RENDAH	Beberapa kegiatan di TW 2 ada yang terkena efisiensi anggaran namun tidak menghambat capaian realisasi satuan (link evidence terlampir).	Akan dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di TW 3.
	1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti (Persen)	100,00	28,73	28,73			
	1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (Persen)	100,00	41,63	41,63			
	1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti (Persen)	100,00	41,03	41,03			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.06.04.1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti (Persen)	100,00	63,50	63,50			
	1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
				Persentase Pengangkatan Anak antar WNI dan Anak oleh Orang Tua Tunggal (Persen)	100,00	20,00	20,00	SANGAT RENDAH		
	1.06.05.1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (Persen)	100,00	70,00	70,00			
				Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Jaminan Sosial (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	1.06.05.1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	8,42	8,42			
				Persentase Pegelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	1.06.05.1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	45,00	45,00			
				Persentase Penanganan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	1.06.05.1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	8,09	8,09			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA							
				Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi (Persen)	100,00	11,56	11,56	SANGAT RENDAH		
	1.06.06.1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi (Persen)	100,00	43,40	43,40			
		UPTD Perlindungan Sosial								
	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	22,61	22,61	SANGAT RENDAH		
	1.06.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada UPTD Perlindungan Sosial (Persen)	100,00	59,09	59,09			
	1.06.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Perlindungan Sosial (Persen)	100,00	38,99	38,99			
	1.06.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada	100,00	76,11	76,11			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				UPTD Perlindungan Sosial (Persen)						
	1.06.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Perlindungan Sosial (Persen)	100,00	59,89	59,89			
	1.06.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Perlindungan Sosial (Persen)	100,00	2,60	2,60			
	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persen)	100,00	50,00	50,00	SANGAT RENDAH		
	1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti pada UPTD Perlindungan Sosial (Persen)	100,00	61,90	61,90			
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persen)	100,00	50,00	50,00	SANGAT RENDAH		
	1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti pada UPTD Perlindungan Sosial (Persen)	100,00	53,15	53,15			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial								
	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	22,07	22,07	SANGAT RENDAH	-	-
	1.06.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (Persen)	100,00	38,21	38,21			
	1.06.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (Persen)	100,00	64,45	64,45			
	1.06.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (Persen)	100,00	100,00	100,00			
	1.06.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (Persen)	100,00	69,30	69,30			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1.06.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (Persen)	100,00	6,67	6,67			
	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							
				Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persen)	100,00	50,00	50,00	SANGAT RENDAH	Sedang Proses SPJ	Dikoordinasikan dengan bagian sub keuangan
	1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (Persen)	100,00	52,05	52,05			
				Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persen)	100,00	10,00	10,00	SANGAT RENDAH		
	1.06.04.1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (Persen)	100,00	52,25	52,25			
2	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.1	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
		DINAS TENAGA KERJA DAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		TRANSMIGRASI (UNIT INDUK)								
	2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	26,80	26,80	SANGAT RENDAH		
	2.07.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	67,60	67,60			
	2.07.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100,00	54,78	54,78			
	2.07.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	2.07.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	80,57	80,57			
	2.07.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	36,88	36,88			
	2.07.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	96,85	96,85			
	2.07.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100,00	51,63	51,63			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Pemerintahan Daerah (Persen)						
	2.07.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	61,66	61,66			
	2.07.02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA							
				Persentase Perencanaan Tenaga Kerja (Persen)	9,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	2.07.02.1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rencana Tenaga Kerja (RTK) (Persen)	100,00	40,38	40,38			
	2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
				Persentase Pelatihan dan Kompetensi Kerja (Persen)	10,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (Persen)	100,00	62,72	62,72			
				Persentase Produktivitas Tenaga Kerja (Persen)	5,06	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	2.07.03.1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (Persen)	100,00	66,00	66,00			
	2.07.03.1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah (Persen)	100,00	40,00	40,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.07.03.1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi (Persen)	100,00	100,00	100,00			
	2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							
				Persentase Kesempatan Kerja (Persen)	14,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	2.07.04.1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Persen)	100,00	18,72	18,72			
	2.07.04.1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (Persen)	100,00	31,36	31,36			
	2.07.04.1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi (Persen)	100,00	62,25	62,25			
	2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							
				Persentase Hubungan Industrial (Persen)	4,48	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	2.07.05.1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pa (Persen)	100,00	52,36	52,36			
				Persentase Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja (Persen)	10,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.07.05.1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minim (Persen)	100,00	47,75	47,75			
				Persentase Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persen)	10,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	2.07.05.1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) (Persen)	100,00	25,12	25,12			
	2.07.06		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN							
				Persentase Kondisi Lingkungan Kerja (Persen)	10,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	2.07.06.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan (Persen)	100,00	50,49	50,49			
		UPTD Latihan Kerja								
	2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	53,37	53,37	RENDAH		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.07.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum pada UPTD Latihan Kerja (Persen)	100,00	28,92	28,92			
	2.07.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Latihan Kerja (Persen)	100,00	98,33	98,33			
	2.07.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Latihan Kerja (Persen)	100,00	59,22	59,22			
	2.07.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Latihan Kerja (Persen)	100,00	65,76	65,76			
	2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
				Persentase Pelatihan dan Kompetensi Kerja (Persen)	10,00	39,79	397,90	SANGAT TINGGI		
	2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi pada UPTD Latihan Kerja (Persen)	100,00	78,58	78,58			
2.2	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA								
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (UNIT INDUK)								
	2.08.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	49,30	49,30	SANGAT RENDAH	Efisiensi Anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025, SE Sekda No 3 Tahun Provinsi Banten Tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke daerah dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025, Surat Sekda No. B 900.1.3.10/245/EKBANG/2025 tentang Reviu APBD TA 2025	1. Menginventarisir belanja dalam rangka efisiensi anggaran, dengan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan memiliki output terukur dalam menunjang indikator kinerja perangkat daerah 2. Melakukan penyesuaian aktivitas kinerja dalam pencapaian program, untuk kemudian diformulasikan pada Renja Perubahan Tahun 2025
	2.08.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Persen)	100,00	75,07	75,07			
	2.08.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan administrasi Keuangan Perangkat daerah (Persen)	100,00	47,96	47,96			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.08.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah (Persen)	100,00	50,58	50,58			
	2.08.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	50,00	50,00			
	2.08.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	69,07	69,07			
	2.08.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	26,33	26,33			
	2.08.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Persen)	100,00	53,00	53,00			
	2.08.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	52,13	52,13			
	2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
				Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBD (%)	12,50	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Efisiensi Anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025, SE Sekda No 3 Tahun Provinsi Banten Tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke daerah dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025, Surat Sekda No. B	1. Menginventarisir belanja dalam rangka efisiensi anggaran, dengan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan memiliki output terukur dalam menunjang indikator kinerja perangkat daerah

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
									900.1.3.10/245/EKBANG/2025 tentang Reviu APBD TA 2025	2. Melakukan penyesuaian aktivitas kinerja dalam pencapaian program, untuk kemudian diformulasikan pada Renja Perubahan Tahun 2025
	2.08.02.1.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provins (persen)	100,00	89,41	89,41			
				Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	21,18	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Efisiensi Anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025, SE Sekda No 3 Tahun Provinsi Banten Tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke daerah dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025, Surat Sekda No. B 900.1.3.10/245/EKBANG/2025 tentang Reviu APBD TA 2025	1. Menginventarisir belanja dalam rangka efisiensi anggaran, dengan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan memiliki output terukur dalam menunjang indikator kinerja perangkat daerah 2. Melakukan penyesuaian aktivitas kinerja dalam pencapaian program, untuk kemudian diformulasikan pada Renja Perubahan Tahun 2025
	2.08.02.1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakatan Kewenangan Provinsi (Persen)	100,00	77,30	77,30			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase Kontribusi Perempuan dalam pemberdayaan Ekonomi (%)	38,13	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Efisiensi Anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025, SE Sekda No 3 Tahun Provinsi Banten Tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke daerah dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025, Surat Sekda No. B 900.1.3.10/245/EKBANG/2025 tentang Reviu APBD TA 2025	1. Menginventarisir belanja dalam rangka efisiensi anggaran, dengan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan memiliki output terukur dalam menunjang indikator kinerja perangkat daerah 2. Melakukan penyesuaian aktivitas kinerja dalam pencapaian program, untuk kemudian diformulasikan pada Renja Perubahan Tahun 2025
	2.08.02.1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (Persen)	100,00	88,17	88,17			
	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
				Cakupan peningkatan kelembagaan perlindungan perempuan (%)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Efisiensi Anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025, SE Sekda No 3 Tahun Provinsi Banten Tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke daerah dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025, Surat Sekda No. B 900.1.3.10/245/EKBANG/2025 tentang Reviu APBD TA 2025	1. Menginventarisir belanja dalam rangka efisiensi anggaran, dengan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan memiliki output terukur dalam menunjang indikator kinerja perangkat daerah 2. Melakukan penyesuaian aktivitas kinerja dalam pencapaian program, untuk kemudian diformulasikan pada Renja Perubahan Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.08.03.1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Persen)	100,00	89,20	89,20			
	2.08.03.1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (Persen)	100,00	90,23	90,23			
	2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
				Persentase Peningkatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga (Persen)	45,45	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Efisiensi Anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025, SE Sekda No 3 Tahun Provinsi Banten Tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke daerah dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025, Surat Sekda No. B 900.1.3.10/245/EKBANG/2025 tentang Reviu APBD TA 2025	1. Menginventarisir belanja dalam rangka efisiensi anggaran, dengan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan memiliki output terukur dalam menunjang indikator kinerja perangkat daerah 2. Melakukan penyesuaian aktivitas kinerja dalam pencapaian program, untuk kemudian diformulasikan pada Renja Perubahan Tahun 2025
	2.08.04.1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Persen)	100,00	3,75	3,75			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.08.04.1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan P (Persen)	100,00	66,78	66,78			
	2.08.04.1.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kegiatan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Persen)	100,00	46,36	46,36			
	2.08.05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							
				Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Efisiensi Anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025, SE Sekda No 3 Tahun Provinsi Banten Tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke daerah dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025, Surat Sekda No. B 900.1.3.10/245/EKBANG/2025 tentang Reviu APBD TA 2025	1. Menginventarisir belanja dalam rangka efisiensi anggaran, dengan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan memiliki output terukur dalam menunjang indikator kinerja perangkat daerah 2. Melakukan penyesuaian aktivitas kinerja dalam pencapaian program, untuk kemudian diformulasikan pada Renja Perubahan Tahun 2025
	2.08.05.1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi (Persen)	100,00	57,72	57,72			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
				Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	74,20	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Efisiensi Anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025, SE Sekda No 3 Tahun Provinsi Banten Tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke daerah dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025, Surat Sekda No. B 900.1.3.10/245/EKBANG/2025 tentang Reviu APBD TA 2025	1. Menginventarisir belanja dalam rangka efisiensi anggaran, dengan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan memiliki output terukur dalam menunjang indikator kinerja perangkat daerah 2. Melakukan penyesuaian aktivitas kinerja dalam pencapaian program, untuk kemudian diformulasikan pada Renja Perubahan Tahun 2025
	2.08.06.1.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi (Persen)	100,00	69,23	69,23			
	2.08.06.1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (Persen)	100,00	82,23	82,23			
	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	86,12	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Efisiensi Anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025, SE Sekda No 3 Tahun Provinsi Banten Tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke daerah dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025, Surat Sekda No. B 900.1.3.10/245/EKBANG/2025 tentang Reviu APBD TA 2025	1. Menginventarisir belanja dalam rangka efisiensi anggaran, dengan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan memiliki output terukur dalam menunjang indikator kinerja perangkat daerah 2. Melakukan penyesuaian

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
										aktivitas kinerja dalam pencapaian program, untuk kemudian diformulasikan pada Renja Perubahan Tahun 2025
	2.08.07.1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Persen)	100,00	89,28	89,28			
	2.08.07.1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan L (Persen)	100,00	26,31	26,31			
2.3	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA								
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		DAN KELUARGA BERENCANA (UNIT INDUK)								
	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							
				Persentase Cakupan layanan pendaftaran penduduk (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Efisiensi Anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025, SE Sekda No 3 Tahun Provinsi Banten Tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke daerah dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025, Surat Sekda No. B 900.1.3.10/245/EKBANG/2025 tentang Reviu APBD TA 2025	1. Menginventarisir belanja dalam rangka efisiensi anggaran, dengan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan memiliki output terukur dalam menunjang indikator kinerja perangkat daerah 2. Melakukan penyesuaian aktivitas kinerja dalam pencapaian program, untuk kemudian diformulasikan pada Renja Perubahan Tahun 2025
	2.12.02.1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase ketercapaian kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan (Persen)	100,00	87,50	87,50			
	2.12.02.1.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase ketercapaian kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan (Persen)	100,00	94,58	94,58			
	2.12.02.1.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase ketercapaian kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan (Persen)	100,00	86,05	86,05			
	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 – 17 tahun (Persen)	99,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Efisiensi Anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025, SE Sekda No 3 Tahun Provinsi Banten Tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke daerah dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025, Surat Sekda No. B 900.1.3.10/245/EKBANG/2025 tentang Reviu APBD TA 2025	1. Menginventarisir belanja dalam rangka efisiensi anggaran, dengan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan memiliki output terukur dalam menunjang indikator kinerja perangkat daerah 2. Melakukan penyesuaian aktivitas kinerja dalam pencapaian program, untuk kemudian diformulasikan pada Renja Perubahan Tahun 2025
	2.12.03.1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase ketercapaian kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil (Persen)	100,00	65,80	65,80			
				Persentase cakupan kepemilikan akta kematian pada seluruh peristiwa kematian (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Efisiensi Anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025, SE Sekda No 3 Tahun Provinsi Banten Tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke daerah dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025, Surat Sekda No. B 900.1.3.10/245/EKBANG/2025 tentang Reviu APBD TA 2025	1. Menginventarisir belanja dalam rangka efisiensi anggaran, dengan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan memiliki output terukur dalam menunjang indikator kinerja perangkat daerah 2. Melakukan penyesuaian aktivitas kinerja dalam pencapaian program, untuk kemudian diformulasikan pada Renja Perubahan Tahun 2025
	2.12.03.1.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi (Persen)	100,00	33,70	33,70			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Efisiensi Anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025, SE Sekda No 3 Tahun Provinsi Banten Tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke daerah dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025, Surat Sekda No. B 900.1.3.10/245/EKBANG/2025 tentang Reviu APBD TA 2025	1. Menginventarisir belanja dalam rangka efisiensi anggaran, dengan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan memiliki output terukur dalam menunjang indikator kinerja perangkat daerah 2. Melakukan penyesuaian aktivitas kinerja dalam pencapaian program, untuk kemudian diformulasikan pada Renja Perubahan Tahun 2025
	2.12.03.1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase ketercapaian kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil (Persen)	100,00	26,08	26,08			
				Persentase cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang menikah (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Efisiensi Anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025, SE Sekda No 3 Tahun Provinsi Banten Tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke daerah dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025, Surat Sekda No. B 900.1.3.10/245/EKBANG/2025 tentang Reviu APBD TA 2025	1. Menginventarisir belanja dalam rangka efisiensi anggaran, dengan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan memiliki output terukur dalam menunjang indikator kinerja perangkat daerah 2. Melakukan penyesuaian aktivitas kinerja dalam pencapaian program, untuk kemudian diformulasikan pada Renja Perubahan Tahun 2025
	2.12.03.1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase ketercapaian kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil (Persen)	100,00	100,00	100,00			
	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							
				Persentase Cakupan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang Memanfaatkan Data Kependudukan (Persen)	29,27	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Efisiensi Anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025, SE Sekda No 3 Tahun Provinsi Banten Tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke daerah dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025, Surat Sekda No. B 900.1.3.10/245/EKBANG/2025 tentang Reviu APBD TA 2025	1. Menginventarisir belanja dalam rangka efisiensi anggaran, dengan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan memiliki output terukur dalam menunjang indikator kinerja perangkat daerah 2. Melakukan penyesuaian aktivitas kinerja dalam pencapaian program, untuk kemudian diformulasikan pada Renja Perubahan Tahun 2025
	2.12.04.1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi (Persen)	100,00	43,24	43,24			
	2.12.04.1.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Persen)	100,00	34,48	34,48			
	2.12.05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN							
				Ketersediaan Profil Kependudukan (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Efisiensi Anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025, SE Sekda No 3 Tahun Provinsi Banten Tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke daerah dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025, Surat Sekda No. B 900.1.3.10/245/EKBANG/2025 tentang Reviu APBD TA 2025	. Menginventarisir belanja dalam rangka efisiensi anggaran, dengan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan memiliki output terukur dalam menunjang indikator kinerja perangkat daerah 2. Melakukan penyesuaian aktivitas kinerja dalam

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
										pencapaian program, untuk kemudian diformulasikan pada Renja Perubahan Tahun 2025
	2.12.05.1.01		Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase ketercapaian kegiatan Profil Kependudukan (Persen)	100,00	69,96	69,96			
2.4	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA								
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (UNIT INDUK)								
	2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							
				Median kawin pertama perempuan pada kelompok umur 10-49 tahun (Tahun)	22,20	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Efisiensi Anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025, SE Sekda No 3 Tahun Provinsi Banten Tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke daerah dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025, Surat Sekda No. B 900.1.3.10/245/EKBANG/2025 tentang Reviu APBD TA 2025	. Menginventarisir belanja dalam rangka efisiensi anggaran, dengan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan memiliki output terukur dalam menunjang indikator kinerja perangkat daerah 2. Melakukan penyesuaian

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
										aktivitas kinerja dalam pencapaian program, untuk kemudian diformulasikan pada Renja Perubahan Tahun 2025
	2.14.02.1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase ketercapaian kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Pend (Persen)	100,00	5,42	5,42			
	2.14.02.1.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	85,00	85,00			
	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
				Angka prevalensi kontrasepsi moden/ Modern Contracetive (mCPR) (Persen)	61,87	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Efisiensi Anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025, SE Sekda No 3 Tahun Provinsi Banten Tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke daerah dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025, Surat Sekda No. B 900.1.3.10/245/EKBANG/2025 tentang Reviu APBD TA 2025	1. Menginventarisir belanja dalam rangka efisiensi anggaran, dengan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan memiliki output terukur dalam menunjang indikator kinerja perangkat daerah 2. Melakukan penyesuaian aktivitas kinerja dalam pencapaian program, untuk kemudian diformulasikan pada Renja Perubahan Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.14.03.1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase ketercapaian kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk (Persen)	100,00	37,20	37,20			
	2.14.03.1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pemb (Persen)	100,00	17,84	17,84			
	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Spesific Fertility Rate/ASFR) (Nilai)	8,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Efisiensi Anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025, SE Sekda No 3 Tahun Provinsi Banten Tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke daerah dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025, Surat Sekda No. B 900.1.3.10/245/EKBANG/2025 tentang Reviu APBD TA 2025	1. Menginventarisir belanja dalam rangka efisiensi anggaran, dengan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan memiliki output terukur dalam menunjang indikator kinerja perangkat daerah 2. Melakukan penyesuaian aktivitas kinerja dalam pencapaian program, untuk kemudian diformulasikan pada Renja Perubahan Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.14.04.1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase ketercapaian kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Persen)	100,00	46,98	46,98			
	2.14.04.1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase ketercapaian kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui P (Persen)	100,00	82,04	82,04			
2.4	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA								
		UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak								
	2.08.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD PPA (Persen)	100,00	30,56	30,56	SANGAT RENDAH	Efisiensi Anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025, SE Sekda No 3 Tahun Provinsi Banten Tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke daerah dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025, Surat Sekda No. B 900.1.3.10/245/EKBANG/2025 tentang Reviu APBD TA 2025	1. Menginventarisir belanja dalam rangka efisiensi anggaran, dengan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan memiliki output terukur dalam menunjang indikator kinerja perangkat daerah 2. Melakukan penyesuaian aktivitas kinerja dalam pencapaian program, untuk kemudian diformulasikan pada Renja Perubahan Tahun 2025
	2.08.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan administrasi barang milik daerah pada UPTD PPA (Persen)	100,00	72,91	72,91			
	2.08.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan Administrasi Kepegawaian Pada UPTD PPA (Persen)	100,00	7,99	7,99			
	2.08.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan Administrasi Umum Pada UPTD PPA (Persen)	100,00	43,68	43,68			
	2.08.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD PPA (Persen)	100,00	23,21	23,21			
	2.08.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPA (Persen)	100,00	50,00	50,00			
	2.08.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100,00	10,52	10,52			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Pemerintah Daerah pada UPTD PPA (Persen)						
	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
				Persentase cakupan perempuan korban kekerasan dan perilaku salah lainnya yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Efisiensi Anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025, SE Sekda No 3 Tahun Provinsi Banten Tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke daerah dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025, Surat Sekda No. B 900.1.3.10/245/EKBANG/2025 tentang Reviu APBD TA 2025	1. Menginventarisir belanja dalam rangka efisiensi anggaran, dengan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan memiliki output terukur dalam menunjang indikator kinerja perangkat daerah 2. Melakukan penyesuaian aktivitas kinerja dalam pencapaian program, untuk kemudian diformulasikan pada Renja Perubahan Tahun 2025
	2.08.03.1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kegiatan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah K (Persen)	100,00	52,34	52,34			
	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
				Persentase cakupan anak korban kekerasan dan perilaku salah lainnya yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Efisiensi Anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025, SE Sekda No 3 Tahun Provinsi Banten Tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke daerah dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025, Surat Sekda No. B 900.1.3.10/245/EKBANG/2025 tentang Reviu APBD TA 2025	1. Menginventarisir belanja dalam rangka efisiensi anggaran, dengan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan memiliki output terukur dalam menunjang indikator kinerja perangkat daerah 2. Melakukan penyesuaian

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
										aktivitas kinerja dalam pencapaian program, untuk kemudian diformulasikan pada Renja Perubahan Tahun 2025
	2.08.07.1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi (Persen)	100,00	45,63	45,63			
2.5	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
		DINAS KETAHANAN PANGAN								
		DINAS KETAHANAN PANGAN (UNIT INDUK)								
	2.09.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	53,19	53,19	RENDAH	Tidak ada,karena bersipat Rutin	akan melaksanakan sesuai dengan target triwulannan yg di tetapkan
	2.09.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Persen)	100,00	36,74	36,74			
	2.09.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah (Persen)	100,00	59,92	59,92			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.09.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	7,76	7,76			
	2.09.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	38,52	38,52			
	2.09.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100,00	28,48	28,48			
	2.09.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersusunnya seluruh laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Persen)	100,00	40,70	40,70			
	2.09.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	7,29	7,29			
	2.09.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN							
				Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	adanya pengurangan anggaran pada saat efisiensi dan perubahan anggaran mamin, honorarium dan perjalanan dinas, sampai dengan tiwulan ini sudah melaksanakan Pengolahan Data CPCL infrastruktur logistik	pelaksanaan kegiatan akan dilakukan setelah pengesahan perubahan anggran
	2.09.02.1.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai	100,00	16,71	16,71			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi (Persen)						
	2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							
				Skor Pola Pangan Harapan (Persen)	88,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	- sub keg Penyediaan dan Penyaluran Pangan adanya pergeseran dan perubahan anggaran - sub keg CPP proses pengadaan komoditas ayam dan telur sedang dalam tahap proses negosiasi dengan penyedia - sub Keg Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi pelaksanaan goes to ponpes belum dilaksanakan karena belum ada penetapan plh pptk,	kegiatan akan dilaksanakan triwulan berikut nya, dan untuk yang perubahan anggaran akan dilaksanakan setelah penetapan anggaran perubahan
	2.09.03.1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pas (Persen)	100,00	39,85	39,85			
	2.09.03.1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi (Persen)	100,00	77,57	77,57			
	2.09.03.1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka	Persentase Ketercapaian Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai	100,00	33,96	33,96			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi (Persen)						
	2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							
				Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (Persen)	72,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	tidak ada masalah, target persiapan pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyaluran Cadangan Pangan di Daerah Rentan Rawan Pangan sudah dilaksanakan	melaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan
	2.09.04.1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi (Dokumen)	1,00	25,23	2.523,00			
	2.09.04.1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	5,00	4,97	99,32			
	2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							
				Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (Persen)	75,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tidak ada, sudah melaksanakan proses penerbitan / pembuatan rekomendasi	menerbitkan dan membuat rekomendasi lanjutan sampai dengan akhir tahun anggaran 202
	2.09.05.1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Persen)	100,00	22,21	22,21			
		UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.09.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	20,00	20,00	SANGAT RENDAH	Tidak ada,karena bersipat Rutin	akan melaksanakan sesuai dengan target triwulannan yg di tetapkan
	2.09.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan (%)	100,00	33,34	33,34			
	2.09.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan (%)	100,00	30,81	30,81			
	2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							
				Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (Persen)	75,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	adanya pergeseran dan perubahan anggaran pada kegiatan Sertifikasi Keamanan dan Mutu, Rekomendasi Perizinan keamanan, Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	kegiatan akan ditindak lanjuti setelah penetapan perubahan anggaran 2025
	2.09.05.1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan (%)	100,00	38,55	38,55			
2.6	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
		DINAS LINGKUNGAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		HIDUP DAN KEHUTANAN								
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (UNIT INDUK)								
	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (persen)	100,00	56,34	56,34	RENDAH	Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan (Roda 2) karena kesalahan teknis pada saat pemesanan e-katalog, Yang akan di realisasikan pada bulan Agustus.	Pelaksanaan akan d realisasikan pada bulan Agustus melalui pemesanan e-katalog
	2.11.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	33,65	33,65			
	2.11.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100,00	64,10	64,10			
	2.11.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Persen)	100,00	34,72	34,72			
	2.11.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	3,27	3,27			
	2.11.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	44,25	44,25			
	2.11.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100,00	40,20	40,20			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Pemerintahan Daerah (Persen)						
	2.11.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	8,81	8,81			
	2.11.02		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP							
				Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan Indikator Program Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Yang Berkualitas adalah 100% pada Triwulan IV Pada Triwulan II, tahapan adalah pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan KLHS dan pemantauan evaluasi KLHS	Triwulan III adalah pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan KLHS dan pemantauan evaluasi KLHS (asistensi dan validasi KLHS RPJMD Kabupaten/Kota)
	2.11.02.1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kajian Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi (Dokumen)	2,00	38,95	1.947,50			
	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
				Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Persen)	71,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Pada triwulan II telah melaksanakan kegiatan pemantauan udara Ambien dan melaksanakan upaya mitigasi perubahan iklim melalui pembinaan teknis Proklam	Persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target pada triwulan 3

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.11.03.1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (dokumen)	3,00	24,65	821,70			
	2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							
				Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Persen)	14,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Pada triwulan 2 tidak ada target dan aktifitas karena adanya perubahan anggaran (efisiensi)	Persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai target pada triwulan 3
	2.11.04.1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi (persen)	100,00	13,53	13,53			
	2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							
				Persentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3 (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Triwulan II, realisasi Sosialisasi Industri Yang Persetujuan Teknis dan Rincian Teknis TPS dan LB3 di Keluarkan Oleh DLHK PROV BANTEN dilaksanakan sebanyak 1 kali, realisasi Rapat Pembahasan Muatan Rincian Teknis Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebanyak 2 kali dan rapat Coaching Clinic Pengelolaan Limbah B3 sebanyak 1 kali	akan dilakukan Rapat Pembahasan Muatan Rincian Teknis Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 pada triwulan III
	2.11.05.1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah dokumen laporan Pengelolaan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	2,00	72,72	3.636,25			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				(satu) Daerah Provinsi (dokumen)						
	2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
				Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup (Persen)	90,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Realisasi pada Program Pembinaan dan Pengawasan baru dapat dihitung pada Triwulan IV, karena merupakan akumulasi dari seluruh kegiatan pada program pembinaan dan pengawasan. Dimana pada Triwulan I dan II kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pengawasan penataan lingkungan hidup. Adapun pada Triwulan II dilakukan pengawasan dengan fokus pada usaha dan/atau kegiatan terkait Limbah B3 sesuai arahan Menteri LH.	Adapun untuk Triwulan III akan dilaksanakan kegiatan yakni: pengawasan dan penataan lingkungan hidup; dan sosialisasi Permen LHK 14/2024 kepada 120 pelaku usaha dan/atau kegiatan. Untuk perhitungan realisasi program tetap baru dapat dihitung pada Triwulan IV.
	2.11.06.1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Persen)	100,00	28,58	28,58			
	2.11.07		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			TERKAIT DENGAN PPLH							
				Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH (Persen)	11,76	11,76	100,00	SANGAT TINGGI	-	-
	2.11.07.1.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Ketercapaian Jumlah Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampinga (lembaga)	4,00	80,11	2.002,80			
	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
				Presentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Persen)	100,00	50,00	50,00	SANGAT RENDAH	-	-
	2.11.08.1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	2.11.09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaga/7)	68,00	74,66	109,79	SANGAT TINGGI	-	-
	2.11.09.1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Lembaga/)	68,00	75,00	110,29			
	2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							
				Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Realisasi pada Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup baru dapat dihitung pada Triwulan IV, karena merupakan akumulasi dari seluruh kegiatan pada program penanganan pengaduan lingkungan hidup. Dimana pada Triwulan I dan II kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya: penanganan dan pengelolaan pengaduan lingkungan hidup; verifikasi dan penerapan sanksi administrasi; dan koordinasi serta sinkronisasi pengelolaan pengaduan lingkungan hidup tingkat Provinsi Banten.	Adapun untuk Triwulan III akan dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu: penanganan dan pengelolaan pengaduan lingkungan hidup melalui verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan serta audiensi/ekspose/mediasi; dan verifikasi dan penerapan sanksi administrasi. Untuk perhitungan realisasi program tetap baru dapat dihitung pada Triwulan IV.
	2.11.10.1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi (Persen)	100,00	35,73	35,73			
	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase penanganan sampah sesuai kewenangan provinsi (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Triwulan II untuk program ini ada 1 rapat kegiatan. triwulan III ini telah dilakukan Rapat Pembinaan Paguyuban Bank Sampah.dengan peserta dari kab/kota. namun berdasarkan hasil diskusi, masih rendahnya kesadaran dan perilaku minim sampah dari masyarakat iu sendiri	perlu dilakukan Rapat Pembinaan Paguyuban Bank Sampah secara berkala kepada paguyuban bank sampah
	2.11.11.1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (Persen)	100,00	6,65	6,65			
3	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.1	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN								
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (UNIT INDUK)								
	3.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							
				Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan (Persen)	25,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Triwulan II untuk Program Pengelolaan Hutan adalah 0 (nol). Namun untuk mendukung ketercapaian Program dilaksanakan Kegiatan Konsultasi, Koordinasi Pembinaan dan Monitoring di setiap kegiatan terkait dengan Pengelolaan Hutan. Selain itu dilaksanakan juga Bimtek Budidaya Lebah Madu dan Jamur Tiram, Rapat PPTPKH, Rapat RTnRL, Rapat Pengendalian PBPHH serta Fasilitasi NIB di Kab. Pandeglang	Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung ketercapaian targe tkinerja Program Pengelolaan Hutan dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan anggaran kas pada DPA Perubahan TA. 2026

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3.28.03.1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Ketercapaian Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (dokumen)	2,00	35,88	1.794,17			
	3.28.03.1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (dokumen)	1,00	10,36	1.036,50			
	3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Tersedianya dokumen rencana Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (Persen)	1,00	57,87	5.786,67			
	3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Ketercapaian Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani dan Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi (Unit)	19,00	34,60	182,10			
	3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Ketercapaian Jumlah Unit Management yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah dan Jumlah Per (Unit)	2,00	36,70	1.835,01			
	3.28.04		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA							
				Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun (Persen)	28,00	28,00	100,00	SANGAT TINGGI	tidak ada kendala kegiatan dilaksanakan sesuai target pada triwulan 2	kegiatan dilaksanakan sesuai target

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Persen)	100,00	57,00	57,00			
	3.28.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN							
				Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun (Kelompok)	52,00	32,00	61,54	RENDAH	Untuk kegiatan di Triwulan II tidak ada kendala, semua kegiatan sudah terlaksana sesuai ROK. Namun dikarenakan ada efisiensi anggaran, jadi untuk target anggaran ada yang tidak sesuai dengan anggaran perubahan.	Sebaiknya ada penyesuaian target anggaran dan pembobotan dikarenakan ada efisiensi anggaran.
	3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Persen)	100,00	51,97	51,97			
	3.28.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)							
				Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun (Persen)	20,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Realisasi program Pengelolaan Derah Aliran Sungai (DAS) baru dapat dihitung pada Triwulan IV, karena merupakan akumulasi dari seluruh kegiatan pada program pengelolaan DAS. Adapun pada Triwulan II kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di Kab. Lebak, Kab.	Adapun untuk Triwulan III akan dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu : Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kegiatan pengelolaan DAS pada Bulan Juli (Kabupaten Pandeglang), Bulan Agustus (Kabupaten Serang) dan pada Bulan September (Kabupaten

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
									Pandeglang dan Kab. Serang serta Rapat Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC)	Tangerang) serta Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS pada Bulan Agustus
	3.28.06.1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Persen)	100,00	23,12	23,12			
3	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
3.1	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN								
		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang								
	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Peningkatan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	26,66	26,66	SANGAT RENDAH	Pelaksanaan kegiatan triwulan II sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana operasional kegiatan dan angkas TA. 2025, adapun untuk realisasi fisik dan keuangan sudah sesuai dengan LRA.	Koordinasi dengan sub bagian keuangan dan PEP
	2.11.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada CDLHK Lebak Tangerang (Persen)	100,00	46,01	46,01			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.11.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK Lebak Tangerang (Persen)	100,00	83,19	83,19			
	2.11.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK Lebak Tangerang (persen)	100,00	121,34	121,34			
3	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.1	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN								
		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang								
	3.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							
				Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan tangerang (Ha)	2.500,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	- Anggaran untuk Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat telah di Refocusing - Belanja Perjalanan Dinas untuk mendukung kegiatan Penghijauan Lingkungan telah di Refocusing 50% - Belanja Perjalanan Dinas untuk Pembinaan dan Pengawasan RHL telah di Refocusing 50% - Belanja Perjalanan Dinas untuk mendukung kegiatan Rehabilitasi Mangrove telah di Refocusing 50%	- Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat tidak akan dilaksanakan - untuk belanja Perjalanan Dinas kegiatan Penghijauan Lingkungan akan dilaksanakan di TW IV agar bisa menunjang untuk pelaksanaan kegiatan Penghijauan lingkungan dan di sesuaikan dengan SPD dan sisa anggaran yang tersedia - menyesuaikan sisa anggaran dan SPD Triwulan yang tersedia untuk bisa melaksanakan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
										monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Mangrove
	3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-LT) (Persen)	100,00	11,78	11,78			
	3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provi (Dokumen)	1,00	75,04	7.504,00			
	3.28.04		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA							
				Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (Kelompok)	12,00	12,00	100,00	SANGAT TINGGI	Kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan, ada beberapa aktifitas yang terdampak efisiensi.	
	3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species)	Ketercapaian Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES Wilayah Le (Laporan)	1,00	71,50	7.150,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			untuk Kewenangan Daerah Provinsi							
	3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT) (Persen)	100,00	38,91	38,91			
3	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
3.1	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN								
		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon								
	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Peningkatan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	60,92	60,92	RENDAH	Tidak ada	Tidak ada
	2.11.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ada CDLHK Pandeglang Serang Cilegon (Persen)	100,00	51,23	51,23			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.11.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK PSC (Persen)	100,00	55,40	55,40			
	2.11.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK PSC (Persen)	100,00	65,57	65,57			
3	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.1	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN								
		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon								
	3.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							
				Luas Lahan Kritis yang Terehabilitasi seluas 2.500 Hektar pertahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (Ha)	2.500,00	5,00	0,20	SANGAT RENDAH	Target fisik belum realisasi di karenakan sebagian anggaran kasnya di triwulan3, dan 4	1. Koordinasi dengan BAPPEDA Prov. Banten 2. koordinasi dengan Kasubag PEP DLHK prov. Banten
	3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC) (Persen)	100,00	14,98	14,98			
	3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi	1,00	0,00	0,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Kewenangan Provi (Dokumen)						
	3.28.04		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA							
				Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon (Kelompok)	12,00	6,00	50,00	SANGAT RENDAH	terkendala dengan anggaran yang sudah diefisiensikan	menyesuaikan target anggaran kas sesuai DPA Perubahan
	3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES wilayah Pa (Laporan)	1,00	0,00	0,00			
	3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC) (Persen)	100,00	10,38	10,38			
3	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
3.1	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		UPTD Laboratorium Lingkungan								
	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Peningkatan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	89,57	89,57	TINGGI	Telah dilaksanakan di TW II : a. Triwulan II Keg_Adum Realisasi Realisasi Rp. 249.489.672,- : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Realisasi Rp. 15.715.500,- ; b. Triwulan II Keg_Pemeliharaan Realisasi Rp. 165.754.270,- - Koordinasi dan Konsultasi SKPD Efisiensi Rp. 17.698.000,- ; - Pemeliharaan Alat Laboratorium Efisiensi Rp. 76.500.000,-;	Pelaksanaan Keg_Adum di TW III dan TW IV; - Fasilitas Tim Asesor Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Nilai Rp. 6.200.000,- dilaksanakan bulan Sep 2025; - Sewa Hotel Rp. 3.600.000,- dilaksanakan bulan Sep 2025; Pelaksanaan Keg_Pemeliharaan di TW III dan TW IV; - Servis R4 2 termin, Pajak R4 tinggal pelaksanaan bln Sep & Nop 2025; - Servis R2 1 termin, Pajak R2 dilaksanakan bln Okt 2025. Rehabilitasi Pemeliharaan Sapras - AC 8 Unit telah dilaksanakan bulan Juni.
	2.11.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Lab Lingkungan (Persen)	100,00	86,52	86,52			
	2.11.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan (Persen)	100,00	84,00	84,00			
	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
				Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan (Persen)	22,50	58,23	258,80	SANGAT TINGGI	Triwulan II telah dilaksanakan -Pengambilan contoh uji yang telah dilakukan pada triwulan II sebanyak 89 paket dengan target tahun 2025 sebanyak 124 paket; -Sosialisasi pelayanan pada UPTD Laboratorium Lingkungan pada pelaku usaha/dan atau Kegiatan; -Pelaksanaan rapat audit internal sebagai persiapan surveillance yang akan datang; -Pembelian bahan Kimia; Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Surveillance.	Triwulan III yang akan dilaksanakan -Pengambilan sampel triwulan II sebanyak 20 paket; -Pelaksanaan surveillance tahun 2025 pada bulan September 2025; -Pembelian Spanduk Kegiatan.
	2.11.03.1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Ketercapaian Jumlah dokumen peningkatan akreditasi pada UPTD Lab Lingkungan (Dokuman)	2,00	60,05	3.002,53			
	2.11.03.1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Kepada Masyarakat pada UPTD Laboratorium Lingkungan Provinsi Banten (Dokumen)	2,00	34,46	1.723,00			
		UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan								
	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Peningkatan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	50,03	50,03	RENDAH	Target Program di TW II Sebesar 22.52 dan tercapai 22.52 telah dilaksanakan pembayaran tagihan listrik dan internet, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, Pembelian isi tabung gas, pembayaran koran, pembayaran jasa tenaga kebersihan dan jasa tenaga keamanan, pemeliharaan AC, Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (3 unit) dan pemeliharaan Roda 2 (3 unit)	pelaksanaan pada Realisasi TW II kegiatan program Pemerintah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sudah dilaksanakan sesuai dengan ROK
	2.11.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD SPTH (Persen)	100,00	35,14	35,14			
	2.11.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada (UPTD SPTH) (Persen)	100,00	51,41	51,41			
	2.11.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD SPTH (Persen)	100,00	24,99	24,99			
3	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.1	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN								
		UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan								
	3.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							
				Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan	90,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Bibit pengiriman dari PP Rumpin banyak yang rusak selama proses pengiriman sehingga memerlukan	Berkoordinasi dengan PP Rumpin Bogor untuk dapat memperbaiki penyusunan bibit sehingga tdk

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				yang dibagikan ke masyarakat (Persen)					perawatan 1 hingga 2 bulan sebelum didistribusikan ke pemohon	mengalami kerusakan yang berarti selama proses pengiriman.
	3.28.03.1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan (Persen)	100,00	32,08	32,08			
3	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
3.1	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN								
		UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten								
	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Peningkatan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	27,97	27,97	SANGAT RENDAH	Kegiatan Pemeliharaan BMD dan Keg Pengadaan BMD salah satu kegiatan yang terkena Efisiensi dan Perubahan Pergeseran anggaran Kas sehingga di triwulan II sebagian kegiatan belum bisa dilaksanakan.	Menunggu Perubahan DPA selanjutnya dan berkoordinasi dengan PEP DLHK Provinsi Banten
	2.11.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten (Persen)	100,00	70,35	70,35			
	2.11.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten (Persen)	100,00	7,66	7,66			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.11.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada (UPTD Pengelolaan Tahura Banten) (Persen)	100,00	39,19	39,19			
	2.11.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD SPTH (Persen)	100,00	67,50	67,50			
3	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.1	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN								
		UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten								
	3.28.04		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA							
				Persentase Pengelolaan TAHURA Banten (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Realisasi sesuai target capaian kinerja Triwulan II	-
	3.28.04.1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi (Persen)	100,00	37,72	37,72			
3	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
3.1	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
	2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	55,95	55,95	RENDAH		
	2.13.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	42,08	42,08			
	2.13.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100,00	51,54	51,54			
	2.13.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Persen)	100,00	24,21	24,21			
	2.13.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	100,00	100,00			
	2.13.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	43,83	43,83			
	2.13.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	99,27	99,27			
	2.13.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	45,45	45,45			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.13.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	51,46	51,46			
	2.13.02		PROGRAM PENATAAN DESA							
				Cakupan Jumlah Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa (Desa)	69,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	-	Penetapan capaian target ditetapkan pada triwulan IV (empat)
	2.13.02.1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat (Persen)	100,00	36,91	36,91			
	2.13.03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA							
				Persentase desa yang melakukan kerjasama (Persen)	1,19	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	-	Penetapan Capaian Target ditetapkan pada Triwulan IV (empat) Tahun 2025
	2.13.03.1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi (Persen)	100,00	5,10	5,10			
	2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
				Persentase fasilitasi administrasi pemerintahan desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang (Persen)	6,41	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	-	Penetapan Capaian Target Kinerja Program ditetapkan pada Triwulan IV (empat) tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.13.04.1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Persen)	100,00	40,17	40,17			
	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
				Cakupan jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat di desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang (Desa)	69,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	-	Penetapan Target Kinerja Program ditetapkan pada Triwulan IV (empat) Tahun 2025
	2.13.05.1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pe (Persen)	100,00	23,55	23,55			
3.2	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
		DINAS PERHUBUNGAN								
		DINAS PERHUBUNGAN (UNIT INDUK)								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	52,89	52,89	RENDAH		
	2.15.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	9,01	9,01			
	2.15.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100,00	58,66	58,66			
	2.15.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Persen)	100,00	79,06	79,06			
	2.15.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	2.15.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	73,95	73,95			
	2.15.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	16,20	16,20			
	2.15.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	49,02	49,02			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.15.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	59,32	59,32			
	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							
				Persentase pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	2.15.02.1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan Persentase Ketercapaian Kegiatan Persentase pelaksanaan MRLL d (Persen)	100,00	67,16	67,16			
				Persentase pelaksanaan MRLL dan penyediaan, pemeliharaan jalan (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	2.15.02.1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan Persentase Ketercapaian Kegiatan Persentase pelaksanaan MRLL d (Persen)	100,00	52,97	52,97			
	2.15.02.1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu	100,00	12,00	12,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi (%)						
				Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi (Persen)	50,00	3,00	6,00	SANGAT RENDAH		
	2.15.02.1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (Persen)	100,00	60,82	60,82			
	2.15.02.1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	- (Persen)	0,00	30,48	∞			
				persentase perencanaan transportasi yang diterapkan (Persen)	50,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	2.15.02.1.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provin (Persen)	100,00	51,00	51,00			
				Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas (Persen)	20,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	2.15.02.1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan (Persen)	100,00	95,66	95,66			
				Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal (Persen)	40,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	2.15.02.1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Persen)	100,00	82,61	82,61			
	2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	2.15.03.1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (Persen)	100,00	93,47	93,47			
				Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	2.15.03.1.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	- (Persen)	0,00	27,12	∞			
	2.15.05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN							
				Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	2.15.05.1.06		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Presentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi (Persen)	100,00	39,26	39,26			
		UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	29,79	29,79	SANGAT RENDAH	tidak ada	dilaksanakan sesuai jadwal
	2.15.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan) (Persen)	100,00	45,43	45,43			
	2.15.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	89,06	89,06			
	2.15.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan) (Persen)	100,00	49,81	49,81			
	2.15.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	53,13	53,13			
	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							
				Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi (Persen)	75,00	16,07	21,43	SANGAT RENDAH	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.15.02.1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (Persen)	100,00	64,40	64,40			
3.3	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN								
	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	50,00	50,00	SANGAT RENDAH	tidak terealisasinya pekerjaan paket pengadaan mebel, peralatan mesin (Laptop,dan printer) dikarenakan spesifikasi dan harga yang tidak sesuai	paket pekerjaan pengadaan mebel dan peralatan mesin lainnya akan dilakukan penyesuaian pada APBD Perubahan. kegiatan yang telah dilaksanakan: 1. Penyusunan Renja Perubahan TA 2025 2. Pengumpulan data sektoral kominfo 3. Pengiriman pendidikan dan pelatihan pegawai 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
	2.16.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	51,54	51,54			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.16.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100,00	57,37	57,37			
	2.16.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Persen)	100,00	57,98	57,98			
	2.16.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	100,00	100,00			
	2.16.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	39,95	39,95			
	2.16.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	18,19	18,19			
	2.16.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	51,25	51,25			
	2.16.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	37,08	37,08			
	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Output yang belum/tidak dilaksanakan: 1. Koordinasi dalam rangka diseminasi informasi Kendala: sudah diefisiensi 2. Penyusunan dokumen strategi komunikasi publik Kendala: sudah dihapus pada saat efisiensi	Akan dilakukan penyesuaian pada APBD Perubahan Kegiatan yang sudah dilaksanakan: +Fasilitasi pressroom, Penyusunan konten +Penyusunan e-magazine Menara Banten +Penguatan kapasitas SDM Komunikasi Publik +Sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik +Promosi dan Publikasi Penyebaran Informasi Pembangunan melalui berbagai media +Majalah Menara Banten +Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi +Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat dan lainnya.
	2.16.02.1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi (Persen)	100,00	75,81	75,81			
				Persentase OPD yg mencapai katagori INFORMATIF (Persen)	48,48	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Output yang belum/tidak dilaksanakan: Permohonan informasi publik yang diselesaikan (pemohon) Kendala: rapat persiapan sidang sudah diefisiensikan, perjalanan dinas pada anggaran murni bulan juni sudah diefisiensikan berubah ke bulan juli	Akan dilakukan penyesuaian pada APBD Perubahan
	2.16.02.1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi (Persen)	100,00	42,61	42,61			
	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			APLIKASI INFORMATIKA							
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet (Persen)	96,97	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Output yang belum/tidak dilaksanakan: tidak ada	Kegiatan yang sudah dilaksanakan: +Penyediaan Akses Internet di KP3B +Penyediaan Akses Internet untuk Unit Kerja OPD dan Sekolah diwilayah Kota Serang +Penyediaan Akses Internet untuk Unit Kerja OPD dan Sekolah diwilayah Kabupaten Serang +Penyediaan Akses Internet untuk Unit Kerja OPD dan Sekolah diwilayah Kota Cilegon +Penyediaan Akses Internet untuk Unit Kerja OPD dan Sekolah diwilayah Kabupaten Pandeglang +Penyediaan Akses Internet untuk Unit Kerja OPD dan Sekolah diwilayah Kabupaten
	2.16.03.1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi (Persen)	100,00	43,22	43,22			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Output belum dilaksanakan: -Sosialisasi Arsitektur & Peta Rencana SPBE Kendala: Rapat Persiapan tidak dilaksanakan karena efisiensi anggaran -Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dgn arsitektur dan peta rencana SPBE Kendala: penyesuaian output sub keg. diubah dari 200 aplikasi/thn menjadi 12 Aplikasi/thn -Rencana Penyelenggaraan Smart Province & Smart City Kendala: cetak dokumen & Laporan Hasil Sosialisasi mengikuti angkas pergeseran	akan dilakukan penyesuaian di APBD Perubahan Kegiatan yang sudah dilaksanakan: +Penyediaan Lisensi Penyelenggaraan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah +Analisis dan Implementasi Aplikasi yang terhubung dengan SPLP +Evaluasi dan Implementasi Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah +Koordinasi Identifikasi dan Integrasi Aplikasi Layanan Administrasi Pemerintahan +Koordinasi Identifikasi dan Integrasi Aplikasi Layanan Publik +Pengelolaan Pusat Data +Pengelolaan Network Ope
	2.16.03.1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi (Persen)	100,00	77,87	77,87			
	2.16.03.1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi (Persen)	100,00	46,82	46,82			
3.4	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							
				Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Output yang belum/tidak dilaksanakan: -Bimbingan Teknis Pra Forum Data -Bimbingan Teknis Forum Data Kendala: sudah dialihkan outpunya ke PEP -Bimbingan Teknis Penyelenggaraan EPSS Tahun 2025 kendala: tidak dilaksanakan penilaian EPSS untuk th 2025 -Pengembangan Infrastruktur Sistem Database SDI Provinsi Banten, kendala: telah dilakukan efisiensi (tidak menjadi prioritas) -Pengembangan Sistem Satu Data, kendala: telah dilakukan efisiensi	koordinasi dengan PEP (sekretariat) Kegiatan yang sudah dilaksanakan: +Bimbingan Teknis Statistik Sektoral OPD diganti nama kegiatannya menjadi Pembinaan Walidata terhadap produsen data +Pembinaan Penyelenggaraan SDI Tk Daerah +Pemanfaatan Data dalam Penyelenggaraan Pemerintah
	2.20.02.1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi (Persen)	100,00	43,14	43,14			
3.5	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN								
	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Persen)	74,60	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Output yang belum/tidak dilaksanakan: -Edukasi Keamanan Informasi kendala: tidak ada	Akan dilakukan penyesuaian pada APBD Perubahan Kegiatan yang sudah dilaksanakan: +Penyusunan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Provinsi Banten +Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik +Pelatihan Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi +Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi +Penilaian Indeks KAMI +Koordinasi CSIRT Pemerintah Provinsi Banten +Pengembangan Infrastruktur Keamanan Informasi +Sterilisasi Penginderaan Ruang
	2.21.02.1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi (Persen)	100,00	43,11	43,11			
	2.21.02.1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi (Persen)	100,00	4,19	4,19			
3.6	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
	2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (persen)	100,00	22,49	22,49	SANGAT RENDAH		
	2.17.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	36,04	36,04			
	2.17.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100,00	47,96	47,96			
	2.17.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Persen)	100,00	6,18	6,18			
	2.17.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	11,68	11,68			
	2.17.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	37,64	37,64			
	2.17.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	5,82	5,82			
	2.17.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	51,46	51,46			
	2.17.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100,00	31,68	31,68			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Pemerintahan Daerah (Persen)						
	2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							
				Persentase Koperasi Aktif (persen)	25,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	2.17.03.1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntab (Unit)	400,00	42,79	10,70			
	2.17.03.1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi (Unit)	400,00	34,49	8,62			
	2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							
				Persentase peningkatan Diklat SDM perkoperasian (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	2.17.05.1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Diklat SDM Perkoperasian (orang)	400,00	42,80	10,70			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
	2.17.06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							
				Persentase Koperasi Yang mendapatkan kemudahan Akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbankan) (%)	25,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	2.17.06.1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbankan) (Unit)	400,00	32,70	8,17			
	2.17.07		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							
				Persentase Usaha Kecil yang omsetnya meningkat (Persen)	5,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	2.17.07.1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemberdayaan Usaha Kecil (Unit)	457,00	28,40	6,22			
	2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase usaha kecil yang memperoleh kemudahan akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbankan) (persen)	25,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	2.17.08.1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah pengembangan Usaha Kecil yang berorientasi ke usaha menengah (Unit)	457,00	34,86	7,63			
3.7	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	67,99	67,99	SEDANG	Tidak ada permasalahan	Melaksanakan kegiatan Program penunjang urusan Pemerintah Daerah
	2.18.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	70,92	70,92			
	2.18.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah (Persen)	100,00	74,74	74,74			
	2.18.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah (Persen)	100,00	62,50	62,50			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.18.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	52,03	52,03			
	2.18.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	18,71	18,71			
	2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							
				Persentase Perencanaan Investasi Sektor Unggulan yang ditindaklanjuti (Persen)	95,45	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Belum ada target kinerja	Kegiatan yang sudah dilakukan : Penyusunan Draft Rapergub Turunan Perda Penanaman Modal
	2.18.02.1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi (Persen)	100,00	34,83	34,83			
				Persentase kegiatan usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal (Persen)	75,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan kegiatan karena adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025	Menyesuaikan jadwal pelaksanaan setelah Perubahan APBD TA. 2025
	2.18.02.1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	0,99	0,99			
	2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Presentase Minat Pelaku Usaha Penanaman Modal (Persen)	75,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Adanya efisiensi anggaran sesuai inpres no 1 Tahun 2025	Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan : - Menerima audiensi dari pelaku usaha terkait minat investasi di provinsi banten, antara lain pemanfaatan pengelolaan sampah; - Pengembangan kawasan industri di kabupaten serang - Forum diskusi Gubernur Banten dengan pelaku usaha di kawasan industri : Krakatau Steel, Cikupamas, dan Laksana - Pengembangan investasi alam sutra grup di Provinsi Banten
	2.18.03.1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi yang menjadi kewenangan daerah provinsi (Persen)	100,00	28,57	28,57			
	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							
				Tingkat Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan NSPK (Persen)	95,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Belum ada target kinerja	- Pelayanan perizinan on the spot ke kabupaten pandeglang - Pembuatan NIB di kawasan industri Cikupa, dan Kawasan Industri Laksana, dan Kawasan Industri Panca Puri; - Penilaian kinerja oleh BPKPM Ri untuk peningkatan pelayanan perizinan di daerah
	2.18.04.1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi	Persentase ketercapaian kegiatan penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi	100,00	28,72	28,72			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kewenangan Daerah Provinsi	kewenangan daerah provinsi (Persen)						
	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							
				Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan Realisasi Penanaman Modal (Persen)	75,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Efisiensi Anggaran. Kegiatan yang sudah dilaksanakan : - Bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait pelaporan LKPM; - Kinik investasi di kawasan Industri Pancapuri - Kota Cilegon - Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal di Kawasan Industri : Cikupa Mas, Laksana, dan Krakatau Steel; - Fasilitasi percepatan penyelesaian permasalahan perizinan dengan perangkat daerah Provinsi Banten; - Fasilitasi permasalahan developer PT. Bukit Nusa Indah Perkasa dengan BBWS C3 terkait Permen PUPR pada sempada	Melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan, penyelesaian hambatan penanaman modal, dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan
	2.18.05.1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi (Persen)	100,00	8,07	8,07			
	2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Persen)	75,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Belum ada target kinerja	Melaksanakan kegiatan yang menunjang program pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal : - Pengelolaan sistem perizinan - Pengelolaan sistem potensi penanaman modal
	2.18.06.1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi (Persen)	100,00	56,27	56,27			
3.8	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (UNIT INDUK)								
	2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	55,45	55,45	RENDAH	Terdapat beberapa aktivitas penunjang yang berdampak efesiensi anggaran	Sampai dengan Triwulan I telah dilaksanakan rapat persiapan dan belanja rutin dalam rangka mendukung pelayanan dinas yang terkait dengan aktivitas penunjang yang berdampak efesiensi anggaran akan dilakukan penyesuaian pada renja perubahan tahun 2025
	2.19.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	100,00	17,22	17,22			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)						
	2.19.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100,00	52,06	52,06			
	2.19.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	70,05	70,05			
	2.19.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	60,99	60,99			
	2.19.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	2.19.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	77,82	77,82			
	2.19.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	53,31	53,31			
	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							
				Persentase pemuda berprestasi dan pemuda yang mendapatkan pelayanan (%)	16,38	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Terdapat beberapa aktivitas penunjang yang terdampak efesiensi anggaran	Sampai dengan Triwulan I telah dilaksanakan rapat persiapan dan belanja rutin dalam rangka mendukung pelayanan dinas yang terkait dengan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
										aktivitas penunjang yang berdampak efesiensi anggaran akan dilakukan penyesuaian pada renja perubahan tahun 2025
	2.19.02.1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Jumlah Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan (Kegiatan)	8,00	44,09	551,14			
				Persentase pemuda dalam organisasi kepemudaan (%)	27,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Terdapat beberapa aktivitas penunjang yang berdampak efesiensi anggaran terutama pada aktivitas kegiatan dialog pengembangan manajemen kepemudaan	Sampai dengan Triwulan II telah dilaksanakan rapat persiapan dalam rangka mendukung kegiatan organisasi kepemudaan yang terkait dengan aktivitas penunjang yang berdampak efesiensi anggaran akan dilakukan penyesuaian pada renja perubahan tahun 2025
	2.19.02.1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi (Kegiatan)	2,00	30,32	1.515,80			
	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							
				Persentase Pembudayaan Masyarakat Olahraga (%)	46,00	41,00	89,13	TINGGI	Terdapat beberapa aktivitas penunjang yang berdampak efesiensi anggaran dan adanya beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan menunggu jadwal kementerian pemuda dan olahraga	Sampai dengan Triwulan II telah dilaksanakan rapat persiapan dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan daya saing keolahragaan yang terkait dengan aktivitas penunjang yang berdampak efesiensi anggaran akan dilakukan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
										penyesuaian pada renja perubahan tahun 2025
	2.19.03.1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (Kegiatan)	3,00	27,64	921,26			
				Persentase Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Lembaga Olahraga (%)	5,00	5,00	100,00	SANGAT TINGGI	Terdapat beberapa aktivitas penunjang yang berdampak efisiensi anggaran dan adanya beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan menunggu jadwal kementerian pemuda dan olahraga	Sampai dengan Triwulan II telah dilaksanakan rapat persiapan dan beberapa aktivitas pekerjaan dalam rangka mendukung kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan Lembaga Olahraga yang terkait dengan aktivitas penunjang yang berdampak efisiensi anggaran akan dilakukan penyesuaian pada renja perubahan tahun 2025
	2.19.03.1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (Kegiatan)	3,00	99,24	3.308,06			
				Persentase Peroleh Medali Emas Pada Event Nasional/ Internasional (%)	11,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Sampai dengan Triwulan II telah dilaksanakan rapat persiapan dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan dan pembudayaan keolahragaan yang terkait dengan aktivitas penunjang yang berdampak efisiensi anggaran akan dilakukan penyesuaian pada renja perubahan tahun 2025	Terdapat beberapa aktivitas penunjang yang berdampak efisiensi anggaran dan adanya beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan menunggu jadwal kementerian pemuda dan olahraga
	2.19.03.1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Kegiatan Kejuaraan Olahraga (Kegiatan)	3,00	14,07	469,11			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.19.03.1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (Kegiatan)	2,00	0,00	0,00			
	2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							
				Persentase anggota pramuka yang mendapatkan pelayanan (Persen)	86,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Terdapat beberapa aktivitas penunjang kegiatan kepramukaan yang berdampak efesiensi anggaran	Sampai dengan Triwulan II telah dilaksanakan rapat persiapan dalam rangka mendukung kegiatan kepramukaan yang terkait dengan aktivitas penunjang yang berdampak efesiensi anggaran akan dilakukan penyesuaian pada renja perubahan tahun 2025
	2.19.04.1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan (Kegiatan)	8,00	74,66	933,23			
		UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga								
	2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	55,45	55,45	RENDAH	Terdapat beberapa aktivitas penunjang yang berdampak efesiensi anggaran tetapi target capaian anggaran pada triwulan II telah tercapai.	Sampai dengan Triwulan II telah dilaksanakan beberapa aktivitas rutin seperti kegiatan rapat persiapan, belanja rutin yang mendukung pelayanan dinas, oleh sebab itu juga dilakukan penyesuaian pada renja perubahan tahun 2025
	2.19.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD	100,00	93,29	93,29			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Pembinaan dan Pelatihan Olahraga (Persen)						
	2.19.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga (Persen)	100,00	3,70	3,70			
	2.19.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga (Persen)	100,00	52,15	52,15			
	2.19.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga (Persen)	100,00	50,52	50,52			
	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							
				Persentase Pembinaan dan Pelatihan Olahraga (%)	30,70	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Terdapat beberapa aktivitas penunjang yang terdampak efesiensi anggaran dan adanya beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan menunggu jadwal kementerian pemuda dan olahraga	Sampai dengan Triwulan II telah dilaksanakan rapat persiapan dan pembinaan atlet dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan dan pelatihan olahraga dalam rangka menunjang peningkatan SDM atlet dan Perolehan Medali pada tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2.19.03.1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan O (Kegiatan)	1,00	75,16	7.516,00			
	2.19.03.1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga (Kegiatan)	3,00	29,01	967,00			
3.9	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN								
	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	49,41	49,41	SANGAT RENDAH	Tagihan untuk Sewa FHU dan pengharum ruangan melebihi anggaran pada triwulan II sehingga akan diajukan pada bulan Juli (triwulan 3), belanja Publikasi di efisiensi berdasarkan SE Plh Sekda No 21/2025 sebesar Rp. 127.850.000	Sesuaikan target dengan kebutuhan.
	2.23.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	44,20	44,20			
	2.23.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah (Persen)	100,00	55,81	55,81			
	2.23.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi	100,00	80,00	80,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Kepegawaian perangkat daerah (Persen)						
	2.23.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah (Persen)	100,00	37,11	37,11			
	2.23.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	28,34	28,34			
	2.23.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	44,99	44,99			
	2.23.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	31,56	31,56			
	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							
				Persentase Penambahan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Persen)	21,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	penambahan koleksi buku sudah mencapai 1% dari target tahunan 3%. dari pengadaan buku dengan Gramedia Asri Media sebanyak 132 Judul/396 Eksemplar dan Bumi Fiksi Ritel sebanyak 155 Judul/465 Eksemplar (Total 287 Judul/861 Eksemplar)	pengadaan koleksi masih terus dilakukan sampe dengan triwulan III.
	2.23.02.1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi (Persen)	100,00	41,24	41,24			
	2.23.02.1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembudayaan	100,00	35,74	35,74			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi (Persen)						
3.10	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN								
	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							
				Persentase arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi (Persen)	21,00	9,00	42,86	SANGAT RENDAH	untuk mencapai Persentase arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi DPK Provinsi Banten sudah melakukan Penelusuran Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga pada 7 (tujuh) lokasi, Sosialisasi Preservasi Arsip Keluarga Dilingkungan Provinsi Banten, Pendampingan Penyerahan dan Akuisisi Arsip Statis Perangkat Daerah ke 5 PD dan Penelusuran akuisisi Arsip Statis.	meningkatkan penelusuran arsip terjaga dan arsip statis serta meningkatkan sosialisasi preservasi arsip keluarga.
	2.24.02.1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi (Persen)	100,00	27,36	27,36			
	2.24.02.1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Arsip Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi (Arsip)	4,00	63,81	1.594,41			
	2.24.02.1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Ketercapaian Jumlah Pengguna Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi (Pengguna)	80.120,00	57,55	0,07			
	2.24.03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase Peningkatan Arsip statis Hasil Alih Media (Persen)	24,00	17,80	74,17	SEDANG	target triwulan II sebesar 6% dari capaian tahun lalu sebesar 58.624 yaitu 3.517, capaian triwulan II sudah Melebihi target sebesar 11,8% atau 6.921 arsip.	terus meningkatkan arsip hasil alih media
	2.24.03.1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Ketercapaian Jumlah Arsip Kegiatan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun (Arsip)	800,00	43,47	5,43			
	2.24.03.1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Ketercapaian Jumlah Arsip Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi (Arsip)	601,00	54,31	9,04			
3	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.1	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN								
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (UNIT INDUK)								
	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	53,55	53,55	RENDAH	Tidak ada	Tidak ada
	3.25.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	47,08	47,08			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3.25.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah (Persen)	100,00	53,96	53,96			
	3.25.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah (Persen)	100,00	7,17	7,17			
	3.25.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (Persen)	100,00	50,67	50,67			
	3.25.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah (Persen)	100,00	58,00	58,00			
	3.25.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (Persen)	100,00	12,48	12,48			
	3.25.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Persen)	100,00	52,29	52,29			
	3.25.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (Persen)	100,00	50,92	50,92			
	3.25.02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL							
				Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ter rehabilitasi dan terkonservasi (hektar) (Hektar)	2,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tidak ada	Ditindaklanjuti dengan kegiatan: 1. Identifikasi Calon Kawasan Konservasi 2. Inventarisasi seagrass 3. Sosialisasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut 4. Pertimbangan Teknis KKPR dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
										Ruang laut 5. Pelatihan Kulit Kerang
	3.25.02.1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Persen)	100,00	10,30	10,30			
	3.25.02.1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Persen)	100,00	44,44	44,44			
	3.25.02.1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Persen)	100,00	32,39	32,39			
	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							
				Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	125,00	109,00	87,20	TINGGI	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai Dengan 12 Mil adalah sebesar Rp 208.974.000,- dengan 2 sub kegiatan atau 7,13% dari total anggaran. Serta untuk Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi adalah sebesar Rp 840.000,- atau 1,8% dari total anggaran. Capaian produksi perikanan tangkap triwulan II adalah 16.642,13 ton atau sebesar 65,97% dari target triwulan II sebesar 25.228,10 ton.	Mendorong kabupaten/kota lainnya yang memiliki potensi perikanan tangkap untuk meningkatkan produksi

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3.25.03.1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil (Persen)	100,00	16,10	16,10			
	3.25.03.1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT (Persen)	100,00	11,72	11,72			
	3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (Persen)	100,00	9,37	9,37			
	3.25.03.1.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT (Persen)	100,00	6,00	6,00			
	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							
				Jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang terlayani Produksi Perikanan Budidaya (Unit)	120,00	176,00	146,67	SANGAT TINGGI	tidak terdapat permasalahan, capaian pelayanan usaha perikanan budidaya melebihi target berupa pelayanan sosialisasi sertifikasi CBIB maupun perizinan usaha budidaya	akan ditindak lanjuti dengan peningkatan kinerja pelayanan untuk mencapai target kinerja program budidaya
	3.25.04.1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah P (Persen)	100,00	60,14	60,14			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3.25.04.1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut (Persen)	100,00	3,96	3,96			
	3.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
				Luas Laut yang terawasi pelaku usaha perikanan yang terawasi (Mill)	550,00	252,66	45,94	SANGAT RENDAH	Mesin Kapal Latimeria dan SpeedBoat Rusak	Perbaiki Mesin Kapal Latimeria dan SpeedBoat, sehingga Pengawasan Laut dapat sesuai target dan optimal
	3.25.05.1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil (Persen)	100,00	13,79	13,79			
				pelaku usaha perikanan yang terawasi (Unit Usaha)	80,00	36,00	45,00	SANGAT RENDAH	capaian telah sesuai target	tidak ada
	3.25.05.1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pengawasan Kegiatan Sumber Daya Perikanan di Bidang Perikanan Tangkap, Budidaya dan Pengolahan Pemasaran Perikanan yang Dapat Diusah (Dokumen)	20,00	46,56	232,81			
	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							
				Jumlah sertifikat usaha pemasaran dan pengolahan perikanan Jumlah hasil uji mutu perikanan (Sertifikat)	180,00	282,00	156,67	SANGAT TINGGI	tidak ada permasalahan, Capaian pelayanan usaha pemasaran berupa sertifikasi kelaikan pengolahan dan pemasaran melebihi target TW II	akan di tindaklanjuti dengan melakukan pembinaan mutu (Sertifikat kelayakan Pengolahan) ke Unit Pengolahan Ikan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3.25.06.1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Persen)	100,00	42,88	42,88			
	3.25.06.1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Ketercapaian Jumlah Unit Usaha Kegiatan Pembinaan Standar Usaha dan Kemananan Jaminan Mutu Pangan (Unit usaha)	200,00	30,52	15,26			
	3.25.06.1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Persen)	100,00	22,97	22,97			
		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara								
	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	65,19	65,19	SEDANG	Dari kinerja yang ditargetkan 59,21 pada Tw II 57,75 hal ini disebabkan karena: 1. Adanya perubahan belanja pekerjaan dan pergeseran anggaran kas pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 2. Spj kegiatan Pemeliharaan, kontrak Administrasi umum dan kontrak Pengadaan masih dalam proses keuangan	1. Penyesuaian belanja pekerjaan dan Pergeseran Anggaran Kas sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya pada Perubahan Anggaran 2025 2. Fisik kegiatan pemeliharaan, Administrasi umum dan Pengadaan sudah dilaksanakan dan sudah dalam proses keuangan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3.25.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah (Persen)	100,00	58,20	58,20			
	3.25.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (Persen)	100,00	32,61	32,61			
	3.25.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Persen)	100,00	45,17	45,17			
	3.25.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (Persen)	100,00	70,88	70,88			
	3.25.02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL							
				Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ter rehabilitasi dan terkonservasi (hektar) (Hektar)	2,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tidak ada masalah tetapi adanya efisiensi anggaran pada sub kegiatan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	Tindak lanjut akan dilaksanakan dengan rencana aksi kinerja pada TW III yaitu: 1. Pelaksanaan Penanaman Vegetasi Pantai di Wilayah Utara 2. Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Atraktor Cumi di wilayah Utara Banten 3. Pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapang Pesisir wilayah Utara Banten
	3.25.02.1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Persen)	100,00	15,10	15,10			
	3.25.02.1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberdayaan	100,00	31,27	31,27			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Persen)						
	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							
				Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	125,00	75,00	60,00	RENDAH	tidak ada permasalahan	mendorong kabupaten/kota lainnya yang memiliki potensi perikanan tangkap untuk meningkatkan produksi
	3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	3.25.03.1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air (Persen)	100,00	0,00	0,00			
		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan								
	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	23,33	23,33	SANGAT RENDAH	Tidak dapat permasalahan, capaian pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah tercapai	Akan ditindaklanjuti dengan peningkatan kinerja pelayanan untuk mencapai target program penunjang urusan pemerintahan daerah

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3.25.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah (Persen)	100,00	59,63	59,63			
	3.25.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	3.25.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Persen)	100,00	3,13	3,13			
	3.25.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (Persen)	100,00	5,05	5,05			
	3.25.02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL							
				Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terehabilitasi dan terkonservasi (hektar) (Hektar)	2,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tidak ada	Tidak ada
	3.25.02.1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Persen)	100,00	76,08	76,08			
	3.25.02.1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Persen)	100,00	20,56	20,56			
	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							
				Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	125,00	75,00	60,00	RENDAH	Tidak ada	Tidak ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (Persen)	100,00	0,05	0,05			
	3.25.03.1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air (Persen)	100,00	65,52	65,52			
		UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan								
	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	56,54	56,54	RENDAH	tidak ada masalah	realisasi proses keuangan
	3.25.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah (Persen)	100,00	58,59	58,59			
	3.25.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (Persen)	100,00	40,15	40,15			
	3.25.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan jasa penunjang	100,00	50,00	50,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				urusan pemerintahan daerah (Persen)						
	3.25.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (Persen)	100,00	57,40	57,40			
	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							
				Jumlah hasil uji mutu perikanan (Sampel)	300,00	170,00	56,67	RENDAH	Tidak ada permasalahan, sudah melaksanakan kegiatan pelatihan analisis laboratorium	efisiensi berupa perjalanan dinas tidak mempengaruhi pelayanan pengujian sampel, tindak lanjut kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
	3.25.06.1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Ketercapaian Jumlah Unit Usaha Kegiatan Pembinaan Standar Usaha dan Keamanan Jaminan Mutu Pangan (Unit usaha)	180,00	20,29	11,27			
		UPTD Produksi dan Pengembangan Perikanan Budidaya								
	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	56,70	56,70	RENDAH	tidak ada permasalahan dari kinerja yang ditargetkan 39.36 pada TW II yang terealisasi 39.36, capaian kinerja TW II sudah tercapai.	yang akan di tindak lanjuti dengan : 1. Efisiensi Anggaran terdapat di TW II dan III 2. Meningkatkan Kinerja Aparatur pemerintahan UPTD PPPB, sehingga, Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien. 3. Realisasi Kegiatan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
										dilaksanakan sesuai jadwal Dan Anggaran Kas Pada triwulan selanjutnya
	3.25.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah (Persen)	100,00	66,00	66,00			
	3.25.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (Persen)	100,00	83,78	83,78			
	3.25.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Persen)	100,00	52,78	52,78			
	3.25.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (Persen)	100,00	36,38	36,38			
	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							
				Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	124.044,00	54.658,30	44,06	SANGAT RENDAH	Adanya efisiensi anggaran pada triwulan II sehingga adanya target yang tidak tercapai	Melakukan Koordinasi dengan sub bagian Program dan Evaluasi
	3.25.04.1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut (Persen)	100,00	6,85	6,85			
	3.25.04.1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Ketercapaian Jumlah Unit Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Kegiatan Perairan Darat Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi (Unit)	3,00	31,27	1.042,32			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan								
	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	44,69	44,69	SANGAT RENDAH	tidak ada permasalahan dari kinerja yang ditargetkan 36.89 pada TW II yang terealisasi 36.89, capaian kinerja TW II sudah tercapai	pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan, realisasi masih dalam proses keuangan
	3.25.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah (Persen)	100,00	66,07	66,07			
	3.25.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	3.25.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Persen)	100,00	40,14	40,14			
	3.25.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (Persen)	100,00	36,34	36,34			
	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							
				Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	125,00	75,00	60,00	RENDAH	Tidak ada	Tidak ada
	3.25.03.1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil (Persen)	100,00	6,97	6,97			
	3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan	100,00	0,00	0,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pelabuhan Perikanan Provinsi	Perikanan Provinsi (Persen)						
	3.25.03.1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air (Persen)	100,00	6,04	6,04			
3.2	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
		DINAS PARIWISATA								
	3.26.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	64,67	64,67	RENDAH		Aktivitas kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran pelaksanaan disebabkan oleh adanya efisiensi (kebijakan pemerintah pusat/daerah) kegiatannya akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan (ROK)
	3.26.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	69,66	69,66			
	3.26.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100,00	65,28	65,28			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3.26.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Persen)	100,00	50,00	50,00			
	3.26.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (Persen)	100,00	97,30	97,30			
	3.26.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah (Persen)	100,00	98,32	98,32			
	3.26.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	99,95	99,95			
	3.26.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	53,33	53,33			
	3.26.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	58,66	58,66			
	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							
				Persentase Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata (persen)	100,00	25,00	25,00	SANGAT RENDAH	Terdapat 3 Lokasi Kegiatan yang Belum Dapat Dilaksanakan (adanya Perubahan) berdasarkan pertimbangan teknis kegiatan	3 Lokasi kegiatan itu akan dilaksanakan pada Triwulan IV (Perubahan)
	3.26.02.1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi (Persen)	100,00	4,37	4,37			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3.26.02.1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Persen)	100,00	18,16	18,16			
	3.26.02.1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Persen)	100,00	13,05	13,05			
				Rata-Rata Lama inap (hari)	1,78	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		tidak ada permasalahan perhitungan Rata-Rata Lama inap akan dihitung pada akhir tahun 2025, sumber perhitungan di dapat dari BPS Perwakilan Banten
	3.26.02.1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Persen)	100,00	29,62	29,62			
	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							
				Persentase Jumlah Promosi Wisata (persen)	100,00	35,00	35,00	SANGAT RENDAH		Terlaksana, hanya terdapat kebijakan efisiensi anggaran pada beberapa aktivitas kegiatan namun tidak mempengaruhi kinerja program keseluruhan
	3.26.03.1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Persen)	100,00	19,88	19,88			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan (persen)	5,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		Perhitungan Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan (tahunan) akan didapat pada akhir tahun pelaksanaan kunjungan wisatawan sumber informasi di dapat dari Sistem SIMPARDA Dinas Pariwisata Provinsi Banten
	3.26.03.1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Persen)	100,00	48,34	48,34			
	3.26.04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							
				Persentase Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif Provinsi (persen)	25,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		Target Capaian Program ditetapkan pada Triwulan berikutnya
	3.26.04.1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Persen)	100,00	0,27	0,27			
				Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Rupiah)	5.511.176,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		Perhitungan Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (tahunan) akan didapat pada akhir tahun pelaksanaan sumber informasi di dapat dari Buku NESPADA Dinas Pariwisata Provinsi Banten
	3.26.04.1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif (Persen)	100,00	12,48	12,48			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3.26.04.1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Persen)	100,00	50,36	50,36			
	3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							
				Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (Persen)	100,00	35,00	35,00	SANGAT RENDAH		Terlaksana, hanya terdapat kebijakan efisiensi anggaran pada beberapa aktivitas kegiatan namun tidak mempengaruhi kinerja program keseluruhan
	3.26.05.1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan (Persen)	100,00	20,14	20,14			
	3.26.05.1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif (Persen)	100,00	18,11	18,11			
3.3	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
		DINAS PERTANIAN								
		DINAS PERTANIAN (UNIT INDUK)								
	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	sesuai dengan target kinerja	sesuai target kinerja

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3.27.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)	100,00	33,20	33,20			
	3.27.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (persen)	100,00	55,71	55,71			
	3.27.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Adminstrasi Baranga Milik Daerah (Persen)	100,00	16,95	16,95			
	3.27.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (persen)	100,00	0,00	0,00			
	3.27.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah (persen)	100,00	25,67	25,67			
	3.27.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan pengadaan penunjang urusan pemerinthan daerah (persen)	100,00	0,00	0,00			
	3.27.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	100,00	33,02	33,02			
	3.27.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Ketercapaian kegiatan pemeliharaan penunjang urusan pemerinthan daerah (Persen)	100,00	9,68	9,68			
	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Peningkatan Produktivitas Pertanian (kw/Ha)	5,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Triwulan II untuk Program ini adalah 0 (Nol), Untuk Target Produktivitas (Kw/Ha) di ukur pada Triwulan IV, Namun dalam triwulan II ini telah dilaksanakan Kegiatan Pelaksanaan : Penyediaan sarana (1) padi Biofortifikasi, (2) Intensifikasi padi Sawah, (3) Padi Khusus, (4) Budidaya Mina Padi, (5) Intesifikasi Jagung, (6) jagung Pangan, (7) Kacang Tanah, (8) Kedelai, (9) Kacang Hijau, dan (10) Talas Beneng	Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan di triwulan III yaitu Monitoring dan evaluasi untuk kegiatan (1) padi Biofortifikasi, (2) Intensifikasi padi Sawah, (3) Padi Khusus, (4) Budidaya Mina Padi, (5) Intesifikasi Jagung, (6) jagung Pangan, (7) Kacang Tanah, (8) Kedelai, (9) Kacang Hijau, dan (10) Talas Beneng
	3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (persen)	100,00	0,38	0,38			
	3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Ketercapaian Jumlah Laporan kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman (Laporan)	21,00	11,66	55,54			
	3.27.02.1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Ketercapaian Jumlah dokumen Kegiatan ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak (Dokumen)	4,00	0,00	0,00			
	3.27.02.1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Ketercapaian Jumlah Laporan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan (Laporan)	4,00	30,09	752,23			
	3.27.02.1.06		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor (Persen)	100,00	6,82	6,82			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3.27.02.1.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Persen)	100,00	20,29	20,29			
	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							
				Peningkatan Infrastruktur Pertanian (Km)	36,00	36,00	100,00	SANGAT TINGGI	Target 36 Km ada nya di Triwulan IV	Pelaksanaan Target di Triwulan Selanjutnya
	3.27.03.1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Ketercapaian kegiatan Penataan Prasarana Pertanian (persen)	100,00	38,63	38,63			
	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							
				Jumlah kasus Penurunan penyakit Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Jumlah)	18,00	11,00	61,11	RENDAH	Realisasi capaian kinerja sesuai target yaitu sebanyak 4 kasus penyakit hewan menular strategis yang terdiri dari 3 kasus penyakit muut dan kuku (PMK) dan 1 kasus lumpy skin disease (LSD) yang sudah dilakukan pengendalian (terlampir laporan)	Untuk pengendalian penyakit hewan menular strategis akan dilaksanakan sesuai target program
	3.27.04.1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	ketercapaian jumlah laporan kegiatan Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (laporan)	4,00	28,08	702,04			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3.27.04.1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	ketercapaian Jumlah laporan kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi (laporan)	8,00	37,86	473,20			
	3.27.04.1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Ketercapaian Jumlah Sertifikasi Kegiatan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Laporan)	4,00	83,59	2.089,83			
	3.27.04.1.05		Kesejahteraan Hewan	ketercapaian Jumlah sertifikat kegiatan Kesejahteraan Hewan (sertifikat)	141,00	28,33	20,09			
	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							
				Pengamanan Produksi Tanaman pangan dari gangguan serangan OPT dan DPI (%)	95,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	sesuai target kinerja	sesuai target kinerja
	3.27.05.1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Ketercapaian Jumlah kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi (ha)	21.400,00	6,53	0,03			
	3.27.06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN							
				Rekomendasi izin usaha pertanian (Rekomendasi)	271,00	10,00	3,69	SANGAT RENDAH	tidak ada permasalahan	melanjutkan kegiatan berikutnya sesuai jadwal
	3.27.06.1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	ketercapaian Jumlah laporan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota (laporan)	4,00	8,49	212,25			
	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tani dari madya ke utama (Kelompok)	286,00	286,00	100,00	SANGAT TINGGI	sebagian dalam sub dan indikator yang terkena efesiensi anggaran	lanjut triwulan berikutnya
	3.27.07.1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Ketercapaian Jumlah Orang kegiatan pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian (Orang)	68,00	27,46	40,39			
	3.27.07.1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Ketercapaian Jumlah kelompok kegiatan Pengembangan Penerapan penyuluhan Pertanian (kelompok)	48,00	16,75	34,90			
	3.27.07.1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	ketercapaian Jumlah laporan kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan (laporan)	4,00	2,59	64,79			
		UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan								
	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	20,62	20,62	SANGAT RENDAH	Tidak ada permasalahan	- Sesuai dengan jadwal yang sudah di rencanakan - Perubahan rencana anggaran kas target kinerja
	3.27.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	ersenPersentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD PSBT PHP (Persen)	100,00	11,49	11,49			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3.27.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan pengadaan penunjang urusan pemerinthan daerah pada UPTD PSBTPHP (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	3.27.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD PSBTPHP (Persen)	100,00	42,77	42,77			
	3.27.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan pemeliharaan penunjang urusan pemerinthan daerah pada UPTD PSBTPHP (Persen)	100,00	0,86	0,86			
	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							
				Peningkatan Jumlah Sertifikasi Benih (Sertifikat)	478,00	157,00	32,85	SANGAT RENDAH	Tidak ada	Tidak ada
	3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Ketercapaian Jumlah Laporan kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman UPTD PSBTPHP (Laporan)	12,00	24,88	207,35			
	3.27.02.1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Persentase Ketercpaian kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme UPTD PSBTPHP (Persen)	100,00	20,00	20,00			
		UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan								
	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	38,93	38,93	SANGAT RENDAH	Tidak ada permasalahan	1. sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan 2. perubahan rencana anggaran kas target kinerja
	3.27.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah Pada UPTD BPTH (Persen)	100,00	27,94	27,94			
	3.27.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan pengadaan penunjang urusan pemerinthan daerah Pada UPTD BPTPHP (Persen)	100,00	47,59	47,59			
	3.27.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD BPTPHP (Persen)	100,00	40,19	40,19			
	3.27.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan pemeliharaan penunjang urusan pemerinthan daerah pada UPTD BPTPHP (Persen)	100,00	21,48	21,48			
	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							
				Peningkatan Produktivitas Padi (kw/Ha)	5,00	2,50	50,00	SANGAT RENDAH	Panen tanaman pangan usaha perbanyak benih padi dilokasi sitandu sudah menghasilkan 1 ton 200 kg dengan kendala terkena serangan hama burung diakibatkan penanaman dilakukan diluar musim dan tingkat keasaman/ ph kualitas tanah 0,4 sehingga perlu diberikan tambahan dolomit/kapur dicampur dengan kompos kohe	Dilakukan usaha perbanyak benih tanaman pangan kembali, pada masa tanam ke 2 ini dibulan juli, dengan benih padi berasal dari pengadaan varietas 32 dan biosalyn serta 48, di anggarkan juga untuk pengadaan jaring burung serta racun keong untuk pendukung masa tanam ke 2 di lokasi sitandu seluas

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
										1,5 Ha serta di cpcl kecamatan cibadak lebak seluas 5 Ha pada apbd p 2025.
	3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Ketercapaian Jumlah Laporan kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman UPTD BPTPHP (Laporan)	12,00	23,90	199,19			
	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							
				Pengamanan Produksi Tanaman pangan dari gangguan serangan OPT dan DPI (%)	95,00	37,39	39,36	SANGAT RENDAH	Tidak ada Permasalahan Anggaran Yang Tercapai di Triwulan II Di Kegiatan OPT dan DPI: 1. Keg PPHT Pangan 2. Keg Monitoring OPT 3. Keg Penerapan DPI Tanaman Pangan 4. Kegiatan Monitoring DPI	Menyesuaikan anggaran kas
	3.27.05.1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Ketercapaian Jumlah kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi UPTD BPTPHP (Ha)	21.400,00	34,74	0,16			
		UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak								
	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	35,42	35,42	SANGAT RENDAH	Target satuan tidak tercapai, Karena ada Pemangkasan anggaran Pada Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah, dan sisa dari pemangkasan akan	Langkah Berkikutnya, Target akan di sesuaikan dengan Realisasi

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
									direalisasikan pada Triwulan Berikutnya	
	3.27.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah Pada UPTD P3T (Persen)	100,00	35,25	35,25			
	3.27.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan pengadaan penunjang urusan pemerinthan daerah Pada UPTD P3T (Persen)	100,00	16,95	16,95			
	3.27.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD P3T (Persen)	100,00	37,72	37,72			
	3.27.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan pemeliharaan penunjang urusan pemerinthan daerah (persen)	100,00	27,83	27,83			
	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							
				Tersedianya bibit ternak ruminansia bembu (Ekor)	381,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target kegiatan tw 2 adalah 0, dikarenakan target kegiatan merupakan populasi bibit ternak ruminansia bembu dan target total terdapat di TW 4. Namun kami juga telah melaksanakan beberapa kegiatan dengan nilai realisasi sebesar Rp.87.322.000 pada sub kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dan realisasi kegiatan Sebesar : Rp. 3.000.0000 pada sub kegiatan Penjaminan Peredaran	Pada tw 3 akan melaksanakan percepatan kegiatan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
									Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan.	
	3.27.02.1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Ketercapaian Jumlah Laporan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan (Laporan)	12,00	11,51	95,93			
		UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner								
	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	40,67	40,67	SANGAT RENDAH	Tidak ada	Target dan Realisasi akan dilaksanakan sesuai jadwal
	3.27.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD P2V (Persen)	100,00	29,59	29,59			
	3.27.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase Ketercapaian kegiatan pengadaan penunjang urusan pemerinthan daerah pada UPTD P2V (Persen)	100,00	19,67	19,67			
	3.27.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD P2V (Persen)	100,00	52,94	52,94			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3.27.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan pemeliharaan penunjang urusan pemerinthan daerah pada UPTD P2V (Persen)	100,00	18,48	18,48			
	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							
				Peningkatan Infrastruktur Pertanian (Km)	36,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tidak ada target pada triwuan 2	Realisasi selanjutnya sesuai target triwulan
	3.27.03.1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Ketercapaian kegiatan Penataan pada UPTD P2V (Persen)	100,00	66,77	66,77			
	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							
				Jumlah kasus Penurunan penyakit Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Jumlah)	18,00	11,00	61,11	RENDAH	Realisasi capaian kinerja sesuai target yaitu sebanyak 4 kasus penyakit hewan menular strategis yang terdiri dari 3 kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) dan 1 kasus lumpy skin disease (LSD) yang sudah dilakukan pengendalian (terlampir laporan)	Pengendalian penyakit hewan menular strategis akan dilaksanakan sesuai target program
	3.27.04.1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	ketercapaian jumlah laporan kegiatan Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (laporan)	4,00	16,35	408,75			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3.27.04.1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	ketercapaian Jumlah dokumen Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan (dokumen)	4,00	16,69	417,25			
3.4	3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
	3.29.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	43,46	43,46	SANGAT RENDAH	Target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di Triwulan 2 tidak tercapai karena pada pembentuk capaian target Program terdapat beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya dikarenakan keterlambatan dalam pemilihan penyedia barang/jasa.	Dokumen untuk pemilihan penyedia barang/jasa melalui mekanisme SPSE dan e-Purchase telah dipersiapkan oleh masing-masing kegiatan di Sekretariat. Diantaranya Dokumen perisipan pemilihan penyedia Jasa Asuransi Kendaraan Dinas dan Jasa Konsultan Survey Kepuasan Masyarakat.
	3.29.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	27,19	27,19			
	3.29.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100,00	44,54	44,54			
	3.29.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Persen)	100,00	46,50	46,50			
	3.29.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi	100,00	32,08	32,08			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)						
	3.29.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	37,94	37,94			
	3.29.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	6,60	6,60			
	3.29.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	42,45	42,45			
	3.29.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	27,07	27,07			
	3.29.02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN							
				Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah (Persen)	83,20	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Capaian Program Pengelolaan Aspek Kegeologian sesuai dengan Definisi Operasionalnya ada pada Triwulan Akhir (TW IV).	Sampai dengan Triwulan 2 pembentuk target Program Pengelolaan Aspek Kegeologian di kegiatan sedang dalam tahapan pelaksanaan Jasa Konsultansi Zona Konservasi kerentanan gerakan tanah di sebagian kabupaten Lebak, Serang, Konsultansi Zona Konservasi Kawasan Rawan Bencana (KRB) gempa bumi, dan target kegiatan terkait Rekomendasi Teknis

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
										Perizinan Air Tanah sudah tercapai.
	3.29.02.1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Persen)	100,00	5,22	5,22			
	3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Persen)	100,00	15,80	15,80			
	3.29.03		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA							
				Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara (Persen)	80,98	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Capaian Program Pengelolaan Mineral dan Batubara sesuai dengan Definisi Operasionalnya ada pada Triwulan Akhir (TW IV).	Target pembentuk Program Pengelolaan Minerba pada kegiatan sampai dengan Triwulan 2 sudah dalam tahap pelaksanaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Teknis Pengelolaan WPR di Kab. Lebak, Penyusunan Pedoman dan Tatacara Perhitungan Dana Jaminan Reklamasi, Penyusunan Pedoman dan Tatacara Perhitungan Dana Jaminan Pascatambang, Penyusunan Naskah Akademik Kep. Gub. Banten Tentang Penetapan Harga Patokan MBLB dan Target terkait Rekomendasi Teknis sudah tercapai.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3.29.03.1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai (Persen)	100,00	20,00	20,00			
	3.29.03.1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izi (%)	100,00	20,28	20,28			
	3.29.03.1.04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah P (Persen)	100,00	3,73	3,73			
	3.29.05		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN							
				Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan (Persen)	75,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Capaian Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan sesuai dengan Definisi Operasionalnya ada pada Triwulan Akhir (TW IV).	Target pembentuk Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan pada kegiatan sampai dengan Triwulan 2 masih pada tahap persiapan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa Pembangunan PLTS Atap di Gedung OPD Provisi Banten dan SMK.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3.29.05.1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapi (%)	100,00	1,20	1,20			
	3.29.06		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN							
				Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar (Persen)	90,08	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Capaian Program Pengelolaan Ketenagalistrikan pada Indikator Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar sesuai dengan Definisi Operasionalnya ada pada Triwulan Akhir (TW IV).	Target pembentuk Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dengan indikator Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar pada kegiatan sampai dengan Triwulan 2 masih pada tahap persiapan dokumen pelaksanaan Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi SIDAK Banten dan target terkait rekomendasi tenis tercapai.
	3.29.06.1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Ja (Persen)	100,00	42,34	42,34			
				Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (RTS) (RTS)	17.000,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Capaian Program Pengelolaan Ketenagalistrikan pada Indikator Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (RTS) di Triwulan 2 tidak ada target	Target pembentuk Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dengan indikator Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
										(RTS) pada kegiatan sampai dengan Triwulan 2 dalam tahap pelaksanaan Paket pekerjaan pemasangan Instalasi Rumah (IR) di WKP1 Wilayah Tangerang, WKP2 Wilayah Serang dan Kota Cilegon dan WKP3 Kab. Pandeglang dan Lebak.
	3.29.06.1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpen (Persen)	100,00	0,40	0,40			
3.5	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN								
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (UNIT INDUK)								
	3.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							
				Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan urusan Perdagangan (Persen)	80,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Faktor Penghambat: Proses survey ke lapangan yang diwajibkan sebagai syarat sebelum penerbitan rekomtek terkadang berbenturan dengan aktivitas pekerjaan lain.	Faktor Pendorong: Penerbitan rekomendasi teknis telah menggunakan sistem berbasis online sehingga mempermudah dan mempersingkat waktu proses pelayanan dan penerbitan rekomendasi teknis.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3.30.02.1.01		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Persentase ketercapaian Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagang (Persen)	100,00	41,30	41,30			
	3.30.02.1.03		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Persentase ketercapaian Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar (Persen)	100,00	20,28	20,28			
	3.30.02.1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase ketercapaian Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Penge (Persen)	100,00	45,95	45,95			
	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							
				Laju Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan (Persen)	7,39	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain kondisi pasar tradisional, perkembangan ritel modern, ketersediaan dan kualitas infrastruktur, aksesibilitas serta daya beli masyarakat, namun belum dapat dilaporkan pada Triwulan II. Jumlah sarana distribusi yang tersebar di 8 Kab/Kota dapat terukur dan terhitung secara optimal pada akhir tahun anggaran.	Pada Triwulan II pada Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang dilaksanakan yakni Pembinaan Jejaring Distribusi, Pemutakhiran Data Sarana Perdagangan, Pembinaan Pelaku Usaha Komoditi Unggulan Wilayah Provinsi Banten untuk turut serta dalam pasar lelang (via online/hybrid), persiapan Peningkatan Pengelolaan Sistem Resi Gudang

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3.30.03.1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Persentase ketercapaian Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas (Persen)	100,00	10,49	10,49			
	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING							
				Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok (Persen)	5,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Beberapa barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga seperti bawang merah, bawang putih, cabe, daging ayam ras, minyak goreng, telur dan daging sapi akibat lonjakan permintaan jelang hari raya idul adha dan libur nasional, selain itu, fluktuasi harga dipengaruhi oleh cuaca tidak menentu yang mempengaruhi musim tanam dan musim panen sehingga pasokan berkurang serta inkonsistensi kebijakan impor	dalam waktu triwulan II ini Disperindag melaksanakan program stabilisasi harga melalui pemantauan harga dan pemantauan stok barang kebutuhan pokok di 8 kabupaten Kota se Provinsi Banten
	3.30.04.1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi (Persen)	100,00	63,67	63,67			
	3.30.04.1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam	Persentase ketercapaian Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang L (Persen)	100,00	46,83	46,83			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Sistem Informasi Perdagangan							
				Persentase kinerja realisasi pupuk (Persen)	79,49	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Dimana Alokasi yang telah ditetapkan pada Awal Tahun 2025 berjumlah 170,502 Ton yang terdiri dari : 82,904 Ton Pupuk Urea, 72,129 Ton Pupuk NPK dan 15,469 Ton Pupuk Organik. Untuk Alokasi pada Bulan Mei 2025 ada ReAlokasi pupuk sebanyak 167.590 Ton yang terdiri dari : 85.604,00 Ton Pupuk Urea, 70.129 Ton Pupuk NPK dan 11.857 Ton Pupuk Organik	Realisasi sampai dengan Bulan Juni Tahun 2025 berjumlah 54.849,20 Ton (32,73%) yang terdiri dari : - 28.732 Ton Pupuk Urea (33,56%) - 25.552 Ton Pupuk NPK (36,44%) - 565,20 Ton Pupuk Organik (4,77%)
	3.30.04.1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase ketercapaian Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk B (Persen)	100,00	54,08	54,08			
	3.30.05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							
				Pertumbuhan nilai ekspor non migas (Persen)	27,33	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Secara umum, ekspor non migas di Banten mengalami peningkatan 3,41% pada bulan Mei 2025 dibanding bulan Mei 2024. Dari sepuluh komoditas dengan nilai ekspor non migas terbesar Januari â€” Mei 2025, komoditas yang mengalami peningkatan terbesar adalah kakao/coklat (HS 18) sebesar US\$389,05 juta (369,46	Pada Triwulan II, Program Pengembangan Ekspor yang dilaksanakan Disperindag meliputi pengiriman peserta Diklat Ekspor ke PPEJP Kementerian Perdagangan RI dan melaksanakan koordinasi kegiatan ke Kabupaten dan Kota se Provinsi Banten. Kemudahan penerbitan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
									persen), sementara yang mengalami penurunan terbesar adalah alas kaki (HS 64) sebesar US\$469,87 juta (52,67 persen)	Hak Akses dan Surat Keterangan Asal bagi eksportir juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan nilai ekspor non migas di Provinsi Banten.
	3.30.05.1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Persentase ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari (Persen)	100,00	50,07	50,07			
	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							
				Persentase penyelesaian aduan konsumen yang dilayani dan ditangani (Persen)	60,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Pada penyelesaian sengketa konsumen masih ditemukan pelaku usaha sebagai termohon yang tidak kooperatif dalam proses mediasi ataupun persidangan	Hingga saat ini, pengaduan konsumen yang diterima oleh BPSK WKP I dan WKP II berjumlah 44 pengaduan dan yang telah dinyatakan selesai 40 pengaduan. Selebihnya masih dalam proses kajian, mediasi dan/atau persidangan. Pada Triwulan II, Disperindag telah melakukan fasilitasi operasional BPSK. Selanjutnya, Edukasi Konsumen Cerdas yang sudah dilaksanakan pada Triwulan II adalah 13 Kegiatan .
	3.30.06.1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh	Persentase ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di	100,00	45,02	45,02			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (Persen)						
	3.30.06.1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (Persen)	100,00	100,00	100,00			
				Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Persen)	40,04	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tim Pengawasan masih mendapati pelaku usaha yang tidak kooperatif selama proses pengawasan barang beredar.	Pada Triwulan II, Disperindag telah melakukan pengawasan barang beredar meliputi pengawasan produk SNI Wajib dan Label Wajib Berbahasa Indonesia, dimana jumlah barang beredar yang diawasi adalah sebanyak 91, yang sesuai dengan ketentuan sebanyak 84, sehingga akumulasi barang beredar yang diawasi dari Triwulan I sampai dengan Triwulan II adalah 104 dan yang sesuai ketentuan sebanyak 97.
	3.30.06.1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (Persen)	100,00	42,01	42,01			
	3.30.07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Laju Pemasaran Produk Dalam Negeri (Persen)	30,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Mencari tanggal pelaksanaan yang bisa mengakomodir baik fasilitas tempat dari pihak penyelenggara (mall) dan pihak peserta (pelaku usaha) sehingga Pemasaran Produk Dalam Negeri sampai dengan Triwulan II baru mencakup 16 Produk yang dipasarkan pada kegiatan Mall to Mall di Supermall Karawaci. Pada Tahun sebelumnya telah dipasarkan 36 Produk sehingga capaian realisasi sampai dengan Triwulan II adalah sebesar -55.56%.	Untuk kegiatan Pemasaran Produk Dalam Negeri selanjutnya akan dilaksanakan kegiatan Pameran Nasional, Pameran Pangan Nusa, Fasilitas Pemasaran dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri yang akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV.
	3.30.07.1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri (Persen)	100,00	82,27	82,27			
	3.30.07.1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (Persen)	100,00	41,95	41,95			
	3.30.07.1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Persen)	100,00	58,50	58,50			
3.6	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN								
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (UNIT INDUK)								
	3.31.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	49,69	49,69	SANGAT RENDAH	Tidak ada	Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan sesuai ROK
	3.31.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	51,84	51,84			
	3.31.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100,00	55,13	55,13			
	3.31.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	95,70	95,70			
	3.31.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	5,37	5,37			
	3.31.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	39,23	39,23			
	3.31.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	46,68	46,68			
	3.31.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	28,54	28,54			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3.31.02		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
				Persentase Pertambahan Jumlah Industri di Provinsi (Persen)	0,24	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Pertumbuhan industri di Banten menghadapi beberapa permasalahan seperti infrastruktur diluar kawasan industri, kualitas SDM lokal yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri serta persaingan Upah Minimum tenaga kerja dengan wilayah di luar Banten khususnya pada industri padat karya.	Disperindag Provinsi Banten telah berupaya mendorong peningkatan produktivitas industri melalui penyusunan Masterplan Penunjang Kawasan Industri, kerjasama dengan Pemerintah Pusat terkait fasilitasi sertifikasi TKDN, pemberdayaan Industri Kecil Menengah khususnya Sentra IKM dan penerapan Vokasi Link and Match. Pada Triwulan II, Disperindag telah melakukan pendampingan peny. RPIK Kab/Kota, pengemb. kemitraan IKM dan evaluasi RPIP.
	3.31.02.1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase ketercapaian Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (Persen)	100,00	30,14	30,14			
	3.31.03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							
				Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar ,izin perluasan industri (IPUI) Bagi Industri Besar, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan in (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Permasalahan sering kali disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen persyaratan penerbitan Rekomtek oleh perusahaan pemohon.	Pada Triwulan II, Disperindag telah melakukan verifikasi teknis terhadap permohonan penerbitan rekomendasi teknis izin industri serta pengawasan terhadap produk industri SNI Wajib. Pada Tahun 2025 telah diterbitkan 12 (dua belas) Rekomtek Izin/Sertifikat Standar, dengan rincian 9 (sembilan) Rekomtek pada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
										TW I dan 3 (tiga) pada TW II dan seluruhnya telah dipantau oleh Disperindag Provinsi Banten sehingga capaian pengendalian izin/sertifikat standar telah tercapai 100%.
	3.31.03.1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluas (Persen)	100,00	47,96	47,96			
	3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							
				Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan indus (Persen)	65,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Masih terdapat perusahaan yang belum patuh untuk melakukan pelaporan informasi usaha industrinya pada SIINas secara berkala dan masih banyak Perusahaan yang belum paham tentang tatacara penyampaian Laporan Produksi pada SIINas.	Pada Triwulan II, Disperindag secara berkala melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data Kawasan Industri melalui SIINas. SIINas yang menjadi domain Disperindag Banten mampu mengakses keterkinian informasi industri meliputi informasi produksi dan kapasitas produksi, bahan baku dan bahan penolong, bahan bakar/energi, tenaga kerja dan investasi.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3.31.04.1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase ketercapaian Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (S (Persen)	100,00	37,33	37,33			
3.6	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN								
		UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang								
	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							
				Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (Persen)	14,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Pengujian Komoditi Potensial akan dilaksanakan pada Triwulan II 2025. Kendala yang dihadapi dalam pengujian mutu pada UPTD PSMB adalah belum tersedianya Tenaga Fungsional Penguji Mutu Barang dan Laboratorium Uji yang mumpuni.	Pada Triwulan II, aktivitas pada Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen UPTD PSMB yang dilaksanakan meliputi Audit Internal Lab Kalibrasi (dilaksanakan pada tanggal 6-9 Mei), Kaji Ulang Manajemen Lab Kalibrasi (dilaksanakan pada tanggal 16-17 Juni), SOP Pengujian Mutu Produk (sudah dilaksanakan tanggal 23 Juni 2025), SOP Uji Berat Bersih (dalam proses Nota Dinas Pengajuan tersebut, untuk tayang di LPSE/Ekatalog) serta persiapan Pemantauan Mutu Produk

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3.30.06.1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (Persen)	100,00	62,82	62,82			
3.6	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN								
		UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang								
	3.31.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	56,05	56,05	RENDAH	Tidak ada	Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penunjang Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan sesuai ROK
	3.31.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (Persen)	100,00	25,00	25,00			
	3.31.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (Persen)	100,00	54,44	54,44			
	3.31.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengujian dan	100,00	0,00	0,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Sertifikasi Mutu Barang (Persen)						
	3.31.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (Persen)	100,00	55,78	55,78			
	3.31.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (Persen)	100,00	58,42	58,42			
		UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri								
	3.31.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	34,81	34,81	SANGAT RENDAH	Tidak ada	Ketercapaian Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Periode April-Juni 2025 pada Sub Unit UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri (UPTD PTSI)
	3.31.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada UPTD Pengembangan	100,00	0,00	0,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Teknologi dan Standardisasi Industri (Persen)						
	3.31.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	3.31.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (Persen)	100,00	100,00	100,00			
	3.31.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri (Persen)	100,00	51,95	51,95			
	3.31.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri (Persen)	100,00	15,43	15,43			
	3.31.02		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Cakupan Pelayanan Pengembangan teknologi dan Standarisasi Industri (Persen)	65,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Faktor Penghambat : UPTD PTSI belum memiliki Tenaga Fungsional Penguji Mutu Barang	Faktor Pendukung : 1. Proporsi anggaran mensupport Disperindag untuk melakukan pelayanan fasilitasi bagi Pelaku Usaha/IKM 2. Disperindag Kab./Kota membantu pendataan IKM potensial
	3.31.02.1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase ketercapaian Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi pada UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Ind (Persen)	100,00	54,14	54,14			
4	4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.1	4.01 SEKRETARIAT DAERAH									
		SEKRETARIAT DAERAH								
		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah								
	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	26,44	26,44	SANGAT RENDAH		
	4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	51,94	51,94			
	4.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah (Persen)	100,00	49,10	49,10			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	4.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (Persen)	100,00	13,00	13,00			
	4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah (Persen)	100,00	45,42	45,42			
	4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	51,22	51,22			
	4.01.03		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							
				Persentase Realisasi Kebijakan Administrasi Kewilayahan (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	4.01.03.1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan (Persen)	100,00	27,60	27,60			
				Persentase realisasi kebijakan Otonomi Daerah (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	4.01.03.1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah (Persen)	100,00	60,24	60,24			
				Persentase realisasi kebijakan kerjasama pemerintahan (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	4.01.03.1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah (Persen)	100,00	50,90	50,90			
	4.01.04		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT							
				Cakupan realisasi Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	4.01.04.1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual (Persen)	100,00	96,80	96,80			
				Persentase Rumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	4.01.04.1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Ketercapaian Jumlah Dokumen kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar (Persen)	100,00	54,05	54,05			
				Persentase Rumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	4.01.04.1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Ketercapaian Jumlah Dokumen kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar (Persen)	100,00	12,11	12,11			
		Biro Hukum								
	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	67,51	67,51	SEDANG	Tidak Ada	Tidak Ada
	4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah (Biro Hukum) (Persen)	100,00	31,42	31,42			
	4.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	100,00	67,15	67,15			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Daerah (Biro Hukum) (Persen)						
	4.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Hukum) (persen)	100,00	75,12	75,12			
	4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Hukum) (Persen)	100,00	81,49	81,49			
	4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Hukum) (persen)	100,00	53,44	53,44			
	4.01.05		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM							
				Persentase Ketercapaian Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tidak Ada	Tidak Ada
	4.01.05.1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan (Persen)	100,00	52,18	52,18			
				Persentase Dokumentasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tidak Ada	Tidak Ada
	4.01.05.1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan (Persen)	100,00	65,93	65,93			
				Persentase Ketercapaian Kualitas Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tidak Ada	Tidak Ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	4.01.05.1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan (Persen)	100,00	49,36	49,36			
				Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tidak Ada	Tidak Ada
	4.01.05.1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum (Persen)	100,00	74,19	74,19			
		Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi								
	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	20,81	20,81	SANGAT RENDAH		
	4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi) (Persen)	100,00	32,51	32,51			
	4.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi) (Persen)	100,00	40,06	40,06			
	4.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi) (Persen)	100,00	0,00	0,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi) (Persen)	100,00	75,96	75,96			
	4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi) (Persen)	100,00	52,58	52,58			
	4.01.02		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI							
				Persentase cakupan kegiatan akuntabilitas Kinerja (Persen)	100,00	19,27	19,27	SANGAT RENDAH		
	4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja (Persen)	100,00	63,31	63,31			
				Persentase cakupan kegiatan kelembagaan dan analisis jabatan (Persen)	100,00	16,25	16,25	SANGAT RENDAH		
	4.01.02.1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Persen)	100,00	45,69	45,69			
				Persentase cakupan kegiatan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik (Persen)	100,00	13,17	13,17	SANGAT RENDAH		
	4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja (Persen)	100,00	45,18	45,18			
				Persentase cakupan kegiatan reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja (Persen)	100,00	13,26	13,26	SANGAT RENDAH		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja (Persen)	100,00	39,71	39,71			
		Biro Umum dan Perlengkapan								
	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	40,54	40,54	SANGAT RENDAH		
	4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah (Biro Umum dan Perlengkapan) (Persen)	100,00	38,51	38,51			
	4.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Umum dan Perlengkapan) (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Umum dan Perlengkapan) (Persen)	0,00	70,40	∞			
				Persentase capaian tata kelola keuangan dan aset SETDA (Persen)	100,00	27,10	27,10	SANGAT RENDAH		
	4.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Umum dan Perlengkapan) (Persen)	100,00	55,94	55,94			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	4.01.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah (Biro Umum dan Perlengkapan) (Persen)	100,00	41,43	41,43			
	4.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Umum dan Perlengkapan) (Persen)	100,00	96,71	96,71			
	4.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Umum dan Perlengkapan) (Persen)	100,00	53,08	53,08			
				Persentase capaian layanan rumah tangga pimpinan daerah dan fasilitasi layanan SETDA (Persen)	100,00	26,99	26,99	SANGAT RENDAH		
	4.01.01.1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Biro Umum) (Persen)	100,00	33,43	33,43			
	4.01.01.1.12		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah (Biro Umum dan Perlengkapan) (Persen)	100,00	55,31	55,31			
				Persentase Capaian Fasilitasi Tata Usaha (Persen)	100,00	50,42	50,42	RENDAH		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Umum dan Perlengkapan) (Persen)	100,00	76,68	76,68			
		Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik								
	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	53,17	53,17	RENDAH	kebutuhan rapat dan koordinasi hanya sedikit dibandingkan dengan target yang ditetapkan	perubahan target disesuaikan dengan kebutuhan
	4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE) (Persen)	100,00	39,04	39,04			
	4.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik) (Persen)	100,00	35,05	35,05			
	4.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik) (Persen)	100,00	77,49	77,49			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik) (Persen)	100,00	49,90	49,90			
	4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik) (Persen)	100,00	53,45	53,45			
	4.01.07		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							
				B. Tingkat Kematangan UKPBJ (Nilai)	35,56	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	capaian ITKP dinilai pada akhir tahun berkenaan	menunggu hasil final penilaian ITKP pada laman LKPP
	4.01.07.1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Persen)	100,00	50,86	50,86			
				C. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (Nilai)	27,39	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	capaian ITKP dinilai pada akhir tahun berkenaan	menunggu hasil final penilaian ITKP pada laman LKPP
	4.01.07.1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Persen)	100,00	55,74	55,74			
				A. Pemanfaatan Sistem Pengadaan (Nilai)	30,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	capaian ITKP dinilai pada akhir tahun berkenaan	menunggu hasil final penilaian ITKP pada laman LKPP
	4.01.07.1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Persen)	100,00	71,76	71,76			
		Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	70,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan) (Persen)	100,00	10,66	10,66			
	4.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan) (Persen)	100,00	37,85	37,85			
	4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan) (Persen)	100,00	73,54	73,54			
	4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan) (Persen)	100,00	53,22	53,22			
	4.01.06		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Sarana Perekonomian (Dokumen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	4.01.06.1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD (Persen)	100,00	23,90	23,90			
				Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Industrsi Jasa dan Ketenagakerjaan (Dokumen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	4.01.06.1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Kooordinasi Perekonomian (Persen)	100,00	35,44	35,44			
				Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Produksi Daerah (Dokumen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	4.01.06.1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam (Persen)	100,00	54,57	54,57			
	4.01.08		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							
				Persentase Tersedianya dokumen Hasil rekomendasi pengendalian Administrasi Pembangunan sebagai bahan evaluasi (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	4.01.08.1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Persen)	100,00	35,97	35,97			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Administrasi Pembaangunan (Dokumen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	4.01.08.1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Persen)	100,00	45,35	45,35			
		Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol								
	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	56,22	56,22	RENDAH	Beberapa sub kegiatan terkena Efisiensi Anggaran Tahun 2025	Akan dilakukan penyesuaian target pada Perubahan Anggaran Tahun 2025
	4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah (%) (Persen)	100,00	46,45	46,45			
	4.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol) (Persen)	100,00	33,23	33,23			
	4.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol) (Persen)	100,00	70,91	70,91			
	4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Administrasi	100,00	69,47	69,47			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Pimpinan dan Protokol) (Persen)						
	4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol) (Persen)	100,00	54,33	54,33			
				Persentase capaian Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan (Persen)	100,00	48,01	48,01	SANGAT RENDAH	- Beberapa aktifitas Tidak dilaksanakan karena efisiensi Anggaran; - Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan mengikuti Agenda Kegiatan Pimpinan.	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan sampai Triwulan II Tahun 2025 : Sambutan : 105 Naskah Notulen Rapat : 32 Notula Materi Pimpinan : 92 Paparan Press Release : 666 Press Release Infografis : 742 Infografis Tayangan Berita : 13.150 Tayangan Foto : 637 Kegiatan Video : 637 Kegiatan
	4.01.01.1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan (Persen)	100,00	45,47	45,47			
				Persentase Capaian Pelayanan Keprotokolan (Persen)	100,00	59,97	59,97	RENDAH		
	4.01.01.1.14		Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan (Persen)	100,00	59,72	59,72			
4.2	4.02 SEKRETARIAT DPRD									
		SEKRETARIAT DPRD								
	4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	30,73	30,73	SANGAT RENDAH		
	4.02.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100,00	55,47	55,47			
	4.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100,00	64,77	64,77			
	4.02.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100,00	69,92	69,92			
	4.02.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100,00	62,08	62,08			
	4.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100,00	37,40	37,40			
	4.02.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100,00	61,71	61,71			
	4.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,00	42,40	42,40			
	4.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,00	67,14	67,14			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	4.02.01.1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Ketercapaian Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (%)	100,00	52,35	52,35			
	4.02.01.1.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Ketercapaian Kegiatan Layanan Administrasi DPRD (%)	100,00	49,93	49,93			
	4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							
				Persentase Capaian Pelayanan Keprotokolan, Kehumasan Dan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Reses DPRD (Persen)	100,00	27,48	27,48	SANGAT RENDAH		
	4.02.02.1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Ketercapaian Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD (%)	100,00	42,69	42,69			
	4.02.02.1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyerapan dan Perhimpunan Masyarakat (%)	100,00	66,78	66,78			
	4.02.02.1.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah (%)	100,00	12,75	12,75			
				Persentase capaian layanan kinerja fungsi DPRD (Persen)	100,00	22,33	22,33	SANGAT RENDAH		
	4.02.02.1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD (%)	100,00	49,73	49,73			
	4.02.02.1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran (%)	100,00	54,29	54,29			
	4.02.02.1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100,00	53,37	53,37			
	4.02.02.1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD (%)	100,00	44,08	44,08			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.1	5.01 PERENCANAAN									
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
	5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	57,94	57,94	RENDAH	Terdapat Aktivitas Bulanan yang tidak terealisasi pada Kegiatan Administrasi Keuangan dan Kegiatan Pengadaan	Akan dilakukan pada Kinerja Bulan Juli
	5.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	20,77	20,77			
	5.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah (Persen)	100,00	60,68	60,68			
	5.01.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Persen)	100,00	42,38	42,38			
	5.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (Persen)	100,00	5,27	5,27			
	5.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah (Persen)	100,00	73,88	73,88			
	5.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100,00	100,00	100,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Pemerintah Daerah (Persen)						
	5.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	51,11	51,11			
	5.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	45,57	45,57			
	5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							
				Persentase dokumen Pengendalian dan evaluasi yang disusun sesuai target dalam satu tahun (Persen)	100,00	50,00	50,00	SANGAT RENDAH	Telah dilakukan Penyusunan Laporan Pengendalian Triwulan 1 RKPD Provinsi Banten, Pengendalian Triwulan 1 APBN Provinsi, Hasil Fasilitasi RPJMD Kab/Kota 2025-2029 dan Perubahan RKPD Kab/Kota 2025	Akan Dilaksanakan Fasilitasi RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Serang dikarenakan PSU
	5.01.02.1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Persen)	100,00	63,31	63,31			
				Persentase dokumen perencanaan yang disahkan (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Masih Dilakukan Proses Penyusunan RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026	Akan Dilakukan Pengesahan RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 pada Triwulan 3
	5.01.02.1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan (Persen)	100,00	61,44	61,44			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase Ketersediaan data perencanaan pembangunan (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Telah dilaksanakan Data dan Informasi sampai dengan Triwulan 2	Telah Sesuai Jadwal Pelaksanaan
	5.01.02.1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Persen)	100,00	39,49	39,49			
				Persentase pengelolaan sistem informasi pembangunan dan pengendalian daerah (Persen)	90,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Telah terbinanya Pengelola SIPD Data Sektoral pada Pengelola Data Provinsi dan Kab/Kota	Telah dilaksanakan sesuai jadwal
	5.01.02.1.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Persen)	100,00	49,77	49,77			
				Presentase Konsistensi Program RPJMD/ RPD kedalam RKPD (Persen)	95,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Telah dipetakan dukungan Prioritas Provinsi terhadap Prioritas Nasional	Telah dilaksanakan sesuai jadwal
	5.01.02.1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan (Persen)	100,00	99,64	99,64			
	5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
				Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD/RPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Telah dilaksanakan Verifikasi Ranhir Renstra PD 2025-2029 dan Ranhir Perubahan Renja PD 2025	Pada Triwulan 3 akan dilakukan Verifikasi Ranhir Renja PD 2026

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	5.01.03.1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persen)	100,00	42,10	42,10			
				Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD/RPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Telah dilaksanakan Verifikasi Ranhir Renstra PD 2025-2029 dan Ranhir Perubahan Renja PD 2025	Pada Triwulan 3 akan dilakukan Verifikasi Ranhir Renja PD 2026
	5.01.03.1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persen)	100,00	78,37	78,37			
				Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD/RPD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Telah dilaksanakan Verifikasi Ranhir Renstra PD 2025-2029 dan Ranhir Perubahan Renja PD 2025	Pada Triwulan 3 akan dilakukan Verifikasi Ranhir Renja PD 2026
	5.01.03.1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (Persen)	100,00	37,20	37,20			
5.2	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
	5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase hasil kelitbangan lingkup Sosial dan Kependudukan yang dihasilkan (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Telah Dilakukan FGD Revitalisasi Surosoan	Capaian Program sesuai Rencana Aksi pada Triwulan 4
	5.05.02.1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan (Persen)	100,00	13,93	13,93			
	5.05.02.1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Persen)	100,00	40,98	40,98			
				Persentase Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inovasi, Teknologi dan Hasil Kelitbangan (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Telah dilaksanakan Klinik Inovasi sebagai Penilaian IGA	Capaian Program sesuai Rencana Aksi pada Triwulan 4
	5.05.02.1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi (Persen)	100,00	26,46	26,46			
				Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Telah dilaksanakan Jurnal DKPD dan Proposal Rencana Induk dan Peta Jalan	Capaian Program sesuai Rencana Aksi pada Triwulan 4
	5.05.02.1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Ketercapaian Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase Ketercapaian Kegiatan Pene (Dokumen)	5,00	37,62	752,33			
5.3	5.02 KEUANGAN									
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	58,24	58,24	RENDAH	1.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pamarintahan Daerah adanya efisiensi anggaran pada pemeliharaan atap Gedung Kantor BPKAD sesuai SE Pj. Sekda No.6 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Perubahan RKA dalam Rangka Pergeseran APBD sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal 2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdapat anggaran pendidikan dan pelatihan yang tidak direalisasikan dikarenakan belum adanya permintaan diklat dari Bidang	1. Menyusun Ulang RAB Render Pemeliharaan Atap Gedung Kantor BPKAD 2. Berkoordinasi dengan Bidang dilingkup BPKAD terkait Pendidikan dan Pelatihan diluar BPSDMD
	5.02.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	44,29	44,29			
	5.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100,00	57,23	57,23			
	5.02.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Persen)	100,00	39,81	39,81			
	5.02.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	2,61	2,61			
	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	74,24	74,24			
	5.02.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100,00	0,00	0,00			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Pemerintah Daerah (Persen)						
	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	51,76	51,76			
	5.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	73,43	73,43			
	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
				Persentase pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan APBD Tahun 2026 dan Perubahan APBD Tahun 2025 akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV	Pelaksanaan Kegiatan sesuai Jadwal ROK
	5.02.02.1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah (Persen)	100,00	28,77	28,77			
	5.02.02.1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Persen)	100,00	60,50	60,50			
	5.02.02.1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah (Persen)	100,00	15,78	15,78			
				Persentase Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi APBD, P-APBD dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV	Pelaksanaan Kegiatan sesuai Jadwal ROK

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Persen)						
	5.02.02.1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Persen)	100,00	12,33	12,33			
				Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi Pemerintah (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Berdasarkan LHP BPK No. 10.A/LHP/XVIII. SRG/04/2025, tanggal 29 April 2025 bahwa Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disajikan secara Wajar	Capaian Realisasi sebesar 100% atau sesuai yang ditargetkan
	5.02.02.1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Persen)	100,00	53,81	53,81			
				Persentase pengelolaan belanja daerah yang efektif dan efisien (Persen)	100,00	26,90	26,90	SANGAT RENDAH	1. Target SP2D sd Triwulan II sebanyak 4.245 Lembar, Realisasi sebanyak 3.249 lembar atau 16,25% 2. Dokumen Pendukung tdk Lengkap disebabkan dok SP2D dari OPD tidak disertai dokumen pendukung yang lengkap atau sesuai dengan ketentuan teknis, menyebabkan pengembalian berkas dan keterlambatan proses verifikasi. 3. Gangguan Sistem atau Aplikasi Terdapat gangguan teknis pada aplikasi Simral/SIPD/SP2D Online yang menghambat proses input dan pencairan, khususnya pada waktu menjelang batas akhir trwl	1. Berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memastikan kelengkapan dokumen 2. Berkoordinasi dengan tim IT/SIPD Pusdatin Kemendagri dan pihak terkait untuk memastikan sistem pendukung pencairan dana berfungsi optimal
	5.02.02.1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Ketecapaian Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan	100,00	39,78	39,78			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Perbendaharaan Daerah (Persen)						
	5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							
				Capaian Database Aset Provinsi Banten (Persen)	24,50	12,00	48,98	SANGAT RENDAH	1. Update Aplikasi ATISISBADA berdasarkan versi Permendagri No 47 Tahun 2021 terdapat modul inventarisasi dan sensus masih pada opd yang belum optimal menyelesaikan inventarisasi tahap I sehingga penyusunan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) dari OPD terhambat. 2. Kegiatan Rekonsiliasi BMD Triwulan II (Semester I) Tahun 2025 dilaksanakan pada tgl 8 Juli 2025 terkendala realisasi anggaran belanja modal dan belanja persediaan pada OPD belum sesuai antara jumlah inputan pada ATISISBADA dan SIA	1. Optimalisasi pelaksanaan inventarisasi dan sensus tahap I pada OPD dilakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan secara berjenjang Progres prosentase inventarisasi dan sensus kepada Pengelola Barang 2.BPKAD melakukan kompilasi data untuk laporan BMD Smstr II Tahun 2025 untuk disampaikan kepada KEMENDAGRI setelah dilakukan Rekonsiliasi Smstr II Aset dan Persediaan seluruh OPD di Lingkup Provinsi Banten 3. Berkoordinasi dengan Diskominfo dalam optimalisasi keamanan sistem aplikasi
	5.02.03.1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Persen)	100,00	48,39	48,39			
				Capaian Penertiban Aset Provinsi Banten (Persen)	25,00	5,00	20,00	SANGAT RENDAH	Belum Terbitnya Surat Kuasa Khusus (SKK) atas Permasalahan Sengketa Bidang Tanah disebabkan dokumen SKK belum lengkap sebanyak 5 SKK, yaitu 1. SMAN 1 Pandeglang 2. SMAN 8 Pandeglang 3. SMKN 2 Kota Tangerang 4. Tanah DINSOS di Kab. Lebak 5. SMAN 5 Kota Serang	Berkoodinasi dengan pihak terkait dalam hal kelengkapan dokumen dengan target waktu bulan Juli 2025

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	5.02.03.1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Persen)	100,00	32,63	32,63			
				Capaian Sertifikasi Aset Provinsi Banten (Persen)	17,50	5,10	29,14	SANGAT RENDAH	1. Realisasi sampai dengan triwulan II telah tersertifikasi bidang tanah sebanyak 1.169 sertifikat dari target 1.528 atau 76,51% 2. Sisa sebanyak 359 Sertifikat dengan kondisi masih belum lengkapnya dokumen tanah yang akan di daftarkan pengukuran ke BPN	1. Berkoordinasi dengan BPN untuk mencari solusi dalam melengkapi kekurangan dokumen tanah 2. Melakukan koordinasi dengan pihak Perangkat Daerah dan Kepala Desa untuk melengkapi dokumen-dokumen tanah (Surat Permohonan Pengukuran, Surat Permohonan Hak Pakai)
	5.02.03.1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Persen)	100,00	35,06	35,06			
				Persentase Pengelolaan Aset Provinsi Banten (Persen)	22,00	4,40	20,00	SANGAT RENDAH	Rekomendasi Surat Kuasa Khusus (SKK) atas Permasalahan Sengketa Bidang Tanah belum diterbitkan dari Kejaksaan tinggi, disebabkan belum dilaksanakannya Ekspose Permasalahan Aset Tanah	Menunggu Jadwal Ekspose yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi
	5.02.03.1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Persen)	100,00	19,59	19,59			
		BADAN PENDAPATAN DAERAH								
		BADAN PENDAPATAN DAERAH (UNIT INDUK)								
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	52,65	52,65	RENDAH	Tidak ada permasalahan	Sesuai perencanaan
	5.02.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	57,09	57,09			
	5.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100,00	52,73	52,73			
	5.02.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Persen)	100,00	65,11	65,11			
	5.02.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (Persen)	100,00	57,53	57,53			
	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	70,55	70,55			
	5.02.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	59,32	59,32			
	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	48,17	48,17			
	5.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100,00	38,97	38,97			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Pemerintahan Daerah (Persen)						
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	5,35	(9,12)	(170,47)	SANGAT TINGGI	Kondisi ekonomi lokal dan global dimana daya beli masyarakat yang rendah	langkah selanjutnya perlu untuk dilakukan relaksasi pajak bagi masyarakat dgn pembebasan pokok & denda serta melaksanakan kebijakan bebas bbnkb
	5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Persen)	100,00	42,84	42,84			
				Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	4,57	34,05	745,08	SANGAT TINGGI	Tidak ada permasalahan	-Retribusi daerah dan TW I PLL tahun 2025: Rp82.614.776.687,28 -Retribusi daerah dan PLL TW I tahun 2024: Rp82.294.152.423,43 -Perhitungan: (82.614.776.687,28- 82.294.152.423,43) / 82.614.776.687,28 x 100%
	5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Persen)	100,00	60,43	60,43			
		UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang								
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	55,89	55,89	RENDAH	Tidak ada permasalahan	Sesuai perencanaan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Serang (Persen)	100,00	78,56	78,56			
	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Serang (Persen)	100,00	49,58	49,58			
	5.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Serang (Persen)	100,00	54,95	54,95			
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	5,35	(26,55)	(496,26)	SANGAT TINGGI	Kondisi ekonomi lokal dan global dimana daya beli masyarakat yang rendah	langkah selanjutnya perlu untuk dilakukan relaksasi pajak bagi masyarakat dgn pembebasan pokok & denda serta melaksanakan kebijakan bebas bbnbk
	5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Serang (Persen)	100,00	49,29	49,29			
		UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciruas								
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	56,04	56,04	RENDAH	Tidak ada permasalahan	Sesuai perencanaan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Cikande (Persen)	100,00	82,06	82,06			
	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Cikande (Persen)	100,00	50,81	50,81			
	5.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Cikande (Persen)	100,00	59,82	59,82			
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	5,35	(26,55)	(496,26)	SANGAT TINGGI	Kondisi ekonomi lokal dan global dimana daya beli masyarakat yang rendah	langkah selanjutnya perlu untuk dilakukan relaksasi pajak bagi masyarakat dgn pembebasan pokok & denda serta melaksanakan kebijakan bebas bbnbk
	5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Cikande (Persen)	100,00	55,65	55,65			
		UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang								
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	68,20	68,20	SEDANG	Tidak ada permasalahan	Sesuai perencanaan
	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Pandeglang (Persen)	100,00	87,72	87,72			
	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Pandeglang (Persen)	100,00	56,97	56,97			
	5.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Pandeglang (Persen)	100,00	68,05	68,05			
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	5,35	(26,55)	(496,26)	SANGAT TINGGI	Kondisi ekonomi lokal dan global dimana daya beli masyarakat yang rendah	langkah selanjutnya perlu untuk dilakukan relaksasi pajak bagi masyarakat dgn pembebasan pokok & denda serta melaksanakan kebijakan bebas bbnkb
	5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Pandeglang (Persen)	100,00	52,52	52,52			
		UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	61,30	61,30	RENDAH	Tidak ada permasalahan	Sesuai perencanaan
	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Rangkasbitung (Persen)	100,00	85,20	85,20			
	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Rangkasbitung (Persen)	100,00	49,61	49,61			
	5.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Rangkasbitung (Persen)	100,00	69,43	69,43			
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	5,35	(26,55)	(496,26)	SANGAT TINGGI	Kondisi ekonomi lokal dan global dimana daya beli masyarakat yang rendah	Langkah selanjutnya perlu untuk dilakukan relaksasi pajak bagi masyarakat dgn pembebasan pokok & denda serta melaksanakan kebijakan bebas bbnkb
	5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Rangkasbitung (Persen)	100,00	56,34	56,34			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping								
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	53,43	53,43	RENDAH	Tidak ada permasalahan	Sesuai perencanaan
	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Malingping (Persen)	100,00	74,34	74,34			
	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Malingping (Persen)	100,00	51,78	51,78			
	5.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Malingping (Persen)	100,00	34,84	34,84			
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	5,35	(26,55)	(496,26)	SANGAT TINGGI	Kondisi ekonomi lokal dan global dimana daya beli masyarakat yang rendah	Langkah selanjutnya perlu untuk dilakukan relaksasi pajak bagi masyarakat dgn pembebasan pokok & denda serta melaksanakan kebijakan bebas bbnbk
	5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada	100,00	45,43	45,43			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				UPTD PPD Malingping (Persen)						
		UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat								
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	55,45	55,45	RENDAH	Tidak ada permasalahan	Sesuai perencanaan
	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Ciputat (Persen)	100,00	76,60	76,60			
	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Ciputat (Persen)	100,00	46,41	46,41			
	5.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Ciputat (Persen)	100,00	46,59	46,59			
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	5,35	(26,55)	(496,26)	SANGAT TINGGI	Kondisi ekonomi lokal dan global dimana daya beli masyarakat yang rendah	Langkah selanjutnya perlu untuk dilakukan relaksasi pajak bagi masyarakat dgn pembebasan pokok & denda serta melaksanakan kebijakan bebas bbnbk

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Ciputat (Persen)	100,00	48,38	48,38			
		UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong								
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	52,32	52,32	RENDAH	Tidak ada permasalahan	Sesuai perencanaan
	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Serpong (Persen)	100,00	82,75	82,75			
	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Serpong (persen)	100,00	52,42	52,42			
	5.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Serpong (Persen)	100,00	20,93	20,93			
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	5,35	(26,55)	(496,26)	SANGAT TINGGI	Kondisi ekonomi lokal dan global dimana daya beli masyarakat yang rendah	Langkah selanjutnya perlu untuk dilakukan relaksasi pajak bagi masyarakat dgn pembebasan pokok &

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
										denda serta melaksanakan kebijakan bebas bbnkb
	5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Serpong (Persen)	100,00	41,60	41,60			
		UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja								
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	66,47	66,47	SEDANG	Tidak ada permasalahan	Sesuai perencanaan
	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Balaraja (Persen)	100,00	76,76	76,76			
	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Balaraja (persen)	100,00	63,40	63,40			
	5.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Balaraja (Persen)	100,00	68,06	68,06			
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			PENDAPATAN DAERAH							
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	5,35	(26,55)	(496,26)	SANGAT TINGGI	Kondisi ekonomi lokal dan global dimana daya beli masyarakat yang rendah	Langkah selanjutnya perlu untuk dilakukan relaksasi pajak bagi masyarakat dgn pembebasan pokok & denda serta melaksanakan kebijakan bebas bbnkb
	5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Balaraja (Persen)	100,00	52,69	52,69			
		UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol								
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	65,58	65,58	SEDANG	Tidak ada permasalahan	Sesuai perencanaan
	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Cikokol (Persen)	100,00	87,33	87,33			
	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Cikokol (persen)	100,00	58,54	58,54			
	5.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Cikokol (Persen)	100,00	65,75	65,75			
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			PENDAPATAN DAERAH							
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	5,35	(26,55)	(496,26)	SANGAT TINGGI	Kondisi ekonomi lokal dan global dimana daya beli masyarakat yang rendah	Langkah selanjutnya perlu untuk dilakukan relaksasi pajak bagi masyarakat dgn pembebasan pokok & denda serta melaksanakan kebijakan bebas bbnkb
	5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Cikokol (Persen)	100,00	49,37	49,37			
		UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug								
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	59,18	59,18	RENDAH	Tidak ada permasalahan	Sesuai perencanaan
	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Ciledug (Persen)	100,00	79,79	79,79			
	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Ciledug (persen)	100,00	52,31	52,31			
	5.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Ciledug (persen)	100,00	52,06	52,06			
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			PENDAPATAN DAERAH							
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	5,35	(26,55)	(496,26)	SANGAT TINGGI	Kondisi ekonomi lokal dan global dimana daya beli masyarakat yang rendah	Langkah selanjutnya perlu untuk dilakukan relaksasi pajak bagi masyarakat dgn pembebasan pokok & denda serta melaksanakan kebijakan bebas bbnkb
	5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Ciledug (Persen)	100,00	47,04	47,04			
		UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon								
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	62,04	62,04	RENDAH	Tidak ada permasalahan	Sesuai perencanaan
	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Cilegon (persen)	100,00	71,38	71,38			
	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Cilegon (persen)	100,00	59,59	59,59			
	5.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Cilegon (Persen)	100,00	51,37	51,37			
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			PENDAPATAN DAERAH							
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	5,35	(26,55)	(496,26)	SANGAT TINGGI	Kondisi ekonomi lokal dan global dimana daya beli masyarakat yang rendah	Langkah selanjutnya perlu untuk dilakukan relaksasi pajak bagi masyarakat dgn pembebasan pokok & denda serta melaksanakan kebijakan bebas bbnkb
	5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Cilegon (Persen)	100,00	40,97	40,97			
		UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua								
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	67,88	67,88	SEDANG	Tidak ada permasalahan	Sesuai perencanaan
	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPD Kelapa Dua (persen)	100,00	63,02	63,02			
	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Kelapa Dua (persen)	100,00	68,06	68,06			
	5.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPD Kelapa Dua (Persen)	100,00	71,38	71,38			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Persen)	5,35	(26,55)	(496,26)	SANGAT TINGGI	Kondisi ekonomi lokal dan global dimana daya beli masyarakat yang rendah	Langkah selanjutnya perlu untuk dilakukan relaksasi pajak bagi masyarakat dgn pembebasan pokok & denda serta melaksanakan kebijakan bebas bbnkb
	5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada UPTD PPD Kelapa Dua (Persen)	100,00	39,47	39,47			
5.4	5.03 KEPEGAWAIAN									
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH								
	5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	6,07	6,07	SANGAT RENDAH	Terdapat beberapa output belum terlaksana karena efisiensi	Akan ditindaklanjuti saat perubahan anggaran
	5.03.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	51,93	51,93			
	5.03.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100,00	4,79	4,79			
	5.03.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Persen)	100,00	44,38	44,38			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	5.03.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	21,38	21,38			
	5.03.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	34,62	34,62			
	5.03.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	89,70	89,70			
	5.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	62,22	62,22			
	5.03.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	38,53	38,53			
	5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							
				Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan (Nilai)	4,99	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Terdapat beberapa output belum terlaksana karena efisiensi	Akan disesuaikan perubahan anggaran
	5.03.02.1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (Persen)	100,00	90,64	90,64			
	5.03.02.1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Persen)	100,00	53,21	53,21			
				Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja (Nilai)	7,50	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Terdapat beberapa output belum terlaksana karena efisiensi	Akan disesuaikan dengan perubahan anggaran

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	5.03.02.1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Persen)	100,00	69,62	69,62			
				Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi (Nilai)	19,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Beberapa output belum dilaksanakan karena efisiensi	Selanjutnya akan disesuaikan pada saat perubahan anggaran
	5.03.02.1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN (Persen)	100,00	20,51	20,51			
				Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai (Nilai)	39,50	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Beberapa output belum dilaksanakan karena efisiensi	Selanjutnya akan disesuaikan pada saat perubahan anggaran
	5.03.02.1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (Persen)	100,00	44,09	44,09			
				Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai (Nilai)	39,50	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Terdapat beberapa output belum terlaksana karena efisiensi anggaran	Selanjutnya akan ditindaklanjuti pada saat perubahan anggaran
	5.03.02.1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (Persen)	100,00	71,01	71,01			
				Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi (Nilai)	36,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Terdapat beberapa output belum terlaksana karena efisiensi anggaran	Akan ditindaklanjuti pada perubahan anggaran
	5.03.02.1.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Ketercapaian Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN (Persen)	100,00	92,90	92,90			
				Nilai Kriteria Pengembangan Karier (Nilai)	75,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Beberapa output belum terlaksana karena efisiensi	Akan ditindaklanjuti pada perubahan anggaran
	5.03.02.1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN (Persen)	100,00	79,97	79,97			
5.5	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
		BADAN PENGEMBANGAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		SUMBER DAYA MANUSIA								
	5.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Persen)	100,00	51,24	51,24	RENDAH	-	-
	5.04.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	71,89	71,89			
	5.04.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (Persen)	100,00	52,19	52,19			
	5.04.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunya laporan/dokumen administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah (Persen)	100,00	100,00	100,00			
	5.04.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (Persen)	100,00	52,37	52,37			
	5.04.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah (Persen)	100,00	54,59	54,59			
	5.04.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersusunya laporan/dokumen administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah (Persen)	100,00	50,26	50,26			
	5.04.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah (Persen)	100,00	39,93	39,93			
	5.04.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersusunya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100,00	43,48	43,48			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Pemerintahan Daerah (Persen)						
	5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
				Persentase Capaian pemantauan dan evaluasi, sertifikasi pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi (Persen)	100,00	70,84	70,84	SEDANG	-	-
	5.04.02.1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (Persen)	90,00	70,85	78,72			
				Rasio ASN Provinsi Banten Yang Lulus Uji Kompetensi/ Sertifikasi (Persen)	90,00	35,20	39,11	SANGAT RENDAH	-	-
	5.04.02.1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (Persen)	90,00	35,19	39,11			
				Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang pengembangan kompetensi (Persen)	100,00	66,85	66,85	SEDANG	-	-
	5.04.02.1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (Persen)	90,00	66,85	74,28			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Rasio peserta pengembangan kompetensi Dasar, manajemen dan Kepemimpinan,serta Kompetensi Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau STTPL (Persen)	90,00	20,87	23,19	SANGAT RENDAH	-	-
	5.04.02.1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (Persen)	90,00	18,56	20,62			
				Rasio peserta pengembangan kompetensi teknis umum, substantif, dan pemerintahan yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau STTPL. (Persen)	90,00	31,69	35,21	SANGAT RENDAH	-	-
	5.04.02.1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Persen)	90,00	28,81	32,01			
5.6	5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG									
		BADAN PENGHUBUNG								
	5.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	5.07.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	74,50	74,50			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	5.07.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah (Persen)	100,00	58,44	58,44			
	5.07.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Persen)	100,00	16,15	16,15			
	5.07.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (Persen)	100,00	0,00	0,00			
	5.07.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah (Persen)	100,00	46,91	46,91			
	5.07.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	54,95	54,95			
	5.07.02		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG							
				Cakupan Koordinasi Badan Penghubung terhadap Pemerintah Daerah (Indeks)	3,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	5.07.02.1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaporkannya Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Laporan)	75,00	40,86	54,48			
6	6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6.1	6.01 INSPEKTORAT DAERAH									
		INSPEKTORAT								
	6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahah Daerah Provinsi (Persen)	100,00	48,75	48,75	SANGAT RENDAH	tidak ada kendala	
	6.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)	100,00	46,45	46,45			
	6.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah (persen)	100,00	43,54	43,54			
	6.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (persen)	100,00	73,34	73,34			
	6.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah (persen)	100,00	84,56	84,56			
	6.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)	100,00	0,00	0,00			
	6.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	100,00	50,72	50,72			
	6.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	100,00	38,57	38,57			
	6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti (Persen)	100,00	42,21	42,21	SANGAT RENDAH	penyelenggaraan pengawasan sampai dengan TW 2 ditargetkan 95 baru tercapai 59. 1.Reviu RENSTRA sebanyak 33 belum tercapai karena masih menunggu Pansus DPRD Provinsi yang rencananya pada TW 3 dan pengawasan Kinerja Program Prioritas sebanyak 3 masih berjalan sampai dengan pertengahan juli	reviu renstra dan akan program prioritas akan dilaksanakan pada TW 3
	6.01.02.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase ketercapaian Kegiatan penyelenggaraan Pengawasan Internal (persen)	100,00	37,43	37,43			
	6.01.02.1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (persen)	100,00	50,06	50,06			
				Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti (persen)	80,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	jumlah temuan di TW 2 sebanyak dan telah ditindak lanjuti sebanyak...	akan di tindaklanjuti temuan yang belum selesai
	6.01.02.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase ketercapaian Kegiatan penyelenggaraan Pengawasan Internal (persen)	100,00	40,15	40,15			
	6.01.02.1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (persen)	100,00	49,93	49,93			
	6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							
				Persentase Ketercapaian Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (Persen)	100,00	2,86	2,86	SANGAT RENDAH	tidak ada kendala dilakukan pendampingan ZI, pelaksanaan MSCP,	akan dilakukan pendampingan lainnya seperti RB, benturan kepentingan, gratifikasi
	6.01.03.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di BidangnnPengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan (persen)	100,00	10,20	10,20			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	6.01.03.1.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase ketercapaian Kegiatan Pendampingan dan Asistensi (persen)	100,00	42,00	42,00			
7	8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
7.1	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
	8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	28,18	28,18	SANGAT RENDAH		
	8.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	54,79	54,79			
	8.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100,00	59,94	59,94			
	8.01.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Persen)	100,00	100,00	100,00			
	8.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (Persen)	100,00	57,16	57,16			
	8.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah (Persen)	100,00	55,16	55,16			
	8.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100,00	52,80	52,80			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Pemerintahan Daerah (Persen)						
	8.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	45,08	45,08			
	8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							
				Persentase realisasi capaian pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI) (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	8.01.02.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Capaian Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persen)	100,00	24,76	24,76			
	8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							
				Nilai IDI Pada poin hak-hak politik (Nilai)	68,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	8.01.03.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	"Persentase Capaian Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan (Persen)	100,00	98,91	98,91			
	8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							
				Persentase capaian pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		
	8.01.04.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Capaian Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Persen)	100,00	93,18	93,18			
	8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							
				Nilai IDI Pada poin kebebasan sipil (Nilai)	89,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	8.01.05.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Capaian Pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Persen)	100,00	42,96	42,96			
	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
				Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah (Persen)	100,00	71,51	71,51	SEDANG		
	8.01.06.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (Persen)	100,00	81,48	81,48			



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025